



GIBRAN UNJUK GIGI DI AFRIKA
**LAYAK JADI
CAPRES 2029**

**STANDAR BARU
PELAYANAN
KESEHATAN KELAS
ATAS DI SUMSEL**

**RAKYAT
BISA COPOT
ANGGOTA
DPR**

**RKUHP RESMI
DISAHKAN
JALAN KE MK
TERBUKA LEBAR**

**POLRI
DILARANG
JADI
PEJABAT
SIPIL**

**PLAZA BKB
DISULAP JADI
RUANG PUBLIK
KELAS DUNIA**

**KEJAGUNG
BONGKAR BOROK
INVESTASI TELKOM
KE GOTO**



info indonesia

www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

Network



INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



www.infoindonesia.id
facebook @infoindonesia.id twitter @_infoindonesia
Instagram @info_indonesia.id YouTube : infoindonesiatv

JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id



H A P P Y N E W Y E A R

EDISI
BULAN
DESEMBER
2025

DAFTAR ISI



7 INFO UTAMA

Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan pada 2025, mewakili Presiden Prabowo Subianto, dapat dibaca sebagai investasi politik jangka panjang yang sangat strategis. Momen G20 ini berfungsi ganda: sebagai tugas negara dan sebagai landasan peluncuran untuk membangun kredensial kepemimpinan Gibran menuju Pilpres 2029.



22

INFO PRIORITAS

Pelabuhan Tanjung Carat tengah diwujudkan sebagai gerbang ekonomi Sumatera Selatan dan masuk daftar pertama program strategis Pemerintahan Herman Deru dan Cik Ujang.



36

INFO DAERAH

Provinsi DKI Jakarta mencatatkan pertumbuhan ekonomi 4,96 persen pada Triwulan III/2025. Angka ini menunjukkan pemulihan dan stabilitas ekonomi yang didukung inflasi yang sangat terjaga.



54

INFO EKONOMI

Kejaksaan Agung akhirnya mengakui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sudah membuka penyelidikan dugaan korupsi pada keputusan investasi PT Telkom Indonesia (TLKM) di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).



66

INFO ISTANA

Dalam riak tahun pertamanya memimpin, Presiden Prabowo Subianto telah mengayunkan palu kekuasaan konstitusionalnya, bukan melalui undang-undang atau kebijakan fiskal, melainkan melalui instrumen yang paling mendasar dan istimewa: hak prerogatif.



70

INFO NASIONAL

Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.



87

INFO KHUSUS

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tengah menghadapi krisis kepercayaan publik dan ancaman ancaman terberat dalam sejarah reformasi pasca-Orde Baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkapkan, Ditjen Bea Cukai terancam dibekukan menyusul serangkaian masalah yang telah mencoreng citra lembaga.



3 DARI REDAKSI

20 OPINI

46 INFO KULINER

48 INFO WISATA

50 INFO KESEHATAN

84 INFO PROFIL

86 KAJI

80

INFO PALEMBANG

Pemerintah Kota Palembang tengah menggarap revitalisasi besar-besaran Plaza Benteng Kuto Besak (BKB) sebagai langkah untuk menjadikannya ikon wisata baru.

OPTIMISME

Sejak dilantik pada September 2025 sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih, Purbaya Yudhi Sadewa telah menjadi magnet baru bagi optimisme publik dan pasar.

Dengan latar belakang akademis yang kuat sebagai ekonom dan insinyur dari Purdue University serta rekam jejak yang beragam, Purbaya hadir dengan auktoritas dan ekspektasi tinggi.

Optimisme ini—yang oleh beberapa pihak disebut sebagai “Purbaya Effect”—bukan tanpa dasar. Pasar merespons positif sinyal kebijakan awalnya, yang fokus pada peningkatan stimulus fiskal, percepatan belanja pemerintah, dan keberpihakan pada sektor riil, terutama UMKM. Lantas, seberapa jauh effect ini dapat membawa ekonomi Indonesia ke depan?

Optimisme terhadap kepemimpinan Purbaya bersumber dari beberapa faktor kunci yang dinantikan pasar dan masyarakat.

Fokus pada Stimulus Sektor Riil adalah hal utama. Purbaya telah mengindikasikan bahwa keterlambatan belanja pemerintah menjadi salah satu biang kerok melambatnya pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2025.

Komitmennya untuk memastikan belanja fiskal pada Triwulan I tahun depan akan berjalan mulus adalah vital. Dorongan dana melalui perbankan dan pembiayaan UMKM secara langsung diharapkan dapat memperkuat konsumsi rumah tangga.

Faktor kedua adalah Sinergi Kebijakan. Dengan latar belakang yang pernah menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kemenko Marves, Purbaya dinilai memiliki pemahaman komprehensif tentang sektor moneter, jasa keuangan, dan sektor riil.

Sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi sambil mendorong pertumbuhan hingga di atas 5,5 persen yang ditargetkan pemerintah.

Terakhir, ada Keyakinan Pasar. Optimisme Purbaya tentang pertumbuhan ekonomi Kuartal IV 2025 yang diproyeksikan mencapai 5,6–5,7 persen telah memberikan sinyal positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHGS). Kepercayaan diri ini, jika didukung data yang solid, dapat mengubah narasi pasar dari keraguan menjadi momentum akselerasi.

Meskipun optimisme adalah modal politik dan pasar yang berharga, jalan ke depan bagi ekonomi Indonesia tetap dipenuhi tantangan struktural dan global yang besar.

Salah satu tantangan terbesar adalah Jaminan Keberlanjutan Fiskal. Program-program populis yang dijanjikan dalam kampanye politik memerlukan biaya yang masif.

Tugas terbesar Purbaya adalah menjamin bahwa peningkatan belanja negara tidak akan mengorbankan kredibilitas fiskal Indonesia. Defisit APBN harus tetap terkendali di bawah 3 persen dari PDB, sementara rasio utang harus dikelola secara hati-hati.

Keahlian Purbaya di bidang keuangan akan diuji untuk menemukan sumber pembiayaan kreatif, termasuk reformasi perpajakan yang berkelanjutan.

Tantangan lainnya datang dari Tekanan Global dan Hilirisasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kinerja ekspor, yang masih diuntungkan oleh program hilirisasi. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

- TELP 021-791 96781
- FAX 021-791 96786

Twitter : @Infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadhi, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI :** Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



Gibran Unjuk Gigi di Afrika

LAYAK JADI CAPRES 2029

Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan pada 2025, mewakili Presiden Prabowo Subianto, dapat dibaca sebagai investasi politik jangka panjang yang sangat strategis. Momen G20 ini berfungsi ganda: sebagai tugas negara dan sebagai landasan peluncuran untuk membangun kredensial kepemimpinan Gibran menuju Pilpres 2029.

• INFO UTAMA

Kehadiran di G20 bukan hanya tentang diplomasi, tetapi juga tentang pembentukan citra, penguasaan isu, dan pembuktian kapasitas.

Kehadiran Gibran di forum puncak ekonomi global ini ditandai dengan pidato perdananya yang tegas, menyoroti isu-isu keadilan, kedaulatan pembangunan, dan peran krusial Global South.

Dalam salah satu sesi KTT G20, Gibran menekankan pentingnya kerja sama global yang berlandaskan kesetaraan, khususnya dalam hal peta jalan pembangunan setiap negara. Dia menegaskan bahwa tidak ada satu model tunggal yang dapat diterapkan untuk semua.

"Indonesia percaya bahwa pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif, karena tidak ada satu pun model tunggal yang cocok untuk semua," ujar Gibran di hadapan para pemimpin dunia.

Ia melanjutkan dengan pesan mendasar tentang prinsip kemitraan bahwa tidak ada yang namanya 'metode terbaik'.

"Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte. Kerja sama harus mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan," ujarnya.

Indonesia, melalui Gibran, juga memperkenalkan kerangka kerja untuk menghadapi tantangan multidimensi global, mulai dari krisis iklim hingga kerawanan pangan. Kerangka ini disebut Ketahanan Berkelanjutan (Sustainable Resilience).

Gibran menjelaskan filosofi di balik konsep tersebut berangkat dari berbagai pengalaman.

"Indonesia mempromosikan konsep ketahanan berkelanjutan, sebuah kerangka kerja yang memungkinkan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan berjalan selaras," kata Wapres.

Dalam konteks ini, Gibran juga mengangkat program unggulan pemerintah. Dia menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu bentuk investasi strategis Indonesia dalam pembangunan manusia dan ketahanan nasional.

Dalam sesi yang membahas tata kelola kecerdasan buatan (Artificial Intel-

ligence/AI) dan mineral kritis, Gibran menyoroti ketimpangan yang terjadi dalam revolusi industri masa lalu dan menyerukan agar sejarah tersebut tidak terulang.

Menanggapi dominasi teknologi AI yang terpusat, Gibran menyerukan perlunya revolusi teknologi yang adil dan inklusif.

"AI akan menentukan kekuatan ekonomi selama beberapa dekade mendatang, namun hari ini manfaatnya tetap sangat tidak merata, terkonsentrasi di segelintir perusahaan dari beberapa

negara berkembang mengekspor bahan mentah, sementara nilai sesungguhnya diambil di tempat lain. Revolusi industri di masa lalu dibangun di atas ketidakseimbangan ini.

"Kita tidak boleh mengulanginya. Inilah mengapa Indonesia memilih jalur hilirisasi. Kami membangun industri di dalam negeri dan berinvestasi pada transformasi hilir, dan memastikan masyarakat kami mendapatkan manfaat dari kekayaan alam mereka sendiri," tegasnya.



negara maju. Jika ketidakseimbangan ini terus berlanjut, kesenjangan digital akan semakin dalam. Revolusi kali ini harus adil, dan harus baik bagi rakyat," jelasnya.

Lebih lanjut, Gibran juga menyinggung praktik eksploitasi sumber daya alam di negara berkembang.

Dia menyebut, terlalu lama negara-ne-

Di luar forum KTT, dalam gelaran Indonesia-Afrika CEO Forum, Gibran membawa kabar baik yang disambut meriah oleh para pelaku usaha di Afrika Selatan.

"Kedua Presiden sepakat untuk bebas visa masuk. Jadi, saya pikir kabar baik untuk kalian semua," umum Gibran, yang langsung mendapatkan tepuk tan-

gan meriah.

Pengumuman ini merupakan realisasi dari kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan mobilitas masyarakat kedua negara.

Gibran juga menggunakan platform G20 untuk menyuarakan keprihatinan Indonesia terhadap krisis kemanusiaan.

"Dunia tak boleh menormalisasi penderitaan manusia," tegas Gibran, yang

Indonesia yang kian vokal dan proaktif dalam mendorong tatanan global yang lebih berkeadilan.

Ujian Kapabilitas Internasional

Kehadiran Wapres Gibran di KTT G20 di Afrika Selatan bukan hanya sebuah peristiwa diplomatik rutin. Bagi para pengamat politik dan komunikasi di Indonesia, momen ini adalah ujian kapabilitas internasional pertama yang paling krusial bagi Gibran, sekaligus pengegasan strategi politik dari duet kepem-

Menurut pengamat politik, Jamiluddin Ritonga, sebagai wakil presiden, Gibran memang sudah seharusnya mewakili Prabowo bila sedang berhalangan. Hal itu memang sudah diatur dalam ketatanegaraan Indonesia.

"Karena itu, tidak ada yang luar biasa dan aneh bila Gibran mewakili Prabowo menghadiri dan nantinya berpidato KTT G20 di Johannesburg. Justru jadi aneh, bila Presiden Prabowo berhalangan tapi diwakilkan bukan pada wakil presiden. Katakanlah ketidakhadiran Prabowo diwakilkan ke salah satu menternya, sementara wakil presidennya sehat dan bugar," jelas Jamiluddin.

Jamiluddin mengatakan, apabila Gibran berpidato di KTT G20, bukanlah karena ia sosok yang hebat. Gibran bisa berpidato di Johannesburg semata karena berperan mewakili Prabowo.

Menurutnya, sebagai mewakili Presiden, tentu kita berharap Gibran dapat menjaga marwah Indonesia di mata dunia internasional. Setidaknya Gibran harus dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai Wakil Presiden dari bangsa yang besar, Indonesia.

Dia berharap, Gibran dapat membangunkan dan menghentak pemimpin G20 sebagaimana yang dilakukan Prabowo saat berpidato di PBB. Dengan begitu, pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 menilai tidak ada ketimpangan kapasitas Presiden Prabowo dengan Wakilnya Gibran.

"Kalau hal itu dapat ditunjukkan Gibran, maka wakil presiden sudah mampu mengharumkan Indonesia di dunia, setidaknya di G10. Gibran memang layak menjadi Wakil Presiden dan mewakili Presiden di kancah internasional," ujar Jamiluddin.

"Hal itu sekaligus dapat membantah keraguan sebagian anak bangsa kepada kapasitas Gibran sebagai wakil presiden. Saatnya Gibran membuktikan dirinya di Johannesburg, Afrika Selatan. Kita tunggu," imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa materi yang disampaikan Gibran, seperti promosi QRIS dan agenda hilirisasi, harus dibingkai dalam narasi besar keadilan global.

"Keberhasilan Gibran dalam menyampaikan materi yang kompleks secara meyakinkan dan mampu berdiplomasi secara peer-to-peer akan menjadi bukti



menyuarakan dukungan Indonesia terhadap solusi damai dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak konflik.

Setelah menuntaskan seluruh agenda diplomasi di Johannesburg, Gibran segera kembali ke Tanah Air dan melaporkan hasil KTT G20 secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kehadirannya di G20 menegaskan posisi

impinan Presiden Prabowo Subianto.

Gibran, yang dikenal dengan latar belakang pengusaha dan Walikota, datang ke G20 membawa beban ekspektasi yang tinggi dan skeptisisme yang tidak sedikit. Forum G20 menuntut penguasaan isu-isu kompleks mulai dari geopolitik, stabilitas moneter, hingga transisi energi.

• INFO UTAMA

nyata bahwa ia layak memegang mandat sebagai Wakil Presiden dan mewakili Presiden di kancah internasional tanpa keraguan politik," ujarnya.

Setelah Gibran menuntaskan agenda, nada pengamat cenderung berubah. Fadli Rumakefing, dari Solidaritas Pemuda Desa Indonesia, melihat bahwa output yang dibawa pulang, termasuk pengumuman bebas visa dengan Afrika Selatan dan penekanan pada solidaritas Global South, berhasil menepis pandangan sinis.

"Penampilan Gibran di KTT G20 secara tidak langsung menjawab olok-olok atau keraguan yang selama ini diarahkan kepadanya. Dengan membawa agenda strategis dan berinteraksi langsung den-

memiliki peran sentral dan strategis, tidak hanya peran seremonial.

"Ini merupakan sinyal kuat dari Prabowo bahwa ia ingin menunjukkan soliditas duet kepemimpinan yang utuh. Ini bukan hanya masalah kepercayaan, tetapi masalah pembagian tugas yang terstruktur. Prabowo memberikan kesempatan emas bagi Gibran untuk unjuk kemampuan di arena yang sesungguhnya, bukan sekadar tugas di dalam negeri," jelas Hensat, sapaannya.

Ia menambahkan, harapannya adalah citra bahwa Gibran harus aktif berkontribusi nyata dalam menjalankan roda pemerintahan, bukan hanya menjadi pelengkap. Dengan menghadiri G20, Gibran menunjukkan bahwa ia

antara dua pemimpin tersebut," ungkap Efriza.

Dia menyebut, pesan utamanya adalah pemerintahan ini serius dengan agenda strategisnya, dan Gibran adalah bagian integral dari upaya tersebut untuk menjamin keberlanjutan visi pembangunan Indonesia di mata komunitas global.

Secara keseluruhan, dia menilai bahwa G20 Afrika Selatan berhasil menjadi pembaptisan politik internasional bagi Gibran menguatkan citranya sebagai pemimpin muda yang mampu membawa agenda strategis Indonesia ke panggung global, sekaligus meredam kritik bahwa ia hanya akan menjadi wakil presiden seremonial.



gan pemimpin dunia, keraguan publik telah diredam. Ini adalah pengakuan bahwa generasi baru kepemimpinan Indonesia telah hadir dan siap memainkan peran penting dalam percaturan dunia dengan pendekatan yang lugas dan berorientasi pada hasil," kata Fadli, menggarisbawahi pentingnya soft power yang ditampilkan Gibran.

Di luar substansi, penugasan ke G20 dilihat sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk mengkonsolidasikan citra kepemimpinan dan menempatkan Gibran sebagai mitra yang aktif dan kompeten sejak dini.

Pakar Komunikasi Politik, Hendri Satrio, menginterpretasikan langkah ini sebagai penegasan bahwa Gibran akan

langsung terlibat dalam isu-isu ekonomi dan geopolitik tingkat atas, sekaligus membangun jaringan diplomatik pribadinya.

Penafsiran serupa dikemukakan oleh pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, yang melihat adanya kesatuan visi yang ingin ditampilkan kepada pemilih dan investor internasional.

"Penunjukan ini menunjukkan adanya misi yang sama dan keselarasan agenda yang kuat antara Prabowo dan Gibran. Dengan Gibran membawa pesan-pesan kunci Prabowo tentang hilirisasi, Ketahanan Berkelanjutan, dan keadilan AI, ini adalah cara yang sangat efektif untuk membangun momentum dan citra kerja sama yang kompak di

Proyeksi Kepemimpinan

Di era modern, kemampuan seorang pemimpin untuk berinteraksi dan menguasai panggung internasional menjadi prasyarat tak terhindarkan bagi seorang calon presiden. KTT G20 menjadi wadah bagi Gibran untuk secara efektif menghapus stigma politiknya yang minim pengalaman diplomasi.

Dengan menyampaikan pidato yang substansial mengenai Ketahanan Berkelanjutan dan keadilan AI, Gibran menunjukkan bahwa ia tidak hanya menguasai isu domestik, tetapi juga isu global yang kompleks. Keberaniannya mengumumkan kesepakatan bebas visa dengan Afrika Selatan juga menunjukkan kemampuannya mewujudkan

hasil nyata di tingkat bilateral.

Kepercayaan dari Prabowo untuk mengirimnya ke forum sepenting G20 mengirimkan sinyal kuat ke publik domestik bahwa ia adalah penerus yang dipercaya dan memiliki mandat penuh untuk melakukan diplomasi. Hal ini secara langsung meningkatkan political capital dan legitimasi Gibran sebagai figur sentral dalam pemerintahan.

Materi yang disampaikan Gibran di G20, yang berfokus pada hilirisasi, mineral kritis, dan keadilan teknologi, secara efektif menjadi fondasi awal untuk platform kebijakan yang dapat ia bawa ke Pilpres 2029.

Dengan secara konsisten menggaungkan pesan tentang hilirisasi dan pentingnya Indonesia sebagai pemimpin di Global South, Gibran memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang tidak hanya melanjutkan visi pendahulunya, tetapi juga memiliki visi ekonomi yang jelas dan berani.

Penekanannya pada keadilan AI dan transisi energi menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan masa depan. Isu-isu ini sangat relevan bagi pemilih muda (Gen Z dan Milenial), menjadikannya figur yang future-oriented dan mampu berbicara dalam bahasa generasi yang akan mendominasi pemilu 2029.

Penampilan Gibran di G20, sebagai perwakilan termuda di antara para pemimpin dunia, memberikan narasi politik yang kuat mengenai perubahan dan modernitas.

Kehadirannya mengukuhkan citra Gibran sebagai pemimpin generasi baru yang setara dengan pemimpin dunia lainnya. Ini adalah visual branding politik yang tak ternilai harganya, memproyeksikannya sebagai wajah Indonesia modern di masa depan.

Keberhasilan Gibran dalam mengawal agenda G20 membantu memperkuat narasi soliditas duet Prabowo-Gibran. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas dan kesinambungan politik, yang pada gilirannya memuluskan jalan bagi Gibran untuk menjadi kandidat transisi yang ideal dari pemerintahan sebelumnya, mendapatkan dukungan penuh dari mesin politik pendukung yang sudah ada.



Secara ringkas, KTT G20 di Afrika Selatan adalah lebih dari sekadar tugas kenegaraan bagi Gibran. Itu adalah batu loncatan politik yang dipersiapkan dengan cermat. Momen tersebut membuktikan kapasitasnya

di mata dunia, membangun kredensial kebijakan yang kuat, dan secara simbolis memposisikannya sebagai pemimpin masa depan yang siap memimpin bangsa di tengah tantangan global tahun 2029. ●

AHY ANCAMAN NYATA GIBRAN

Pertarungan Dinasti
Politik Masa Depan

Kontestasi elektoral
Pemilihan Presiden
2029 memang masih
berjarak empat tahun,
namun spekulasi men-
genai poros kekuatan
politik di masa depan
telah menjadi perbin-
cangan hangat di kalan-
gan elit dan publik.

Dua figur muda yang kini menduduki posisi strategis, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gibran Raka-buming Raka, diperkirakan kuat akan menjadi rival utama dalam pertarungan menuju kursi kepemimpinan nasional. Kedua tokoh ini, yang sama-sama berasal dari lingkaran dinasti politik paling berpengaruh di Indonesia, kini berada di koalisi yang sama, namun potensi persaingan mereka telah diisyaratkan secara terbuka oleh pucuk kekuasaan.

Sinyal persaingan yang paling eksplisit datang dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di Kongres VI Partai Demokrat, Prabowo menyinggung AHY dan Gibran yang saat itu duduk berdampingan, melontarkan sebuah "kode keras" yang sarat makna politik.

Momen kunci itu terjadi ketika Prabowo menyambut AHY, yang baru saja dilantik sebagai Menteri, dan Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih. Dengan nada berkelakar, Prabowo menyinggung masa depan politik kedua tokoh muda tersebut.

"Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini. Tidak apa-apa, bersaing itu baik. Siapa nomor 1 ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Jadi kita harus mempersiapkan estafet kepemimpinan nasional ini. Saya lihat dua-duanya punya potensi untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa," ujar Prabowo, yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Di pihak Partai Demokrat, pernyataan Prabowo dianggap sebagai pengakuan strategis atas kapasitas politik yang telah dibangun AHY. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan, AHY telah siap menghadapi tantangan 2029, bukan hanya karena warisan, tetapi karena proses dan perjuangan yang teruji.

"Kami berterima kasih dan mengapresiasi tinggi pandangan Bapak Prabowo yang melihat kapasitas Mas AHY sebagai pemimpin masa depan. Ini menunjukkan bahwa beliau melihat Mas AHY tidak sekadar mewarisi nama besar, tetapi mengolah, membangun, dan memperjuangkan Partai Demokrat hingga menjadi kekuatan politik yang

solid dan diperhitungkan," ujar Herzaky.

Herzaky menekankan, lima tahun ke depan adalah fase krusial bagi AHY.

"Jabatan Mas AHY sebagai menteri di kabinet ini adalah panggung pembuktian kapasitas eksekutif yang akan melengkapi rekam jejak militernya yang disiplin dan pendidikan akad-

emisnya yang cemerlang. Ini adalah proses pendewasaan politik yang matang, bukan lonjakan tiba-tiba," tambahnya.

Lebih lanjut, Herzaky menegaskan, modal AHY adalah proven leadership dalam menghadapi krisis.

"Mas AHY telah memimpin Partai Demokrat melewati badai kudeta



• INFO UTAMA

politik internal. Itu menunjukkan ketangguhan, keberanian, dan kemampuan konsolidasi yang jarang dimiliki pemimpin muda lain. Partai Demokrat akan sepenuhnya mendukung langkah Mas AHY untuk mengambil peran strategis tertinggi di 2029. Kami memiliki infrastruktur partai dan legitimasi perjuangan, dua hal yang sangat vital untuk memenangkan kontestasi," pungkasnya, menggarisbawahi keunggulan struktural AHY.

Keunggulan Struktural AHY

Pengamat politik senior, Ikrar Nusa Bhakti, menganalisis bahwa pernyataan Prabowo ini memiliki makna

hanya Gibran yang dianggap sebagai satu-satunya pewaris politik.

Ikrar menambahkan, persaingan AHY dan Gibran adalah simbol dari pertarungan antara dua dinasti politik terbesar di era reformasi.

"Ini akan menjadi Pilpres yang didominasi oleh narasi regenerasi, namun dengan akar dari politik dinasti. Tantangannya bagi keduanya adalah bagaimana membuktikan bahwa mereka bukan hanya penerus nama besar, tapi memiliki kemampuan murni," kata Ikrar.

Meskipun Gibran menyandang status Wakil Presiden, analisis dari para ahli menunjukkan bahwa AHY memi-

la menjelaskan bahwa posisi ini memberikan AHY kontrol penuh atas tiga hal krusial.

Pertama, regulasi pencalonan. Partai Demokrat adalah partai yang telah melewati ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold atau PT). Artinya, AHY, melalui Demokrat, memiliki hak prerogatif untuk berkoalisi dan mencalonkan diri tanpa harus menunggu persetujuan dari pihak luar.

"Di Pemilu, mau sehebat apa pun popularitas Anda, jika tidak punya kendaraan, Anda hanya penonton. AHY sudah di kursi pengemudi," jelas Adi.

Kedua, mesin politik dan logistik. Sebagai Ketua Umum, AHY mengendalikannya jaringan relawan, pengurus di 38 provinsi, hingga tingkat ranting. Mesin politik ini adalah instrumen vital untuk mobilisasi suara di lapangan.

Gibran, di sisi lain, harus menunggu dan bergantung pada mesin partai yang mengusungnya, yang belum tentu sepenuhnya ia kuasai.

Ketiga, bargaining position atau daya tawar. Kepemimpinan partai menempatkan AHY sejajar dengan ketua umum partai lain dalam negosiasi koalisi.

"Daya tawar AHY jauh lebih tinggi. Dia bisa menentukan syarat, koalisi, dan arah perjuangan Demokrat.

Sementara Gibran harus berkompromi dengan struktur partai yang jauh lebih besar dan kompleks," kata Adi.

Adi juga mengingatkan, kenaikan Gibran yang cepat justru bisa menjadi bumerang dan menciptakan kerentanan narasi. AHY, meskipun juga berasal dari dinasti,

telah menjalani proses politik yang lebih terstruktur dan berjenjang.

"Ini membuat narasi politik AHY cenderung lebih resilient di mata pemilih yang mencari pemimpin yang telah teruji," kata Adi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangsi Syarwi Chaniago, memberikan penekanan khusus pada keunggulan kualitatif AHY dari sisi pengalaman dan kemandirian politik. Menurut Pangsi, meskipun



strategis yang sangat penting. Menurut Ikrar, pernyataan tersebut adalah restu strategis sekaligus endorsement yang menempatkan AHY dan Gibran pada level yang sama sebagai calon penerus bangsa.

"Kode Prabowo ini bukan sekadar guyonan, tapi penegasan bahwa Prabowo dan lingkaran kekuasaan saat ini melihat AHY dan Gibran sebagai dua figur paling potensial untuk memimpin Indonesia selanjutnya," jelas Ikrar.

Hal ini juga merupakan upaya Prabowo untuk menyeimbangkan dinamika koalisi. Dengan mengakui potensi persaingan, Prabowo secara tidak langsung memberi greenlight kepada AHY dan Demokrat untuk mulai memosisikan diri, sehingga tidak

iliki keunggulan struktural dan institusional yang lebih mapan untuk maju sebagai kandidat di 2029. Keunggulan ini terutama terletak pada peran dan posisi AHY dalam sistem politik multipartai di Indonesia.

Penilaian ini secara kuat ditekankan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, yang secara konsisten menyoroti bahwa dalam sistem politik Indonesia, kepemilikan kendaraan politik adalah aset tak ternilai.

"AHY sudah memegang 'tiket emas' yang definitif: Ketua Umum Partai Demokrat," tegas Adi.

un Gibran memegang jabatan Wapres, AHY memiliki lintasan karir yang lebih teruji dan bervariasi.

Pangi menilai, latar belakang AHY dari militer, dengan pendidikan lanjutan dari universitas ternama luar negeri (Harvard dan MIT), memberikan citra kepemimpinan yang disiplin, terpelajar, dan memiliki worldview luas.

"AHY telah melalui fase unfolding karier yang panjang; dari perwira karier, terjun ke Pilkada DKI yang sengit, mengkonsolidasikan partai yang sempat terpecah, hingga kini menjabat menteri. Proses ini membentuk maturity politik yang sangat diperlukan. AHY tidak mengambil jalan pintas," tegas Pangi.

Pangi menambahkan, transisi yang dilalui AHY ini menciptakan narasi personal yang kaya. Pemilih melihat AHY tidak hanya sebagai putra SBY, tetapi sebagai figur yang telah berjuang dan berkorban dalam berbagai medan politik dan non-politik.

"Ini adalah nilai jual personal yang sangat kuat. Sementara Gibran, lonjakan kariernya terlalu instan, membuat narasi personalnya terasa kurang dalam, dan masih sulit dilepaskan dari peran sang ayah," tambahnya.

Meskipun Gibran menyandang status Wakil Presiden dengan popularitas tinggi, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menekankan, AHY memiliki keunggulan yang jauh lebih fundamental, terutama terkait otonomi politik dan legitimasi perjuangan.

Ujang secara eksplisit menyebut bahwa tantangan terbesar Gibran adalah bayang-bayang patronase. Kenaikan Gibran sangat meteorik, tapi ini juga menjadi titik kerentanan utamanya. Mayoritas publik masih melihat Gibran sebagai 'produk dinasti' yang dilegitimasi oleh kekuasaan dan popularitas ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Ujang, untuk maju di 2029, Gibran harus mati-matian membuktikan kemandirian politiknya. Gibran wajib mendefinisikan dirinya sendiri selama lima tahun ini. Bukan sekadar melanjutkan atau mewakili Jokowi, tapi sebagai pemimpin yang membawa ide, visi, dan perjuangan yang orisinal.

"Jika ia gagal menunjukkan leadership yang otonom, narasi lawan politik akan sangat mudah menyerangnya dengan isu dinasti," ungkap Ujang.

Sebaliknya, Ujang melihat AHY unggul dalam narasi perjuangan politik. AHY dinilai telah melalui ujian politik yang lebih keras dan membuktikan kemampuan leadership yang mandiri, terutama dalam mempertahankan dan mengkonsolidasikan Partai Demokrat di tengah badai internal dan eksternal.

"AHY sudah punya cerita perjuangan yang menarik. Dia tidak hanya menerima warisan, tapi berjuang mempertahankan warisan itu dengan kerin-gat sendiri. Dia menghadapi tantangan

Indonesia Maju. Skenario ini diprediksi akan sangat memecah suara dan menciptakan polarisasi baru.

Kedua, skenario duet maut (berpasangan). AHY dan Gibran bersatu dalam satu tiket, misalnya Gibran-AHY atau sebaliknya. Duet ini akan menjadi kekuatan elektoral yang hampir tak tertandingi, menggabungkan kekuatan institusional (AHY) dan popularitas elektoral (Gibran), namun ambisi politik kedua tokoh muda ini mungkin membuat skenario ini sulit terwujud.

"Pertarungan ini bukan hanya soal individu, tapi soal gaya kepemimpinan. AHY mewakili gaya yang lebih terstruktur, berbasis lembaga dan rekam je-



yang jauh lebih nyata daripada Gibran sejauh ini. Ini adalah modal narasi penting, karena pemilih Indonesia cenderung simpatik kepada tokoh yang dianggap berjuang," papar Ujang.

Potensi Koalisi Tiga Poros

Pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia (UI), Arya Budi, menguraikan skenario yang mungkin terjadi di 2029 dengan mengasumsikan Prabowo Subianto tidak maju kembali.

Pertama, skenario pertarungan (rivalitas). AHY memimpin poros tengah dengan Partai Demokrat, didukung oleh partai-partai yang mencari alternatif kepemimpinan di luar bayang-bayang Jokowi. Sementara, Gibran memimpin poros utama yang didukung oleh sisa kekuatan Koalisi

jak. Gibran mewakili gaya populis dan didukung oleh endorsement kekuasaan. Perbedaan gaya ini akan menjadi narasi utama yang ditawarkan kepada pemilih," kata Arya.

Secara keseluruhan, perjalanan politik AHY dan Gibran dalam lima tahun ke depan akan menjadi penentu. AHY harus membuktikan kemampuannya di arena eksekutif sebagai menteri dan menjaga konsistensi Partai Demokrat.

Sementara, Gibran harus membuktikan popularitasnya adalah hasil dari kemampuan pribadinya, bukan semata-mata limpahan dari ayahnya. 'Kode keras' dari Prabowo telah membuka tirai pertunjukan, kini giliran AHY dan Gibran yang harus memainkan peran mereka untuk memenangkan panggung Pilpres 2029. ●

SUMATERA DARURAT BENCANA

Sumatera tengah dirundung duka. Dalam beberapa hari terakhir, puluhan kabupaten dan kota di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dilanda banjir dan tanah longsor yang dikaitkan dengan cuaca ekstrem. Puluhan ribu warga terdampak dan puluhan lainnya telah dilaporkan meninggal dunia.

Pemerintah terus mengupayakan langkah evakuasi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta pengiriman logistik bantuan hingga ke area yang terisolasi akibat bencana alam tersebut. Salah satu ikhtiar itu ditunjukkan dengan pengiriman sebelas helikopter ke daerah-daerah bencana.

"Semua sedang fokus ke evakuasi, pembukaan jalan, dan mendorong logistik sampai titik terdalam," kata Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, saat dikonfirmasi mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau lokasi bencana, Sabtu, 29 November 2025.

Untuk itu, penanganan bencana dipercepat dengan mengerahkan sebelas helikopter dari Jakarta menuju wilayah terdampak.

"Sampai dengan hari ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi

daerah terdampak bencana," ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Sebanyak sembilan helikopter telah berada di lokasi sejak 26 November 2025. Helikopter tersebut secara simultan menjalankan operasi distribusi bantuan serta pemantauan.

"Dua helikopter tambahan telah terbang ke Aceh dari Jakarta pagi ini," tambahnya.

Semua helikopter difokuskan untuk operasi distribusi logistik secara terus-menerus, terutama menuju daerah-daerah yang terisolasi dan kawasan yang akses daratnya terputus. Seluruh operasi udara ditempuh dengan mengutamakan faktor keselamatan dan kondisi cuaca sebagai pertimbangan utama.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat beberapa jalur yang terputus di Sumatera Utara. Di Tapanuli Selatan, jalur nasional Sidempuan-Sibolga terputus di satu titik, sementara jalur Sipirok-Medan terputus di dua titik.



Di Mandailing Natal, beberapa ruas jalan seperti Singkuang–Tabuyung dan Bulu Soma–Sopotinjak terputus akibat banjir dan longsor. Upaya pembukaan akses dilakukan dengan mengerahkan alat berat.

Bencana ini turut mengganggu sistem jaringan telekomunikasi sehingga memicu keterlambatan pendataan, distribusi, hingga perkembangan informasi di lapangan. BNPB mendatangkan solusi berupa penyediaan alat penyedia jaringan internet Starlink yang sementara ditempatkan di lokasi pengungsian ataupun di posko penanganan darurat.



“Starlink sudah didistribusikan ke pemerintah daerah, baik di titik pengungsian maupun di posko penanganan darurat,” kata Kepala BNPB Suharyanto.

Di Aceh, jalur transportasi juga lumpuh di beberapa titik. Jalur nasional perbatasan Sumut–Aceh terputus akibat longsor. Kerusakan jembatan di Meureudu menyebabkan terhentinya konektivitas Banda Aceh–Lhokseumawe–Aceh Timur–Langsa–Aceh Tamiang.

Sejumlah kabupaten seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah saat ini tidak dapat diakses melalui jalur darat karena kerusakan total di jalan nasional ataupun jembatan. Jalur udara menjadi alternatif utama dengan pemanfaatan Bandara Perintis Gayo Lues dan Bandara Rembele Bener Meriah.

Untuk komunikasi darurat, perangkat Starlink juga sudah dipasang di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Beberapa wilayah lain juga akan mendapat fasilitas serupa.

Adapun di Sumatera Barat, lima jembatan rusak di Padang Pariaman. Longsor terjadi di jalur nasional Bukittinggi–Padang di wilayah Padang Panjang serta jalur provinsi di Kabupaten Agam. Sekitar 200 kendaraan sempat terjebak akibat terputusnya jalan di Kecamatan Ampek Koto.

Cuaca Ekstrem Pengaruh Siklon Tropis

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan, Indonesia saat ini tengah dilanda cuaca ekstrem akibat kombinasi fenomena atmosfer skala global dan regional.



Salah satu faktor utama adalah keberadaan dua sistem cuaca signifikan yang terpantau oleh Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta, yaitu Siklon Tropis KOTO yang berkembang di Laut Sulu dan Bibit Siklon 95B yang muncul di Selat Malaka. Kedua sistem ini diklaim memicu peningkatan curah hujan dan angin kencang khususnya di wilayah Sumatera bagian utara pada 25 November 2025.

Bibit Siklon 95B memicu pembentukan awan konvektif yang meluas dari Aceh hingga Sumatera Utara, sehingga menyebabkan intensitas hujan ekstrem dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, Siklon Tropis KOTO memperkuat hujan lebat di wilayah Indonesia bagian barat melalui mekanisme belokan angin dan penarikan massa udara basah menuju pusat siklon (inflow), yang mendorong pertumbuhan awan hujan secara masif.

Bibit Siklon 95B diperkirakan menyebabkan hujan sedang hingga lebat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera

Barat, dan Riau, serta angin kencang di Aceh dan Sumatera Utara.

Selain itu, sistem cuaca ini turut meningkatkan tinggi gelombang menjadi 1,25–2,5 meter di Selat Malaka bagian utara dan perairan Riau, serta 2,5–4,0 meter di Selat Malaka bagian tengah, perairan timur Sumatera Utara, dan Samudra Hindia bagian barat Aceh hingga Nias.

Di sisi lain, Siklon Tropis KOTO berpotensi menimbulkan hujan sedang hingga lebat di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau.

BMKG mencatat, hujan lebat dengan intensitas 50–100 mm per hari telah ter-

jadi di berbagai wilayah sejak pertengahan November 2025. Bahkan, beberapa daerah seperti Kota Langsa mencatat curah hujan hingga 311 mm, sementara Kabupaten Bireuen mencapai 295,8 mm.

Pada 26 November 2025, BMKG memantau bahwa Bibit Siklon 95B yang sebelumnya berada di kawasan Selat Malaka, tepatnya di bagian timur Aceh, telah berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar pada pukul 07.00 WIB.

Berdasarkan pengamatan terakhir, siklon tersebut bergerak ke arah barat menuju daratan Aceh dengan kecepatan sekitar 10 km per jam. Pergerakan ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan berupa hujan sangat lebat hingga ekstrem yang dapat disertai angin kencang di wilayah sekitarnya.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan kondisi ini meningkatkan suplai air di perairan hangat Selat Malaka yang memicu pertumbuhan awan konvektif di bagian utara Sumatera.

• INFO UTAMA

Per Rabu, 26 November 2025, Siklon Tropis Senyar berpusat di sekitar 5.0° LU dan 98.0° BT dengan tekanan udara minimum di pusat mencapai sekitar 998 hPa dan kecepatan angin maksimum di sekitar sistem mencapai 43 knot atau 80 km per jam. Lalu per Kamis, 27 November 2025, BMKG menyatakan Siklon Tropis Senyar terpantau telah punah.

Kendati demikian, cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi sebagai dampak lanjutan. Oleh karena itu, potensi dampak bencana hidrometeorologi tetap harus diwaspadai terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau,

akibat krisis iklim akan tetapi kerusakan ekologis di buffer zone atau zona penyangga di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh lebih menjadi pemicu utama bencana besar yang terjadi saat ini.

Buffer zone atau zona penyangga adalah area yang berfungsi untuk memisahkan atau melindungi suatu kawasan dari area lain agar meminimalisir dampak bahaya. Zona ini biasanya berupa ruang terbuka hijau yang bisa berupa lahan alami seperti hutan atau rawa, atau sengaja dibuat seperti sunga

Melva mencontohkan kondisi di

menjadi pusat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke wilayah hilir.

Berdasarkan catatan WALHI, wilayah yang terdampak paling parah dalam bencana kali ini adalah kawasan yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli, termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.

"Itu yang pertama, jadiutupan hutannya itu sudah hilang. Satu sisi memang iya bahwa intensitas hujan meningkat. Pola-pola masuk di bulan November dan Desember memang mengalami peningkatan, dan itu dipengaruhi oleh



Riau, Sumatera Barat, dan sekitarnya.

Siklon tropis merupakan badai berkecepatan tinggi yang dimulai dari permukaan laut tropis. Sementara itu, Senyar merupakan siklon yang dapat terjadi di Semenanjung Malaysia, Thailand Selatan, dan Sumatera, Indonesia.

Siklon Tropis Senyar tercipta akibat tekanan atmosfer rendah di Samudera Hindia. Kondisi itu kemudian berkembang menjadi Depresi Tropis untuk kemudian berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar.

Kerusakan Ekologis Jadi Pemicu Utama

Manajer Pencegahan dan Penanganan Bencana, Eksekutif Nasional WALHI, Melva Harahap, menilai rangkaian bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera tidak dapat dilepaskan dari menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan pada kawasan-kawasan penyangga.

Dia menjelaskan, meskipun benar ada faktor intensitas hujan meningkat

Sumatera Utara, di mana sejumlah kabupaten dan kota mengalami bencana cukup parah. Jika dicermati lebih dekat, banyak wilayah tersebut telah mengalami perubahan besar akibat alih fungsi lahan dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu contohnya adalah pengalihan fungsi Hutan Batang Toru, yang selama ini berperan penting sebagai kawasan penyangga sekaligus ruang hidup masyarakat Tapanuli. Menurut Melva, fungsi ekologis hutan ini perlahan hilang akibat berbagai aktivitas perusahaan yang mengantongi izin di kawasan tersebut.

Ekosistem Harangan Tapanuli atau Hutan Batang Toru merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatera Utara. Secara administratif, sebagian besar berada di Tapanuli Utara (66,7 persen), diikuti Tapanuli Selatan (22,6 persen) dan Tapanuli Tengah (10,7 persen).

Sebagai bagian dari Bukit Barisan, hutan ini berperan sebagai sumber air utama, mencegah banjir dan erosi, serta

krisis iklim ataupun situasi iklim saat ini," ujar Melva.

Melva juga menjelaskan, pola hujan sebenarnya dapat diprediksi melalui data BMKG. Peningkatan intensitas hujan yang terjadi saat ini berhubungan erat dengan krisis iklim yang mengubah pola angin serta memperpanjang durasi hujan. Meski demikian, kerusakan ekosistem penyangga adalah faktor yang membuat dampaknya jauh lebih parah

"Batang Toru, misalnya, sejak awal berfungsi sebagai hutan penyangga hidrologis. Lima hingga sepuluh tahun lalu, banjir memang pernah terjadi, tetapi belum pernah menimbulkan kerusakan sebesar sekarang. Kini, dari Aceh hingga Sumatera Barat, tercatat 33 kabupaten/kota terdampak banjir," ujarnya.

Dia menyoroti pula tingginya banjir dan material yang terbawa oleh arus, sebagaimana terlihat dalam berbagai unggahan media sosial. Hal ini menandakan bahwa daerah hulu dan hilir sudah tidak terjaga lagi.

Melva menambahkan, WALHI Su-

matera Utara sebenarnya telah melakukan kajian sebelumnya. Mereka telah memprediksi bahwa jika kawasan penyangga tidak dilindungi, dampaknya akan menjalar hingga ke Mandailing Natal.

"Dan prediksi itu hari ini terbukti: begitu intensitas hujan meningkat, buffer zone hilang, daerah-daerah penyangganya nggak ada, dan kita nggak pernah menyiapkan masyarakat ataupun pemerintah menghadapi bencana sebesar ini," ujarnya.

Melva menegaskan, kondisi alam memang ikut memperberat situasi. Dia menyatakan tidak ada masalah apabila BNPB dan BMKG mengategorikan kejadian ini sebagai bencana alam akibat curah hujan tinggi. Namun, WALHI melihat bahwa ada akumulasi krisis ekologi.

Dia menyinggung ketinggian banjir kali ini bukan lagi sebatas mata kaki atau sepinggang orang dewasa. Banjir telah merusak rumah, memutus akses jalan, dan menghilangkan berbagai hak warga. Hak untuk hidup aman, beraktivitas secara ekonomi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, pergi ke tempat kerja, sekolah, atau rumah sakit, semuanya terganggu dan bahkan terhenti.

"Inilah yang oleh WALHI disebut sebagai bencana ekologis. Ada akumulasi krisis ekologis yang muncul akibat regulasi yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan serta kegagalan sistem dalam mengelola alam. Akibatnya, bukan hanya ekosistem yang runtuh, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung padanya," ujar Melva.



Evaluasi Aktivitas Pertambangan

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi total terhadap aktivitas pertambangan di Sumatera Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bahlil mengatakan evaluasi menyeluruh itu akan dilakukan begitu akses menuju lokasi bencana kembali terbuka.

Menurut Bahlil, pemerintah tidak akan menoleransi perusahaan tambang yang beroperasi tanpa mematuhi standar lingkungan.

"Khusus untuk tambang, setelah ini kita akan evaluasi total. Bagi pertambangan yang tidak memenuhi kaidah sebagaimana disyaratkan aturan, kita akan lakukan evaluasi," ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan proses penataan sektor tambang harus dilakukan serius, terutama karena dampak lingkungan yang ditimbulkan bisa beru-

jung fatal seperti yang kini terjadi.

Bahlil juga menyinggung pengalamannya di masa lalu sebagai pengusaha yang memberi perspektif mengenai pentingnya regulasi yang ketat.

"Dasar pengalaman itulah yang akan saya jadikan rujukan untuk membuat kebijakan dan evaluasi agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi," katanya.

Selain itu, Bahlil menyebut kemENTERIANNYA sudah melakukan koordinasi dengan PLN dan Pertamina untuk memastikan bantuan logistik tetap berjalan meski kondisi cuaca masih buruk. Dia menjelaskan distribusi BBM kini dialihkan melalui jalur laut karena sejumlah jalan nasional putus dihantam longsor.

Untuk suplai listrik, sejumlah peralatan sudah tiba di Medan dan sedang disiapkan untuk dikirim menggunakan helikopter menuju titik-titik yang paling terdampak. ●

JANGAN NODAI INGATAN BANGSA

Setiap bangsa hidup dari ingatannya. Kedewasaan moral bangsa tercermin dari cara mengenang para pejuang dan memperlakukan masa lalunya.

Ingatan kolektif tentang siapa yang berjuang, yang menindas, dan yang berkorban menjadi fondasi moral untuk melangkah ke depan. Maka wacana untuk mengangkat tokoh masa lampau yang meninggalkan jejak otoritarianisme atau pembungkaman kritik pasti menimbulkan kontroversi.

Dalam perbantahan itu, sebetulnya yang sedang diuji bukan hanya tokoh tersebut, melainkan nurani bangsa, bukan sekadar perdebatan sejarah, melainkan ujian moral bangsa.

Ingatan kolektif bukan arsip yang membeku di museum sejarah, melainkan kesadaran hidup yang menuntun arah moral setiap generasi. Ingatan kolektif membentuk arena moral di hati korban, keluarga, dan masyarakat.

Ketika negara menulis ulang kenangan dengan tinta kekuasaan, sejarah kehilangan nuraninya (Halbwachs, 1997). Ketika kita mengaburkan batas antara pengabdian dan penindasan, bangsa kehilangan cermin untuk menilai dirinya sendiri.

Mereka yang pernah menjadi korban kekerasan politik atau penghilangan hak asasi masih menyimpan luka yang belum kering. Bagi korban dan keluarganya, luka itu masih belum kering.

Mengangkat tokoh masa lalu yang dianggap otoriter sebagai pahlawan hanya akan membuka kembali luka itu.

Memberi penghormatan tanpa menimbang luka itu sama dengan menaburkan garam di atas penderitaan yang belum sembuh.

Bangsa yang bijak bukan bangsa yang melupakan masa lalu, tetapi yang berani menghadapinya dengan jujur, bukan dendam, tetapi memilih keadilan sebagai jalan penyembuhan.

Bagaimana mungkin kita menuntut generasi muda mencintai kebenaran bila negara sendiri menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan penguasanya?

Maka ingatan kolektif membantu mengoreksi sikap negara

OLEH: HARYATMOKO
PEGIAT ETIKA PUBLIK DAN ANGGOTA AIPI,
KOMISI KEBUDAYAAN

yang mengabaikan masalah kebenaran dan masih mengulangi lagi demi jalan pintas legitimasi.

Menghidupkan ingatan kolektif berarti bersama membangun

proyek perdamaian dan tidak mengulangi kekeliruan masa lalu yang tragis. Ingatan kolektif bukan untuk balas dendam, tetapi upaya klarifikasi hukum dan sejarah untuk mencari keadilan. Dengan demikian sejarah orang yang kalah, sejarah korban diberi tempat.

Bagaimana proses hukum bisa digunakan secara efektif untuk merangsang pencarian spiritual suatu bangsa? Bagaimana, melalui dramatisasi para jaksa dan hakim, masyarakat didorong untuk kritis terhadap budaya politik dan lembaga-lembaganya?

Jawaban atas kedua pertanyaan itu terletak pada kredibilitas

peradilan. Kredibilitas peradilan tergantung pada kemampuannya mengisahkan sejarah bangsa dalam bingkai ingatan kolektif.

Pengisahan itu mengandung dilema, dari sisi politik, narasi dibatasi oleh kerangka hukum format: fakta hukum, bukti, kesaksian, kronologi kejadian, pasal hukum yang dilanggar. Tujuannya kepastian hukum. Masalahnya, jika orientasi penguasanya legalisme otokratis, hukum hanya dijadikan instrumen kekuasaan. Korban kalah dan diabaikan.

Dari sisi moral, peristiwa hukum dilihat dari makna tindakan, konteks sosial, dan motif kemanusiaan: penderitaan korban dan dilema moral pelaku. Tujuannya adalah pemulihan keadilan manusiawi (Ricoeur, 2000).

Memang narasi moral membahayakan rezim yang berkuasa: banyak pihak akan diseret karena keterlibatan mereka di masa lalu. Namun,

kebanyakan pelaku masih dalam lingkaran kekuasaan, tentu akan mencegah proses hukum.

Tragisnya, kredibilitas peradilan sulit diperoleh karena proses hukum tidak pernah ada dan dicegah berlangsung. Kesaksian korban tidak bisa dikonfrontasikan dengan para pelaku dan arsitek kejahatan HAM.

Ti adanya konfrontasi ini tidak memungkinkan pengakuan hukum terhadap korban sebagai korban. Korban justru mengalami viktimisasi kedua, dan pelaku menikmati impunitas, bahkan



diusulkan menjadi pahlawan.

Ti adanya narasi moral itu memendam bahaya akan berulangnya skenario kekerasan dengan pola serupa di masa depan.

Martabat sejarah tercermin dari penulisannya berstandar ilmiah: sumber relevan, otentik, dan terpercaya. Sumber sejarah mengacu ke dokumen tertulis, arsip, surat kabar, artefak, wawancara, dan sumber lisan. Lalu keaslian sumber dan kredibilitas isi sumber diuji.

Untuk membangun kebenaran sejarah tidak bisa sumber-sumber itu diseleksi hanya dari perspektif kepentingan penguasa.

Fakta sejarah belum dengan sendirinya berbicara, tetapi perlu sejarawan untuk menghubungkan sebab, akibat, dan konteksnya. Namun, bahayanya ketika sejarawan mengabaikan fakta yang terkait kekejaman masa lalu dan tidak peduli terhadap fakta yang digali dari arsip, berita, artefak yang berkisah tentang korban, atau wawancara korban.

Dampaknya, rekonsiliasi dicabut dari akar sejarah yang jujur, bahkan memberi tempat kepada alibi penyangkalan kejahatan masa lalu yang menggores luka lama.

Menagih Masa Lalu

Ingatan individual lenyap bersama dengan kematian seseorang. Ingatan kolektif tetap hidup meskipun orang-orangnya sudah meninggal.

Tindakan seseorang, terutama yang memegang tanggung jawab publik, tidak berakhir setelah dilakukan. Tindakannya meninggalkan inskripsi sosial, tanda yang tertanam dalam jaringan makna bersama.

Inskripsi menjadi ingatan kolektif, tempat di mana pelaku, korban dan makna tindakan membentuk sejarah untuk menegosiasikan arti keadilan.

Ketika penguasa ingin menghapus jejak-jejak kekerasan dan kejahatannya, "politik ingatan" itu hanya meninggalkan ingatan semu, ingatan resmi yang terpateri di spanduk dan upacara, tetapi mati di hati rakyat. Lalu politik hanya menjadi "budaya simbolik tanpa substansi moral" atau menurut Bernhard & Kubik disebut hollow memory politics (2014).

Ingatan kolektif bukan sekadar sejarah, tetapi ingatan yang menagih agar kejahatan masa lalu diselesaikan secara adil (Ricoeur, 2000). Karena itu, ingatan kolektif mempertanyakan impunitas karena mencederai rasa keadilan.

Ingatan kolektif menolak rehabilitasi sebelum proses rekonsiliasi yang adil dilakukan. Rekonsiliasi nasional tidak bisa dibangun di atas penyangkalan. Membangun infrastruktur rekonsiliasi berarti menjamin keadilan bagi korban, pengakuan terhadap kebenaran, dan kejujuran sejarah.

Kepahlawanan dan Bahaya Lupa

Kepahlawanan bukan kemampuan merekayasa dukungan

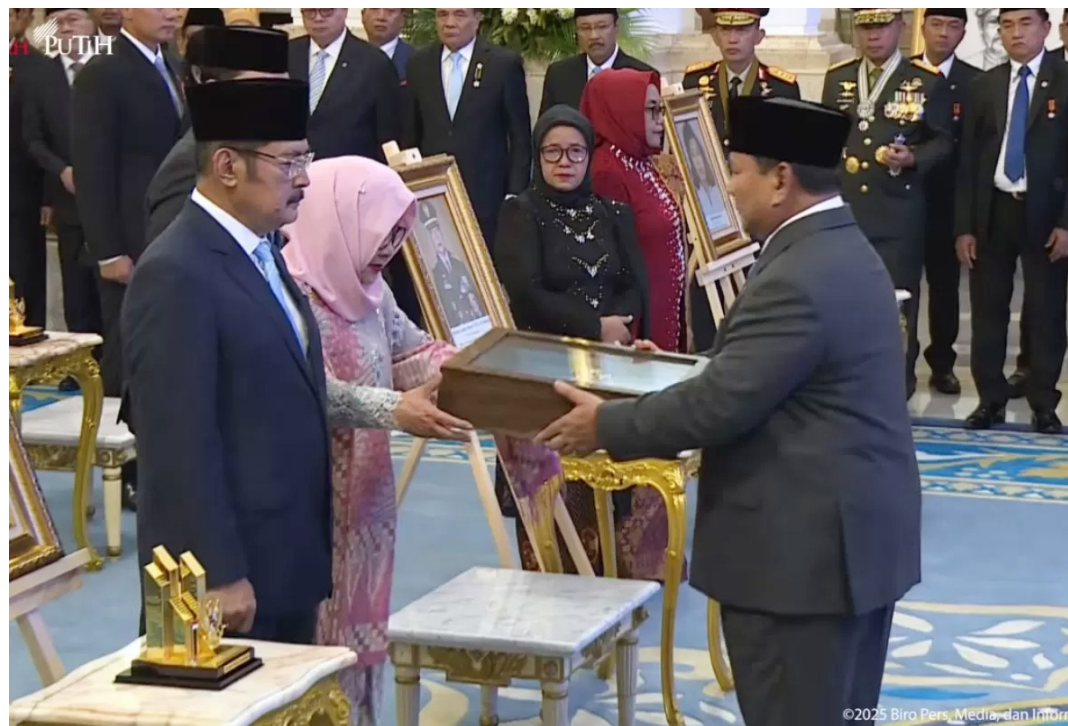
rakyat untuk panjangnya kekuasaan, melainkan integritas dan kejujuran. Kualifikasi pahlawan melekat pada integritas: tindakannya menumbuhkan harapan dan semangat solidaritas, sumber keteladanan dan inspirasi moral.

Maka, bayang-bayang ketakutan yang melingkupi era rezim represif masa lalu seharusnya sudah cukup untuk mendiskualifikasi pemimpin dari status pahlawan. Pembiaran pelanggaran HAM atas nama stabilitas melegitimasi politik rekayasa polarisasi masyarakat demi memudahkan kontrol.

Seorang yang berjiwa pahlawan seharusnya memiliki keberanian moral untuk mengoreksi kebijakannya dengan melakukan pertobatan sejarah: berani mengungkapkan kebenaran sejarah, menawarkan rekonsiliasi dan merehabilitasi korban. Yang dilakukan justru sebaliknya, meninggalkan jejak sejarah hitam: membatasi kebebasan, membungkam kritik, memenjarakan tanpa proses peradilan.

Jejak sejarah ini bertentangan prinsip moral, dasar kepahlawanan itu sendiri. Maka, Reformasi 1998 muncul sebagai koreksi moral atas arogansi rezim represif. Bukankah mengusung pemimpin yang ditumbangkan Reformasi itu mengkhianati semangat Reformasi itu sendiri?

Orang lupa akan air mata dan darah para pejuang Reformasi.



Lupa adalah bentuk pengkhianatan terhadap mereka yang menderita.

Sebelum kita mengangkat siapa pun sebagai pahlawan, ada baiknya kita bertanya lebih dulu kepada nurani kita: Apakah bangsa ini sudah siap melupakan air mata mereka yang tertindas demi pembangunan semu? Apakah sejarah boleh dipoles demi citra, sementara luka belum disembuhkan?

Jika jawabannya tidak, biarlah ingatan kolektif bangsa tetap menjadi penjaga moralnya. Sebab, bangsa tanpa ingatan kolektif, tidak berdaya menagih kebenaran masa lalu, sehingga akan mudah jatuh lagi ke dalam tangan besi penguasa. ●



PELABUHAN TANJUNG CARAT JADI PENENTU MASA DEPAN KEK TANJUNG API-API

Pelabuhan Tanjung Carat tengah diwujudkan sebagai gerbang ekonomi Sumatera Selatan dan masuk daftar pertama program strategis Pemerintahan Herman Deru dan Cik Ujang.

Untuk itu Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa kunci kesuksesan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api terletak pada kehadiran Pelabuhan Internasional Tanjung Carat. Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung kawasan tersebut bersama Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang.

Kunjungan ini sekaligus menjadi evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan KEK

tambah yang diharapkan dari KEK. Ia meminta seluruh pihak terus mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

"Kalau pelabuhan jauh dari KEK ini, maka manfaatnya akan kurang maksimal. Karena itu, kita bersama-sama terus berjuang agar pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat bisa segera terwujud," ujar Herman Deru dalam kunjungan tersebut.

agenda ke fasilitas pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Fasilitas ini merupakan bagian penting dalam memastikan keberlanjutan industri di KEK.

Herman Deru menyampaikan bahwa fasilitas pengelolaan limbah tersebut telah beroperasi dan mampu melayani rumah sakit maupun perusahaan yang menghasilkan limbah berbahaya. Hal ini menunjukkan kesiapan infrastruktur



TAA yang digadang-gadang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumsel. Gubernur menekankan bahwa percepatan pembangunan pelabuhan harus menjadi prioritas utama agar kegiatan industri dapat berjalan optimal.

Menurut Herman Deru, pelabuhan yang terletak jauh dari kawasan industri akan mengurangi efektivitas dan nilai

la menyebut bahwa KEK Tanjung Api-Api dirancang sebagai zona industri yang memiliki potensi ekspor tinggi. Dengan demikian, kehadiran pelabuhan modern yang berdekatan dengan kawasan industri menjadi syarat mutlak agar arus logistik dapat berjalan efisien.

Usai meninjau kawasan inti KEK, Gubernur dan Wakil Gubernur melanjutkan

pendukung di sekitar kawasan.

Menurutnya, Pemprov Sumsel melalui BUMD terkait kini telah memiliki kapasitas untuk mengelola limbah B3 secara mandiri. Pengelolaan ini dilakukan sesuai ketentuan sehingga tidak lagi perlu mengirim limbah keluar daerah.

"Sekarang limbah B3 dari rumah sakit atau perusahaan tidak perlu lagi dikirim

ke luar daerah. Kita sudah siap mengolahnya secara aman," jelas Gubernur.

Dengan dukungan infrastruktur pelabuhan, kesiapan kawasan industri, serta fasilitas pendukung lingkungan, pemerintah menargetkan KEK Tanjung Api-Api dapat segera beroperasi maksimal. Kawasan ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru yang memberi manfaat besar bagi masyarakat Sumsel.

Groundbreaking Akses Simpang TAA-TPI Sungsang

Upaya memperkuat konektivitas wilayah timur Sumatera Selatan memasuki babak baru dengan dimulainya groundbreaking pembangunan jalan akses Simpang Tanjung Api-Api menuju Simpang TPI Sungsang

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan akses jalan ini merupakan bagian penting dari rencana besar pengembangan kawasan Pelabuhan Internasional Tanjung Carat. Kawasan Tanjung Api-Api, menurut Gubernur, telah lama menjadi pusat perhatian pembangunan strategis sejak 40 tahun lalu.

Herman Deru mengapresiasi peran para pemimpin sebelumnya yang telah membuka jalan bagi kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Ia mengatakan bahwa kerja generasi hari ini adalah melanjutkan jejak pendahulu agar target pembangunan tidak berhenti di tengah jalan.

"Spirit dari tempat ini sangat luar biasa. Pembangunan pelabuhan ini bukan pekerjaan satu periode, tetapi lintas generasi," tegasnya.

Gubernur juga menyoroti besarnya potensi ekonomi Sumsel apabila akses logistik diperkuat. Dengan pertumbuhan ekonomi sudah di atas 5 persen tanpa pelabuhan internasional, ia optimistis sektor ekspor Sumsel akan berkembang pesat jika Pelabuhan Tanjung Carat mulai beroperasi.

Hal ini akan memberikan keuntungan besar bagi sektor perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Untuk itu, ia mendorong agar seluruh pihak bekerja tanpa kehilangan fokus.

Dukungan pemerintah pusat juga semakin kuat. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Jalan Nasional telah memulai peningkatan akses jalan, termasuk pembangunan jembatan panjang 1 kilo-

meter. Kepala Balai Besar, Panji Krisna Wardana, menyebut hal ini sebagai bukti bahwa pemerintah pusat serius mendukung percepatan pembangunan kawasan Tanjung Carat.

Dinas PUBMTR Sumsel juga telah merampungkan seluruh readiness criteria, termasuk FS, DED, dan Amdal. Dua ruas prioritas yang akan dibangun adalah ruas Simpang Tanjung Api-Api-Sungsang sepanjang 3,6 km dan ruas Sungsang-Mozaik 6 sepanjang 5,5 km

Proyek ini diproyeksikan memperkuat konektivitas menuju kawasan pesisir, mempermudah akses masyarakat, serta meningkatkan efisiensi distribusi hasil perikanan dan perkebunan. Keberadaan jalan ini juga mendukung pembangunan pabrik bioavtur di Banyuasin yang menjadi inovasi energi baru terbarukan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Banyuasin H. Askolani menambahkan bahwa masyarakat Banyuasin sangat menyambut baik pembangunan akses



lengkap dengan sepuluh jembatan.

Pekerjaan fisik ruas pertama telah dimulai November 2025 dengan anggaran Rp 33,29 miliar melalui skema Inpres Jalan Daerah. Ruas ini menggunakan perkerasan berkualitas tinggi seperti AC-WC, AC-BC, serta mortar busa berdaya dukung tinggi untuk memastikan ketahanan badan jalan terhadap beban logistik.

jalan ini. Menurutnya, perhatian besar dari Pemprov Sumsel dan Pemerintah Pusat menjadi wujud nyata upaya mempercepat pembangunan daerah.

Askolani berharap peningkatan akses jalan ini menjadi titik awal perubahan lebih besar di wilayahnya.

"Ini sangat berarti bagi kami. Infrastruktur berkualitas adalah harapan masyarakat pesisir," ujarnya. ●

OPTIMISTIS JADI PROVINSI TERCEPAT REALISASIKAN PROGRAM 3 JUTA RUMAH

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, optimis Sumsel dapat menjadi provinsi tercepat dalam merealisasikan target program 3 juta rumah. Untuk mencapai target itu, kunci utamanya adalah data yang valid, koordinasi lintas sektor, serta perizinan yang transparan.

Menurutnya, tanpa basis data yang kuat, pembangunan rumah rawan salah sasaran. Karena itu, Pemprov Sumsel berkomitmen untuk mempercepat penyusunan database rumah layak huni dan legalitas bangunan di seluruh kabupaten/kota.

"Saya ingin semua pihak di daerah bersinergi. Sebelum bicara pembiayaan, kita pastikan dulu data rumah yang sudah berizin dan belum. Dengan begitu, arah kebijakan pembangunan menjadi lebih jelas," ungkapnya saat menerima audiensi Komisioner BP Tapera, Doddy Bursman, di Palembang.

Herman Deru menambahkan, Sumsel akan menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah sebagai panduan kerja daerah.

"Kita ingin bergerak cepat tapi tetap taat aturan," ujarnya.

Selain urusan teknis, Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat. Ia menilai, kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan berpengaruh terhadap kelancaran pembiayaan rumah.

Herman Deru menyatakan bahwa dengan kolaborasi erat antara BP Tapera, OJK, dan pemerintah daerah, Sumsel siap menjadi provinsi pelopor dalam mempercepat penyediaan rumah layak

bagi masyarakat. "Target nasional bisa tercapai jika kita kerja kompak dan berorientasi pada data," ujarnya.

Sementara Duta Literasi Sumsel, dr. Hj. Ratu Tenny Leriva Herman Deru, yang turut hadir, menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman finansial masyarakat.

"Kita tidak hanya meningkatkan akses,

dapatkan edukasi langsung mengenai pengelolaan dana dan investasi aman.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya mendorong generasi muda melalui program "Sultan Muda" agar memiliki kemampuan berwirausaha dan memanfaatkan teknologi keuangan digital.

Komisioner BP Tapera, Doddy Bursman, dalam kesempatan itu menuturkan bahwa Sumsel termasuk daerah yang



DUKUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM 3 (TIGA) JUTA RUMAH

Perkada PBG & BPHTB pada 17 Kab/Kota.



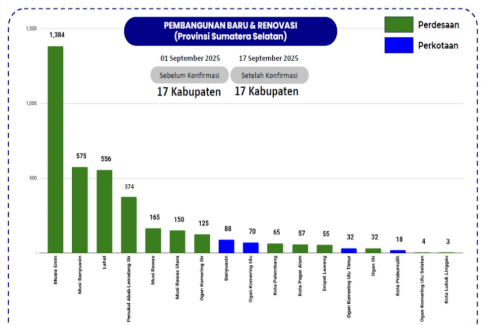
Secara Administrasi 100% Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Telah Mengeluarkan Kebijakan Pembebasan Bea PBG dan BPHTB atas Tindak Lanjut SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PUPR).

KENDALA

1. KABUPATEN/KOTA MASIH ADA YANG BELUM MELAKSANAKAN PENDATAAN PEMBANGUNAN BARU DAN RENOVASI
2. MININYA ANGGARAN KABUPATEN KOTA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN RENOVASI RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDAHASILAN RENDAH (MBR).
3. 6 (ENAM) KABUPATEN/KOTA (KAB. BANYUASIN, KAB. LAHAT, KAB. OKI, KAB. PALI, KOTA PALEMBANG, DAN KOTA PALEMBANG) YANG BARU MENGMPLEMENTASIKAN PEMBEBASAN PBG/0 RUPAH BAGI MBR
4. KESULITAN DALAM PENYEDIAAN RUMAH BAGI MBR PEKAWAI INFORMAL

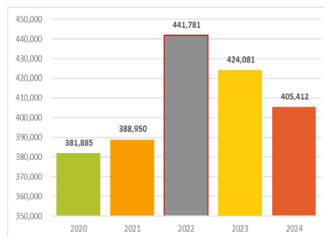
TINDAK LANJUT

1. PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN INFORMASI TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN BARU ATAU RENOVASI RUMAH BAGI MASYARAKAT BERUPA BANTUAN YANG SUMBER PEMBIAYAANNYA BAIK DARI APBD ATAU PUN APBN YANG TIDAK MUNCUL SEBAGAI TARGET UNIT PADA DOKUMEN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAERAH (SIPD).
2. MENGMPLEMENTASIKAN PEMBEBASAN BEA PBG DAN BPHTB BAGI MBR
3. MENDORONG DESA UNTUK MENGALOKASIKAN ANGGARAN RENOVASI RTLH DALAM APBD
4. MENGALOKASIKAN ANGGARAN RENOVASI RTLH BAGI DAERAH YANG BELUM MENGALOKASIKANNYA DALAM APBD



PROGRAM 3 JUTA RUMAH

BACKLOG PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 - 2024



JUMLAH BACKLOG	
Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunan
405,412	148,609

REKAPITULASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN DTSEN (DATA TERPADU SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL)

No	Provinsi	Kab/Kota	RTLH Pengecekan DT-SEN	Eligible	Not Eligible	Kesepakatan Jumlah RTLH
1	Sumatera Selatan	Palembang	3.067	1.238	1.829	3.067
2		Prabumulih	245	83	162	245
3		Pagaralam	1.295	653	642	1.295
4		Lubuklinggau	734	287	447	734
5		Banyuwangi	23.111	11.577	11.534	23.111
6		Musi Banyuwangi	25.313	8.436	16.877	25.313
7		Musi Rawas	8.678	3.153	5.525	8.678
8		Musi Rawas Utara	2.797	888	1.909	2.797
9		Empat Lawang	5.097	1.589	3.508	5.097
10		Lahat	7.009	3.250	3.759	7.009
11		Muara Enim	9.179	1.618	7.561	9.179
12		PAU	6.834	1.733	5.101	6.834
13		Ogan Ilir	26.413	12.778	13.635	26.413
14		OKU Selatan	18.059	4.739	13.320	18.059
15		OKU Timur	4.164	821	3.343	4.164
16		OKI	5.569	2.410	3.159	5.569
17		OKU	1.045	528	517	1.045
Total Prov. Sumatera Selatan			148.609	55.781	92.828	148.609

Untuk Penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2024 sebanyak 7.165 Unit, Total penanganan RTLH dari Tahun 2018 – 2024 tersebar di Kabupaten/Kota sebanyak 43.910 Unit.

tapi juga pemahaman agar masyarakat mampu mengelola uang secara bijak," katanya.

Ratu menjelaskan bahwa sejak 2020 dirinya berkolaborasi dengan OJK untuk menjalankan program literasi keuangan door to door, sehingga masyarakat men-

memiliki potensi besar dalam mendukung program nasional ini.

"Kami mengapresiasi komitmen Pak Gubernur dalam membangun ekosistem perumahan yang terintegrasi," ujarnya.

Doddy menjelaskan, BP Tapera diben-

tuk untuk menghimpun dana jangka panjang dari ASN, pegawai swasta, dan masyarakat umum, kemudian menyulurnya dalam bentuk pembiayaan rumah murah.

Bentuk Tim Percepatan Program 3 Juta Rumah

Sementara untuk menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto, Pemprov Sumsel membentuk tim percepatan pelaksanaan program di tingkat provinsi.

ga dengan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan masyarakat melalui program 3 juta rumah. Ini langkah strategis dan harus segera kita realisasikan di Sumsel,” ujar Herman Deru.

Lebih lanjut, Gubernur menginstruksikan pembentukan tim percepatan di tingkat provinsi untuk mengawal pelaksanaan program tersebut. Tim ini akan bertugas mengkoordinasikan lintas instansi dan pengembang agar proses pembangunan berjalan sesuai rencana.

“Hari ini kita berkomitmen untuk bekerja bersama secara terencana dan tera-

wasan Permukiman (Perkim) Sumsel, Ir. H. Novian Aswardani, mengungkapkan bahwa Gubernur memberikan banyak arahan penting kepada para pengembang. Salah satunya mengenai penyelesaian kendala lapangan dan percepatan perizinan.

“Pak Gubernur ingin setiap hambatan segera diatasi, baik yang berasal dari sisi pemerintah maupun pengembang. Beliau menekankan pentingnya tim percepatan agar setiap progres dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” jelas Novian.

Program ini juga diharapkan menjadi



Untuk membentuk tim percepatan ini Gubernur Herman Deru menggandeng pelaku usaha perumahan dan para pemangku kepentingan terkait untuk bersinergi antara pemerintah dan sektor swasta.

Menurutnya, penyediaan hunian layak merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Program 3 juta rumah bukan hanya target pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Saya sangat mendukung dan bang-

rah agar percepatan pencapaian 3 juta rumah benar-benar dapat terwujud di Sumatera Selatan,” tambahnya.

Herman Deru menegaskan, Sumsel akan menjadi salah satu provinsi yang aktif dalam mendukung target nasional ini. Ia juga mendorong agar daerah-daerah di kabupaten/kota ikut bersinergi dalam pelaksanaannya.

“Dengan kerja bersama, kita bisa memastikan masyarakat Sumsel memiliki rumah layak huni dan kehidupan yang lebih sejahtera,” tegasnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Ka-

pendorong pertumbuhan sektor properti di Sumsel, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap ekonomi daerah. Selain menekan angka backlog perumahan, pembangunan rumah rakyat juga membuka peluang kerja dan usaha baru.

Pemerintah Provinsi Sumsel optimistis, melalui koordinasi yang kuat dan langkah nyata di lapangan, target penurunan backlog perumahan dapat dicapai. Program 3 juta rumah pun diharapkan menjadi tonggak kemajuan sektor perumahan di Bumi Sriwijaya. ●



Luncurkan 200 Calendar of Event

WUJUDKAN WISATA SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DAERAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi meluncurkan 200 Calendar of Event yang berasal dari 17 kabupaten/kota. Peluncuran ini dirangkaikan dengan Anugerah Pesona Desa Wisata Sumsel 2025. Program desa wisata ini memiliki peran strategis sebagai lokomotif ekonomi kreatif di daerah.

Gubernur Herman Deru mengapresiasi desa-desa yang berhasil menampilkan inovasi melalui berbagai kategori lomba seperti homestay, souvenir, dan kelembagaan desa. Menurutnya, kreativitas masyarakat menjadi modal utama pengembangan sektor pariwisata.

Herman Deru menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus memberikan dukungan kepada desa wisata agar mampu bersaing dengan destinasi lain secara nasional. Penghargaan yang diberikan diharapkan menjadi motivasi untuk terus tumbuh dan berdaya.

Gubernur mencontohkan event Sriwijaya Ranau Gran Fondo (SRGF) yang menurutnya memberikan dampak

ekonomi signifikan bagi masyarakat daerah. Model integrasi wisata alam dan kegiatan sport tourism ini dinilai dapat diterapkan pada desa-desa lain.

Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam saja tidak cukup jika tidak didukung oleh upaya pengembangan yang berkelanjutan. Desa yang berhasil meraih penghargaan diminta agar tidak berpuas diri.

"Setelah terkenal, tantangan sesungguhnya adalah mempertahankannya. Itu hanya bisa dilakukan jika inovasi terus berjalan," tegasnya.

Peluncuran 200 Calendar of Event tahun 2025 disebut sebagai langkah strategis untuk memperluas promosi wisata Sumsel. Event-event unggulan seperti Festival Sriwijaya, Sriwijaya Ranau Gran Fondo, dan Dempo Run

menjadi bagian dari rangkaian agenda besar tahun depan.

SRGF 2025 Jadi Penggerak Ekonomi Danau Ranau

Salah satu pengembangan wisata daerah berhasil adalah Sriwijaya Ranau Gran Fondo (SRGF) 2025 kembali menorehkan catatan positif. Event bersepeda bertaraf internasional itu berlangsung sukses dan menjadi magnet wisata baru bagi kawasan Danau Ranau.

Herman Deru menuturkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan SRGF 2025 tidak hanya dinilai dari kemeriahannya, tetapi juga dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Selama event berlangsung, kawasan Danau Ranau dipadati wisatawan,

pelaku usaha, hingga peserta dari berbagai daerah.

"Kita bersyukur karena agenda besar ini berjalan tanpa hambatan. Semua merasakan manfaatnya, baik dari sisi ekonomi maupun peningkatan promosi wisata," kata Herman Deru.

Ia menekankan bahwa sinergi masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat TNI-Polri berperan besar dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan pengunjung adalah faktor utama yang membuat SRGF semakin dipercaya sebagai agenda besar tahunan.

Gubernur juga memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha lokal yang turut mendukung kelancaran kegiatan. Mulai dari pedagang makanan, pemilik homestay, hingga pengelola hotel, seluruhnya terlibat menyediakan layanan terbaik bagi para wisatawan dan peserta.

"Terima kasih kepada masyarakat OKU Selatan dan seluruh pelaku usaha yang menyambut para tamu dengan antusias. Kehadiran Anda semua membuat para pengunjung merasa dihargai," ucapnya.

Ia berharap kegiatan serupa bisa terus dikembangkan dengan menambah ragam kompetisi, khususnya yang berkaitan dengan olahraga air. Potensi Danau Ranau, menurutnya, sangat memungkinkan untuk menjadi pusat wisata olahraga (sport tourism).

SRGF 2025 resmi ditutup dengan penuh semangat dan harapan agar penyelenggaraan tahun berikutnya berlangsung lebih besar dan memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat OKU Selatan. Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen terus mendukung setiap langkah pengembangan pariwisata daerah.

Tekankan Pelestarian Warisan Peradaban

Dukungan juga diberikan pada penyelenggaraan Festival Candi Bumi Ayu sebagai upaya pentingnya menjaga kelestarian warisan budaya.

Menurut Herman Deru, festival ini menunjukkan kuatnya komitmen masyarakat PALI dalam menjaga dan mengembangkan situs bersejarah Candi Bumi Ayu. Ia menyebut festival tersebut sebagai bentuk penghargaan

terhadap budaya leluhur yang harus terus diwariskan.

"Saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan festival ini. PALI memiliki aset budaya yang luar biasa, dan masyarakat telah menunjukkan rasa memilikinya," ujar Gubernur.

Ia berharap festival menjadi momentum memperkuat kecintaan generasi

akukan kajian lebih mendalam.

Ia juga menyarankan agar festival ini ditetapkan sebagai agenda tahunan untuk memperkuat identitas PALI sebagai daerah yang kaya nilai budaya. Penyelenggaraan rutin dapat mendukung sektor pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



muda terhadap sejarah daerah.

Dalam pandangannya, Candi Bumi Ayu merupakan simbol toleransi dan peradaban yang lahir pada abad ke-8. Karena itu, pelestarian budaya melalui festival adalah langkah penting untuk menyampaikan pesan sejarah kepada masyarakat modern.

Gubernur menyebut bahwa penyelenggaraan festival akan meningkatkan perhatian publik terhadap Candi Bumi Ayu. Menurutnya, hal ini dapat menarik perhatian para arkeolog, peneliti, dan pecinta budaya untuk mel-

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Sumsel tengah menggalakkan program 100.000 Sultan Muda. Program ini berorientasi pada pengembangan kewirausahaan generasi muda agar lebih mandiri dan mampu menciptakan peluang kerja.

Sementara itu, Bupati PALI Asgianto menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru dan TP PKK Sumsel atas dukungan yang diberikan. Ia memastikan bahwa festival akan dijadikan agenda tahunan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. ●

MEMBANGUN DARI TITIK NOL PERTAHANKAN SEJARAH DAN BUDAYA

Sebagai wajah dari Sumatera Selatan, Kota Palembang terus berbenah dan merevitalisasi beberapa infrastruktur yang sudah ada, termasuk Titik Nol dan Benteng Kuto Besak (BKB). Gubernur Herman Deru berharap Palembang kembali meneguhkan diri sebagai kota sejarah yang maju, indah, dan ramah bagi semua.

Patut diakui, dalam dua dekade ini tidak ada revitalisasi pembangunan di Kota Palembang. Beberapa infrastruktur ikonik seperti BKB, Bundaran Air Mancur serta Titik Nol perlu dukungan revitalisasi.

Untuk mendukung pembangunan tersebut, Gubernur Herman Deru melakukan peninjauan langsung terhadap rencana revitalisasi Benteng Kuto Besak (BKB) dan Tugu Air Mancur Titik Nol Palembang. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan pentingnya percepatan penataan karena BKB telah terlalu lama tidak tersentuh rehabilitasi menyeluruh.

Untuk itu pihaknya akan membantu pendanaan melalui program Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Gubernur Sumsel.

Herman Deru mengungkapkan bahwa pelataran BKB merupakan pusat kehidupan warga Palembang. Berbagai kegiatan mulai dari olahraga, acara keagamaan, hingga festival budaya berlangsung di kawasan tersebut. Namun kondisi fisik yang tidak mendukung membuat daya tarik BKB menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, sebagai ikon utama kota, BKB harus tampil representatif dan mampu memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat maupun wisatawan. Ia menyambut baik langkah Wali Kota Palembang yang menginisiasi revitalisasi secara komprehensif.

Revitalisasi tersebut mencakup perbaikan struktur pelataran, penataan ulang kawasan, serta peningkatan fasilitas umum. Herman Deru menilai pembaruan ini vital agar BKB kembali berfungsi optimal sebagai

ruang terbuka publik.

Dalam peninjauan yang sama, Gubernur juga menyoroti revitalisasi Tugu Air Mancur Titik Nol. Ia menye-

menjadi ikon modern dengan ornamen khas budaya Palembang. Herman Deru berharap revitalisasi dua ikon kota ini dapat menjadi peman-



but kawasan tersebut memiliki nilai simbolis tinggi sebagai pusat orientasi Kota Palembang. Namun selama ini keberadaannya kurang ditonjolkan sehingga tidak dikenal luas sebagai titik nol kota.

Melalui kolaborasi bersama Pemkot, tugu air mancur akan disulap

menjadi ikon modern dengan ornamen khas budaya Palembang. Herman Deru berharap revitalisasi dua ikon kota ini dapat menjadi peman-

menjadi ikon modern dengan ornamen khas budaya Palembang. Herman Deru berharap revitalisasi dua ikon kota ini dapat menjadi peman-

mud Badaruddin II di area Kesdam II Sriwijaya yang didukung CSR Bank Indonesia.

Bangunan miniatur tersebut akan menjadi sarana edukasi sejarah dan dihubungkan dengan Lawang Borotan melalui jalur akses baru. Dengan demikian, pengunjung dapat menikmati pengalaman wisata yang lebih terintegrasi.

Ratu Dewa juga memastikan fasilitas umum seperti toilet dan pedestrian akan ditingkatkan secara signifikan. Pengecatan ulang dan estetika kawasan turut menjadi fokus proyek revitalisasi.

Dalam kesempatan itu, Walikota meminta dukungan Gubernur terkait pembukaan Tower Jembatan Ampera. Banyak masyarakat berharap ikon tersebut kembali bisa dikunjungi seperti masa lalu.

Menanggapi hal tersebut, Herman Deru langsung menghubungi Kepala BBPJN Sumsel untuk menyampaikan permohonan dan membahas opsi terbaik. Ia memastikan pemerintah provinsi akan terus mengawal setiap aspirasi masyarakat demi menghadirkan destinasi publik yang membanggakan.

Dengan adanya revitalisasi Titik Nol dan BKB, Gubernur berharap Palembang kembali meneguhkan diri sebagai kota sejarah yang maju, indah, dan ramah bagi semua.

Libatkan Budayawan

Dalam revitalisasi ini Pemkot Palembang melibatkan para budayawan yang paham tentang sejarah Benteng Kuto Besak dan lainnya. Hal ini mendapat dukungan penuh dari Herman Deru. Menurutnya, originalitas dan nilai sejarah kawasan harus dijaga karena merupakan cagar budaya yang dibangun oleh Sultan Palembang.

Herman Deru bahkan berencana menyiapkan duplikasi Rumah Sultan Mahmud Badarudin II di dekat RS AK Gani untuk memperkuat nilai sejarah kawasan tersebut.

"Kita respon apa yang disampaikan budayawan. Usulan-usulan budayawan ini akan menjadi catatan bagi kita. Ada yang bisa kita eksekusi langsung, ada yang harus menunggu karena berkaitan dengan masa

pemakaian. Jadi harus ada tahapannya dan mengenai pengelolaan aset yang bukan milik Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang tentu karena ini barang milik negara ada BMN istilahnya, ada tata caranya," katanya.

"Untuk rumah Sultan Mahmud Badaruddin II kita buat duplikasinya dekat rumah sakit, bahwa disitu Sultan Mahmud Badaruddin II sebelum diasingkan ke Ternate rumahnya disini," katanya,

Walikota Palembang Ratu Dewa menambahkan revitalisasi BKB ini adalah konstruksi awal dan ada tahap kedua di tahun 2026.

"Sesuai arahan pak Gubernur, ini ada budayawan, sejarawan dan seniman. Jadi di ujung dalam Kesdam II nanti atas bantuan pak Gubernur akan dibuat miniatur rumah Sultan Mahmud Badarudin II nanti keluarganya di Lawang Borotan. Setelah itu

Sultan dibawa ke Ternate," katanya.

Terkait masukan budayawan, sejarawan Palembang terkait kawasan Nusa Indah di areal Benteng Kuto Besak yang masuk aset Pemprov Sumsel pihaknya meminta bantuan Gubernur untuk ditata.

Sementara budayawan Palembang Vebri Al Lintani mengapresiasi revitalisasi pelataran BKB, Air Mancur dan Titik Nol Palembang.

"Harapan kami BKB bisa balik menjadi cagar budaya seperti benteng-benteng di tempat lain. Ada Benteng Oranje di Ternate dikelola oleh masyarakat dan pemerintah kota," katanya.

Vebri mengungkapkan, BKB berbeda dengan benteng lain di Indonesia yang merupakan peninggalan Inggris dan Belanda. Sementara Benteng Kuto Besak dibuat Sultan Palembang. ●





Road to Sumsel Health Tourism

MAKSIMALKAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT

Gubernur Herman Deru optimistis Sumatera Selatan akan menjadi salah satu destinasi kesehatan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu melihat potensi yang dimiliki, seperti rumah sakit, sumber daya manusia, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Untuk itu Gubernur Herman Deru kembali menegaskan cita-citanya menjadikan Sumsel sebagai daerah health tourism. Ia mengaku sering merasa sedih melihat banyak masyarakat yang memilih berobat ke luar provinsi bahkan keluar negeri seperti Penang Malaysia karena menilai pelayanan kesehatan di Sumsel belum memadai.

"Impian besar ini harus berdampak pada performa yang mesti kita benahi. Infrastruktur dan layanan kesehatan harus diperkuat. Saya ingin gerakan Sumsel Health Tourism ini tidak hanya menjadi wacana," tegasnya.

Ia menyampaikan, hingga kini belum ada provinsi lain yang secara resmi mencanangkan konsep tersebut. Sumsel berani memulai karena memiliki sumber daya manusia yang cerdas dan kompeten di bidang kesehatan, meskipun

pekerjaan ini membutuhkan langkah besar dan komprehensif.

"Tidak mudah memang. Tapi kita harus memulai. Tidak ada kepentingan politik di sini, melainkan bagian dari tanggung jawab kita. Jika tidak dicanangkan, selamanya ini hanya akan jadi niat," ujarnya.

Target jangka panjang yang ingin dicapai adalah, dalam 5-10 tahun mendatang, masyarakat dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap pelayanan kesehatan di Sumsel sehingga tidak lagi menjadikan luar negeri sebagai pilihan utama untuk berobat.

Untuk itu Gubernur juga mendorong agar seluruh layanan kesehatan baik rumah sakit pemerintah, swasta, hingga praktek dokter spesialis memiliki basis data terintegrasi yang dilengkapi pemetaan layanan (maps). Dengan demikian, masyarakat dari manapun dapat

dengan mudah mengetahui fasilitas kesehatan terdekat dan jenis layanan yang tersedia.

"Ini ide brilian. Kalau pun realisasinya baru terlihat 5 atau 10 tahun ke depan, alhamdulillah. Yang penting kita tetapkan tekadnya," kata Gubernur.

Herman Deru mengakui bahwa secara kuantitas jumlah dokter di Sumsel masih belum ideal. Meski demikian, dari sisi kualitas, dokter-dokter yang bernaung di bawah IDI telah mampu menjaga standar mutu pelayanan kesehatan. Hal ini dibuktikan melalui upaya pelayanan, pendampingan kesehatan, hingga penanganan berbagai kasus di fasilitas kesehatan daerah.

"Meski jumlah dokter belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan wilayah, kualitas dokter kita tetap dapat diandalkan sehingga pelayanan kesehatan di Sumsel berjalan baik," ucapnya.

la menambahkan, profesi dokter tidak hanya berfokus pada penanganan kuratif, tetapi perlu memperkuat pendekatan promotif dan preventif. Hal ini penting agar masyarakat semakin memahami pola hidup sehat dan mampu meminimalkan risiko penyakit sejak dini.

“Kita sedang mempersiapkan diri untuk Sumsel Health Tourism 2026 kita mulai canang. Kalau sekarang tahap road to. Kita ingin pelayanan kesehatan di Sumsel, terutama Palembang, semakin lengkap dan punya keunggulan masing-masing,” katanya saat mengunjungi Rumah Sakit Dr AK Gani dalam rangkaian kegiatan revitalisasi kawasan Benteng Kuto Besak (BKB).

Herman Deru memaparkan sejumlah rumah sakit rujukan yang memiliki spesialisasi unggulan, mulai dari RS Siti Fatimah punya keunggulan jantung dan ortopedi, RS Pelabuhan adalah keunggulan untuk pemecah batu ginjal.

Ada RS Siloam untuk program bayi tabung dengan tingkat keberhasilan di atas 60 persen, RS Hermina sudah terkenal untuk ibu dan anak, RS Permata dengan laktasinya.

Kemudian Rumah Sakit Siti Khadijah yang unggul dengan layanan khusus manula.

“Rumah Sakit Bari juga harus memiliki ikon atau layanan unggulannya sendiri dan rumah sakit benteng kalau selesai revitalisasi harus ada iconnya juga,” tambahnya.

Naikkan Status RSUD Siti Fatimah

Pencapaian besar diraih RSUD Siti Fatimah setelah secara resmi ditetapkan sebagai Rumah Sakit Tipe A dalam upaya mendukung Sumsel Health Tourism 2026.

Penguatan status Tipe A ini sekaligus menandai komitmen pemerintah daerah dalam melakukan transformasi sektor kesehatan. RSUD Siti Fatimah kini resmi masuk jajaran rumah sakit tertinggi dalam sistem klasifikasi rumah sakit nasional.

Gubernur Herman Deru menilai keberhasilan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat layanan kesehatan di Sumatera Selatan. Ia menegaskan bahwa peningkatan tipologi bukan hanya kebanggaan adminis-

tratif, tetapi amanah besar untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Selamat atas naik tingkatnya tipologi rumah sakit dari Tipe B menjadi Tipe A. Dengan kenaikan tingkat tentu ada tanggung jawab baru yang harus dijalankan,” ujarnya. Ia menilai pencapaian ini menuntun peningkatan performa baik dari sisi fasilitas maupun SDM.

bertujuan menjadikan Sumsel destinasi layanan kesehatan unggul di Indonesia.

Menurut Gubernur, Sumsel memiliki potensi besar dalam mengembangkan wisata kesehatan karena dukungan SDM profesional, fasilitas yang kian modern, serta infrastruktur yang terus dibenahi. RSUD Siti Fatimah sebagai rumah sakit Tipe A menjadi bagian kunci



Gubernur juga menyebut bahwa rumah sakit tidak hanya dituntut tampil megah secara fisik, tetapi harus memberikan pelayanan setara rumah sakit top nasional. Ia mengajak seluruh tenaga kesehatan menjaga komitmen untuk memberikan layanan terbaik tanpa diskriminasi.

Lebih jauh, Herman Deru mencanangkan Sumsel sebagai wilayah Health Tourism. Ia menyebut peningkatan status RSUD Siti Fatimah sebagai momentum penting menjalankan program “Road to Sumsel Health Tourism” yang

dari percepatan program tersebut.

Tak hanya itu, Herman Deru berharap rumah sakit-rumah sakit lain di Sumsel dapat berbenah dan menyusul pencapaian RSUD Siti Fatimah. Ia menegaskan bahwa pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas merupakan prioritas utama pemerintah provinsi.

Sementara Direktur RSUD Siti Fatimah, dr. Syamsuddin Isaac, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah dan seluruh tenaga kesehatan yang telah berkontribusi dalam proses peningkatan status. ●

4 RAPERDA PRIORITAS MASUK PROPEMPERDA 2026

Pastikan Transparansi dan Efisiensi Anggaran

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menegaskan keseriusannya dalam menata regulasi daerah melalui pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.

Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, hadir langsung dan menegaskan bahwa penyusunan Propemperda tidak dilakukan sekedar memenuhi agenda rutin legislasi.

Menurutnya, setiap regulasi yang diusulkan telah diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat serta visi

dokumen Propemperda yang telah disepakati bersama DPRD segera diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk evaluasi. Tahapan ini disebut penting demi memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) memperoleh penyempurnaan sesuai standar peraturan nasional sebelum disahkan menjadi

provinsi.

Gubernur juga memastikan bahwa seluruh masukan dari fraksi dan komisi DPRD akan ditindaklanjuti secara serius. Baginya, mekanisme check and balance merupakan bagian penting agar kualitas regulasi semakin kuat dan tidak hanya bersifat administratif.

Sementara Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menambahkan bahwa penyusunan Propemperda 2026 dilakukan dengan prinsip efisiensi dan tepat sasaran sehingga tidak ada tumpang tindih aturan dan semua Raperda yang dibahas benar-benar diperlukan.

Menurut Andie, empat Raperda telah disepakati sebagai prioritas utama tahun 2026. Raperda tersebut mencakup aspek strategis tata kelola irigasi dan keuangan daerah yakni Raperda Pengaturan Distribusi dan Peruntukan Air Irigasi sebagai inisiatif DPRD.

Kemudian tiga Raperda dari usulan pemerintah provinsi yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Raperda Perubahan APBD 2026, dan Raperda APBD 2027.

Ia menekankan bahwa pembentukan setiap Raperda membutuhkan sinergi kuat antara DPRD dan Pemprov agar pelaksanaan di lapangan berjalan konsisten dan berpihak pada masyarakat.

Usai penandatanganan Propemperda 2026, rapat berlanjut dengan penyampaian laporan Badan Anggaran terkait Raperda APBD 2026 sebagai bagian dari rangkaian akhir kegiatan legislatif di penghujung tahun.

Setelah proses penandatanganan Propemperda, rapat berlanjut dengan penyampaian laporan Badan Anggaran terkait Raperda APBD 2026. Tahapan ini menjadi bagian



pembangunan Sumsel. Karenanya, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar aturan daerah yang lahir nantinya benar-benar berdampak dan implementatif.

Herman Deru menjelaskan bahwa

Perda.

"Dari hasil kesepakatan ini akan kami serahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi, dan saatnya nanti akan menjadi Peraturan Daerah," ujarnya menegaskan komitmen pemerintah

akhir dari dinamika rapat paripurna di penghujung agenda legislatif tahun 2025.

Pengesahan Propemperda 2026 menandai dimulainya tahapan baru dalam pembangunan hukum daerah. Pemerintah Provinsi Sumsel berharap proses selanjutnya berjalan lancar sehingga Perda yang terbentuk mampu menjadi instrumen penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif.

Pastikan APBD 2026 Tetap Stabil dan Pro Rakyat

Masuknya empat Raperda dalam Propemperda 2026 ini merupakan hasil rangkaian pembahasan eksekutif dan legislatif sebelumnya. Dimana DPRD Sumsel menghasilkan keputusan penting, yakni penetapan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Penetapan tersebut dilakukan bersama Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, setelah mendengarkan Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengenai hasil pembahasan Raperda Perubahan APBD.

Dari laporan Banggar menekankan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2025 telah dilakukan sesuai dengan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan PPAS. Banggar juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program pembangunan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru secara resmi menyampaikan apresiasinya atas pengesahan Raperda ini merupakan langkah penting dalam menyempurnakan kebijakan fiskal daerah guna mengakomodasi dinamika pembangunan.

"Ini merupakan tahapan akhir dari serangkaian penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, Raperda akan kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," ujar Herman Deru.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran DPRD Sumsel yang

telah berkontribusi penuh dalam proses pembahasan bersama mitra kerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci suksesnya penyusunan perubahan APBD ini.

Herman Deru menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam

APBD Sumsel Tahun Anggaran 2025 meliputi pendapatan sebesar Rp11.129.125.002.891, belanja sebesar Rp11.237.619.654.098, sehingga terjadi defisit sebesar Rp 108.494.651.207. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun berjalan dinyatakan nihil.

Keputusan tersebut dituangkan



pelaksanaan program yang tertuang dalam perubahan APBD ini. Ia optimistis jika semua pihak bekerja dengan niat tulus, maka hasilnya akan optimal.

"Insya Allah, dengan niat tulus dan tekad kuat, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

Adapun rincian Perubahan

dalam Keputusan Bersama antara DPRD dan Gubernur Sumsel.

Ketua DPRD, Andie Dinialdie juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Gubernur atas pendapat akhirnya yang ringkas dan jelas.

"Semoga keputusan ini membawa berkah dan manfaat besar bagi masyarakat Sumsel. Mari terus bekerja bersama demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat," tutupnya. •

Herman Deru Dianugerahi People of The Year 2025 BUKTI KOMITMEN MAJUKAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menorehkan prestasi nasional setelah dinobatkan sebagai salah satu penerima penghargaan People of The Year 2025 dari Metro TV. Penghargaan bergengsi itu diberikan kepada 15 tokoh yang dianggap memberi kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia.

Herman Deru meraih penghargaan pada kategori Pemberdaya Pangan dan Petani Lokal, subkategori Diversifikasi Produksi Pangan Lokal. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Strategic Content Development Metro TV, Meniek Andini, di Studio 1 Metro TV, Jakarta, Jumat (28/11/2025) sore.

Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa segala upaya yang dilakukan selama memimpin daerah merupakan bentuk pengabdian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

"Luar biasa, karena kita tidak pernah berpikir bahwa televisi besar seperti Metro TV akan menilai hal ini. Kita hanya berupaya memberikan layanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh petani," ujar Herman Deru.

Ia menegaskan komitmennya yang sejak dahulu memegang prinsip 2.5, yakni dua hari di kantor dan lima hari di lapangan. Prinsip itu tetap dijalankan meskipun kini ia memimpin wilayah yang jauh lebih luas daripada saat menjabat Bupati.

Herman Deru menilai pendekatan turun langsung ke lapangan membuat kebijakan menjadi lebih tepat sasaran. Hal itu pula yang melahirkan berbagai program strategis, termasuk Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang terbukti berdampak besar bagi ketahanan pangan daerah.

Dalam sesi live tersebut, Herman Deru menjelaskan bahwa GSMP lahir dari



krisis pangan dan tingginya inflasi pada masa pandemi Covid-19. Saat itu, suplai pangan Sumsel banyak bergantung pada pasokan dari luar daerah. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat menjadi produsen pangan melalui gerakan menanam sendiri.

“Gerakannya sederhana. Kita mulai dari perubahan mindset masyarakat, dari konsumtif menjadi produktif. Mereka kita dorong untuk menanam sendiri. Inflasi itu terjadi karena panic buying. Dengan GSMP, kita menjaga suplai-demand tetap stabil,” jelasnya.

Program GSMP mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan besar melalui CSR berupa bantuan bibit, benih, dan polybag. Kolaborasi itu membuat gerakan semakin masif di seluruh Sumsel.

Keberhasilan GSMP terlihat dari meningkatnya ketersediaan pangan lokal dan kemampuan daerah menekan laju inflasi. Sumsel kini menjadi salah satu provinsi yang konsisten menjaga stabilitas pangan.

Di sektor padi, capaian produksi juga naik signifikan. Herman Deru menyebut produksi padi Sumsel pada 2024 sebesar 2,7 juta ton, sementara tahun 2025 telah menembus 3,6 juta ton dan diperkirakan mencapai 3,7 juta ton hingga akhir tahun.

Metro TV menilai kontribusi besar Herman Deru dalam pemberdayaan petani dan diversifikasi pangan lokal menjadi alasan kuat terpilihnya ia dalam ajang POTY 2025. Penghargaan ini sekaligus menjadi kado ulang tahun ke-25 Metro TV dengan tema “Journey With Empathy” •



Gerakannya sederhana. Kita mulai dari perubahan mindset masyarakat, dari konsumtif menjadi produktif.





EKONOMI TUMBUH 4,96 PERSEN INVESTASI PECAH REKOR

Provinsi DKI Jakarta mencatatkan pertumbuhan ekonomi 4,96 persen pada Triwulan III/2025. Angka ini menunjukkan pemulihan dan stabilitas ekonomi yang didukung inflasi yang sang at terjaga.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikannya dalam konferensi pers APBD DKI di Balai Kota, Jumat, 21 November 2025.

"Dari Executive Summary, Triwulan III 2025, Jakarta tercatat pertumbuhannya 4,96 persen yang menunjukkan

berikan kepercayaan tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jakarta pada periode ini. Stabilitas ekonomi dan investasi ini menjadi fondasi dasar bagi Jakarta untuk terus menjalankan berbagai program prioritas ke depannya.

Dari sisi pengendalian harga, inflasi DKI Jakarta tercatat sebesar 2,69 persen,

kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang telah bersinergi dengan pemerintah daerah, DPRD Jakarta, pelaku usaha, dan distributor untuk memastikan pasokan tetap tersedia.

Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 6,05 persen pada Agustus 2025. Di sisi lain, kinerja investasi meningkat signifikan hingga Rp 204,13 triliun.

Pramono menegaskan bahwa stabilitas harga dan pasokan pangan masih terjaga tanpa gejolak.

"Sampai dengan bulan November ini kita tidak pernah menghadapi kelangkaan di pasar semua produk-produk yang ada di Jakarta," ucap Pramono.

Untuk mengendalikan inflasi, Pemprov DKI menerapkan empat strategi. Yakni, menjaga keterjangkauan harga lewat program pangan bersubsidi, menjamin ketersediaan pasokan, contract farming, serta memastikan distribusi barang berjalan lancar.

Kinerja APBD 2025: Pendapatan Daerah Naik, Belanja Daerah Dipercepat

Pramono turut memaparkan perkembangan pendapatan dan serapan anggaran APBD 2025 senilai Rp 91,86 triliun. Pendapatan daerah naik dari Rp 62,39 triliun pada Oktober menjadi Rp 68,53 triliun pada November, atau 81,15 persen dari target Rp 84,45 triliun hingga akhir Desember. Belanja daerah bergerak mengikuti percepatan penyerapan anggaran.

"Belanja daerah meningkat dari Rp 47,96 triliun menjadi Rp 51,98 triliun atau 60,46 persen dari target Rp 85,97 triliun. Sementara untuk pembiayaan daerah tercatat Rp 3,64 triliun. SILPA naik dari Rp 18,08 triliun menjadi Rp 20,09 triliun pada 20 Oktober 2025," papar Pramono.

21 Ribu Paket Pengadaan Dikebut, Surplus Anggaran Capai Rp 14,43 Triliun
Percepatan belanja daerah juga diprediksi berlanjut hingga akhir tahun



pemulihan dan stabilitas ekonomi kota dengan inflasi yang sangat terjaga," kata Pramono.

Pramono menjelaskan, kinerja investasi di Jakarta juga mengalami kenaikan signifikan, mencapai Rp 204,13 triliun. Kenaikan investasi ini menjadi indikasi kuat bahwa pelaku dunia usaha mem-

angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 2,86 persen.

Inflasi yang terkendali membuktikan bahwa harga barang dan jasa di Jakarta relatif stabil, dan stabilitas pasokan terjaga dengan sangat baik.

Pramono Anung mengapresiasi

karena ribuan paket pengadaan telah memasuki tahap akhir.

“Peningkatan realisasi belanja di akhir tahun ini dapat dipastikan, mengingat masih ada sekitar 21.631 paket pengadaan barang jasa yang telah dilaksanakan dan proses tender oleh BPPBJ telah mencapai 95,34 persen. Saat ini tercatat surplus anggaran sebesar 14,43 Triliun,” imbuhnya.

Dengan tren ini, Pemerintah Provinsi DKI yakin realisasi APBD mampu memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025.

Apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan jajaran Pemprov DKI, para pelaku usaha, UMKM dan pemangku kepentingan disampaikan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris atas capaian ekonomi yang mengesankan sepanjang 2025.

Pertumbuhan investasi yang meningkat 6,4 persen hingga mencapai Rp204,13 triliun, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 6,05 persen, serta pendapatan daerah yang telah menyentuh Rp68,53 triliun per 20 November 2025, menjadi sinyal kuat bahwa perekonomian ibu kota bergerak di jalur yang positif.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, kombinasi kebijakan yang tepat, iklim investasi yang semakin kondusif, dan daya tahan pelaku usaha membuat Jakarta tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang menantang.

“Capaian ini menunjukkan bahwa Jakarta memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Pertumbuhan investasi yang tinggi dan turunnya angka pengangguran menandakan bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemprov DKI berjalan ke arah yang benar dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkapnya, Minggu 23 November 2025.

Fahira Idris menilai pertumbuhan investasi yang menembus Rp204,13 triliun pada kuartal III-2025, bukan sekadar angka, tetapi bukti kepercayaan dunia usaha pada stabilitas ekonomi Jakarta. Serapan tenaga kerja yang mencapai ratusan ribu orang memperlihatkan bahwa geliat investasi memberikan dampak nyata pada kehidupan warga.

Di sisi lain, peningkatan pendapatan

daerah hingga Rp68,53 triliun menunjukkan bahwa mesin ekonomi Jakarta bekerja lebih efektif. Stabilitasnya inflasi dan aktivitas perdagangan yang terjaga turut menyokong kinerja penerimaan ini.

Namun, meski apresiasi patut diberikan, Fahira Idris mengingatkan bahwa pencapaian ini harus menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh. Ia men-

tasi pada sektor kesehatan, digital, energi bersih, telekomunikasi, dan transportasi publik, agar struktur ekonomi lebih modern dan kompetitif.

Ketiga, memberikan dukungan penuh bagi UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Momentum pertumbuhan ekonomi harus dirasakan langsung UMKM melalui insentif, digitalisasi, akses



egaskan bahwa Jakarta sebagai kota global membutuhkan konsistensi, inovasi, dan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pusat.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jakarta, Fahira Idris menyampaikan lima rekomendasi strategis. Pertama, memperkuat ekosistem investasi yang ramah, efisien, dan memberikan kepastian usaha.

Pelayanan perizinan harus semakin cepat, transparan, dan bebas hambatan agar investasi tidak berhenti pada tahap komitmen, tetapi benar-benar terealisasi dan berdampak ekonomi.

Kedua, mendorong diversifikasi sektor investasi menuju ekonomi masa depan. Jakarta perlu memperbesar porsi inves-

tembiayaan, dan pembukaan pasar yang lebih luas.

Keempat, menjaga stabilitas harga melalui penguatan rantai pasok pangan dan kolaborasi daerah pemasok. Stabilitas inflasi menjadi salah satu penopang kinerja ekonomi. TPID perlu menjaga kestabilan pasokan dan harga komoditas strategis untuk melindungi daya beli masyarakat.

Kelima, mempercepat proyek strategis daerah untuk memperkuat daya saing Jakarta. Dari pengelolaan sampah, air bersih, transportasi publik, hingga mitigasi banjir dan penurunan muka tanah, semua proyek prioritas harus direalisasikan lebih cepat melalui kolaborasi pemerintah-swasta. ●

MENEGUHKAN DIRI SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD resmi menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung Berlian, 20 November 2025.

Penandatanganan ini menjadi pijakan awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. menegaskan bahwa meskipun dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan, program yang *directly* berdampak pada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Keamanan ketahanan pangan menjadi fokus pembangunan 2026. Swasembada pangan harus menjadi keniscayaan,” tegas Gubernur.

Kebijakan ini sejalan dengan visi besar Jateng sebagai penyangga utama produksi pangan Indonesia.

Kinerja ekonomi Jawa Tengah mencatat perkembangan positif sepanjang tahun 2025, sehingga menjadi fondasi kuat dalam penyusunan arah pemban-

gunan tahun 2026. Berbagai indikator ekonomi dan sosial menunjukkan tren peningkatan yang konsisten.

Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2025 mencapai 5,37 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,93 persen. Kondisi ini memberikan keyakinan bahwa perekonomian daerah bergerak stabil ke arah pemulihan yang lebih kuat.

Dengan melihat tren tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5 hingga 6 persen. Optimisme ini didukung oleh peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan, perdagangan, dan aktivitas UMKM yang semakin menggeliat.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi pada tahun 2026 diperkirakan akan tetap terjaga pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Hal ini menunjukkan langkah

pengendalian harga kebutuhan pokok terus diperkuat guna menjaga daya beli masyarakat.

Perbaikan juga terlihat pada aspek kesejahteraan sosial. Tingkat kemiskinan pada Maret 2025 tercatat 9,48 persen, membaik dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,58 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan mulai menunjukkan hasil, meskipun tantangan masih harus terus diatasi terutama di wilayah pedesaan.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan menjadi 4,66 persen, dari sebelumnya sebesar 4,78 persen. Ini menandakan bahwa dunia usaha makin mampu menyerap tenaga kerja, sejalan dengan pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, hasil capaian indikator ekonomi dan sosial tahun



2025 memberikan keyakinan bahwa Jawa Tengah memiliki modal kuat untuk melangkah lebih progresif di tahun 2026. Pemerintah daerah pun diharapkan terus memperkuat strategi pembangunan, agar momentum pertumbuhan ini semakin membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Stabilitas yang berhasil dijaga oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi fondasi penting untuk mendorong pembangunan sektor pertanian, peningkatan produktivitas pangan, serta penciptaan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

Gubernur Taj Yasin Maimoen memaparkan rancangan struktur APBD Jawa Tengah tahun 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp23,74 triliun, meningkat sekitar 3,04 persen dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp24,15 triliun, yang menunjukkan pengelolaan anggaran lebih efisien dengan penurunan sekitar 2,79 persen.

Untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah juga menata pembiayaan daerah dengan total Rp414,5 miliar. Angka ini terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp70 miliar.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan melalui digitalisasi pajak dan layanan Samsat, optimalisasi pajak air permukaan, pengembangan aset dan kinerja BUMD dan perluasan basis wajib pajak sektor potensial.

Ketua DPRD Jateng Sumanto menekankan keselarasan anggaran 2026 dengan visi gubernur menjadikan Jateng sebagai lumbung pangan nasional.

"Penyesuaian anggaran bukan berarti pemangkasan program penting. Justru kami memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar hadir untuk rakyat. Fokus kami tetap: pangan kuat, ekonomi rakyat naik," bebernya.

Dijelaskan Sumanto bahwa Jawa Tengah sudah menjadi tulang punggung pangan nasional, sehingga memiliki tantangan adalah memastikan petani dan nelayan mendapatkan kesejahteraan yang seimbang dengan kontribusinya.

"Jawa Tengah telah menjadi tulang punggung pangan nasional. Tantangan ke depan adalah memastikan petani dan nelayan kita mendapatkan kesejahteraan yang seimbang dengan kontribusinya," jelasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Ir Bambang Setiyawan menyebutkan dengan teknologi tepat guna bisa mendorong petani masuk ke ekosistem digital e-commerce hasil tani, penjualan pupuk non-tunai, hingga sensor

lahan agar bisa mengembalikan anak muda kembali ke sawah, tetapi dengan wajah pertanian yang lebih modern dan menjanjikan.

"Teknologi tepat guna menjadi solusi. Kami mendorong petani masuk ke ekosistem digital: e-commerce hasil tani, penjualan pupuk non-tunai, hingga sensor lahan. Kami ingin anak muda kembali ke sawah, tetapi dengan wajah pertanian yang lebih modern dan menjanjikan," pungkasnya. •



14 Program Utama Swasembada Pangan 2026

Agar ketahanan pangan berlangsung berkelanjutan, Pemprov Jateng menyiapkan 14 program prioritas, melibatkan kolaborasi petani, nelayan, pelaku usaha pangan, serta pemerintah desa:

1. Distribusi benih, pupuk, dan sarana prasarana pertanian
2. Penyediaan bibit dan pakan ternak, serta dukungan inseminasi buatan
3. Rehabilitasi jaringan irigasi untuk kontinuitas pasokan air
4. Perbaikan dan modernisasi pelabuhan perikanan
5. Premi asuransi bagi petani dan nelayan
6. Penyediaan cadangan pangan pemerintah dan subsidi bahan pangan
7. Pelatihan dan pendampingan usaha pangan berbasis UMKM
8. Fasilitasi distribusi melalui program pangan murah
9. Penyediaan alat pengolahan pangan lokal
10. Penguatan akses permodalan kelompok usaha bersama
11. Edukasi ketahanan dan keamanan pangan masyarakat
12. Rehabilitasi hutan dan kawasan penyangga air
13. Penanaman dan penyediaan bibit tanaman keras untuk masyarakat sekitar hutan
14. Pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) untuk menjaga ekosistem

TEKANAN ANGGARAN DAN PELUANG SKEMA ALTERNATIF

Provinsi Sumatera Utara menghadapi tekanan fiskal yang cukup signifikan. Penurunan alokasi transfer dari pusat memaksa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencari jalur pembiayaan baru.

Di tengah tantangan ini, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya untuk membantu daerah memanfaatkan pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar roda pembangunan tetap berjalan.

Penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk 2026 menjadi realitas yang harus dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia.

Dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa rancangan alokasi TKD TA 2026 telah disampaikan ke DPR dan menggambarkan arah penyesuaian di sejumlah komponen utama (DBH, DAU, DAK).

Penurunan TKD secara nasional mencapai sekitar 24,8 persen dari Rp 919 triliun di 2025 menjadi sekitar Rp 693 triliun di 2026. DPR menyampaikan bahwa penurunan ini bisa meng-

hadirkan hambatan terhadap pelayanan publik daerah.

Komite III DPD RI memberi perhatian serius terhadap pemangkasan ini karena potensi menekan ruang fiskal daerah. Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan memantau daerah yang terdampak penurunan TKD agar tetap dapat menjalankan program-program dasar.

Anggaran TKD untuk tahun anggaran 2025 tercatat sekitar Rp 919 triliun secara nasional, sementara untuk rancangan TKD tahun 2026 pemerintah menyebut angka mendekati Rp 693 triliun, yang berarti penurunan sekitar 24,8 persen.

Dua komponen yang paling terdampak oleh pengurangan transfer tersebut adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), di mana daerah yang sangat tergantung pada alokasi tersebut menghadapi tekanan fiskal yang semakin besar.

Bagi banyak pemerintah daerah



dengan basis fiskal yang relatif lemah, pengurangan TKD ini bukan sekadar penyesuaian angka melainkan potensi hambatan nyata terhadap kelanjutan pembangunan publik, pengelolaan layanan dasar, dan kebijakan strategis daerah.

Di Sumut, Gubernur Bobby menyebut bahwa penyesuaian TKD 2026 membawa beban yang tidak ringan. Ia menyebut angka penurunan DBH sekitar Rp 1,5 triliun dan penurunan DAU sekitar Rp 3,2 triliun, total ± Rp 4,7 triliun.

“Hal ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan DBH hingga 59 persen dan DAU sekitar 12 persen,” ungkap Bobby.

Dalam kondisi seperti ini, Kab/Kota di Sumut semakin terdorong untuk mencari jalur pembiayaan pembangunan selain APBD dan dana dari pusat/provinsi.

Untuk merespon, Pemprov Sumut membuka kerja sama dengan dua BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang berada di bawah supervisi Kementerian Keuangan.

“Melalui skema ini, daerah bisa memanfaatkan pembiayaan atau penjaminan untuk proyek infrastruktur,” sambungnya.

Gubernur Bobby menambahkan pemprov siap membantu pembayaran bunga skema pembiayaan itu. “Misalnya melalui skema bantuan bersama antara provinsi dan/atau daerah agar beban lebih ringan,” sambungnya.

Direktur Pembiayaan Publik & Pengembangan Proyek SMI, Faaris Pranawa, menjelaskan bahwa di Pulau Sumatera total proyek SMI sebesar Rp 2,76 triliun, dan di Sumut terdapat enam kabupaten/kota sebagai debitur dengan total komitmen sekitar Rp 956,2 miliar.

“Porsi terbesar adalah proyek pembangunan jalan,” katanya.

Mengapa Ini Jadi Crux Pembangunan Daerah?

1. Sektor Infrastruktur Masih Urgen Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan tetap menjadi janji kampanye utama calon kepala daerah dan men-

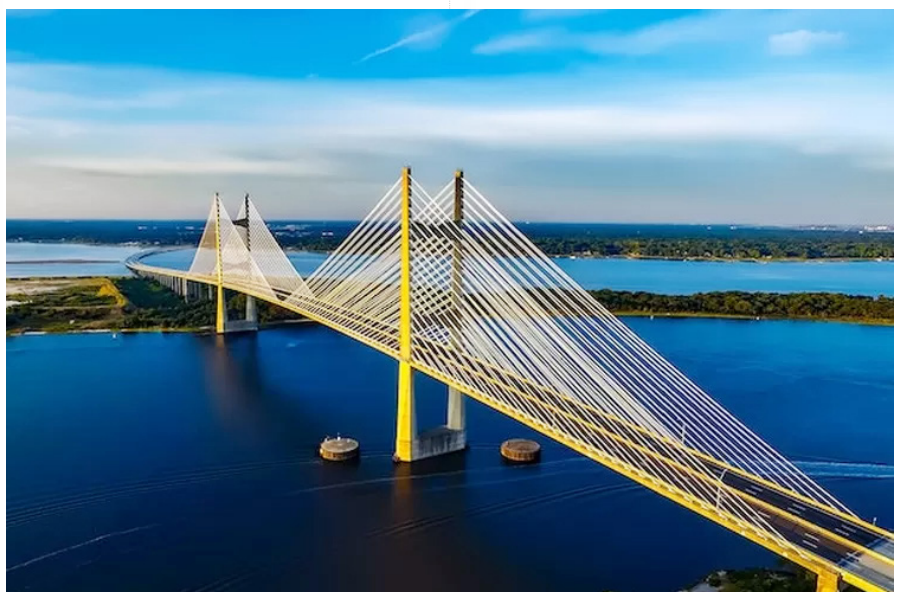
jadi kebutuhan nyata di Sumut. Infrastruktur jalan menjadi prioritas utama dalam skema SMI.

2. Dana Transfer Terpangkas Dengan alokasi TKD yang menyusut, daerah-daerah harus cepat menyesuaikan tanpa mengorbankan pelayanan publik atau proyek strategis.
3. Pendanaan Alternatif sebagai Jalan Keluar Melalui kerja sama pembiayaan/penjaminan, daerah memiliki opsi tambahan selain hanya mengan-

Pemangkasan TKD bukan sekadar pengurangan angka, tetapi juga bagian dari strategi reformasi fiskal pusat-daerah.

Beberapa catatan kebijakan yakni, fokus pada efisiensi belanja negara dan realokasi belanja ke program prioritas nasional (kedaulatan pangan, energi, ekonomi) yang kemudian berdampak ke daerah lewat pusat.

Dorongan agar daerah lebih mandiri fiskalnya, meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), aset daerah, partisipasi investasi, dan kerja sama pembi-



dalkan APBD atau dana pusat/provinsi yang fluktuatif.

4. Peran Provinsi sebagai “Jembatan” Provinsi melalui BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) dapat memfasilitasi subsidi bunga atau skema pendampingan agar beban pembiayaan alternatif tidak sepenuhnya ditanggung daerah.

ayaan.

Penguatan koordinasi dan tata kelola pusat-daerah. Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkeu menyatakan akan memfasilitasi daerah terdampak. Namun, kritik muncul bahwa mekanisme pemangkasan sangat tajam dan dapat mengikis makna otonomi fiskal daerah. ●

JAWA TIMUR TANCAP GAS SWASEMBADA DAGING

Jawa Timur kini semakin menegaskan posisinya sebagai tulang punggung pangan nasional.



Dalam sebuah kegiatan pelayanan inseminasi buatan (IB) sapi yang digelar di City Forest Jember, Kabupaten Jember, pada Senin 24 November 2025, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan sikap tegas terhadap rencana penurunan daging impor ke Jawa Timur dengan alasan provinsi ini memiliki potensi besar untuk menjadi “surplus” daging potong.

Sikap ini muncul di tengah kondisi nasional yang masih bergantung signifikan pada impor daging sapi dan kerbau, sementara permintaan dalam negeri terus tumbuh.

Maka, langkah Jawa Timur dalam memperkuat sektor peternakan bukan hanya penting bagi provinsi, tetapi me-

iliki implikasi strategis bagi kedaulatan pangan nasional.

Berdasarkan laporan, populasi sapi potong di Jawa Timur disebut mencapai 3,11 juta ekor, atau sekitar 26 persen dari populasi nasional.

Populasi sapi perah di Jawa Timur akhir 2024 tercatat sebanyak 292.265 ekor, sekaligus menempatkan provinsi ini sebagai pemimpin nasional untuk sapi perah.

Pada sektor daging, bahwa Jawa Timur menghasilkan 121.387 ton per tahun (sekitar 20 persen nasional), sedangkan menurut laporan resmi untuk komoditas daging sapi, impor Indonesia mencapai sekitar 287.000 ton pada 2022, atau defisit signifikan antara volume produksi domestik dengan kebu-

tuhan konsumsi.

Gubernur Khofifah menyampaikan secara terbuka bahwa jika memang pemerintah pusat memutuskan untuk menurunkan daging impor ke Indonesia, maka Jawa Timur menolak agar wilayahnya dijadikan lokasi penurunan impor tersebut.

Alasannya, jika Jawa Timur menerima volume impor tersebut, maka produktivitas peternak lokal bisa terganggu.

“Kalau pemerintah mau impor daging silakan, tapi jangan pernah diturunkan di Jawa Timur karena kita surplus daging,” ungkapnya.

Sikap ini sekaligus menjadi pesan kepada dinas peternakan provinsi dan daerah bahwa sektor peternakan sapi

potong harus diproteksi agar tidak tergerus oleh arus impor daging yang bisa menurunkan harga atau membuat peternak lokal dirugikan.

Pada kegiatan di Jember, Jawa Timur menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori "inseminasi buatan pada ternak sapi terbanyak dalam satu tahun".

Strategi yang diimplementasikan yakni, Pelaksanaan IB serentak di kabupaten/kota dengan dukungan 1.417 petugas IB, 7.000 petugas pemeriksa kebuntingan (PKB), 58 pengawas obat hewan, dan 95 pengawas lainnya.

Setelah inseminasi langsung dilakukan pemeriksaan kebuntingan, selanjutnya vaksinasi ternak. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, perguruan tinggi, asosiasi dokter hewan, asosiasi peternak, serta lembaga seperti Balai Besar Inseminasi Buatan dan Pusvetma, untuk memperkuat layanan dan kualitas reproduksi ternak.

Dengan program ini, Jawa Timur menargetkan tidak hanya meningkatkan jumlah ternak tetapi juga produktivitas modal penting menuju swasembada daging.

"Saat yang sama kita maksimalkan hari ini gerakan serentak untuk melakukan inseminasi buatan. Jadi setelah di-IB, langsung diperiksa kebuntingannya, lalu dilakukan vaksinasi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kemajuan sektor peternakan bergantung pada kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pelaku usaha, perguruan tinggi, asosiasi dokter hewan, asosiasi peternak, hingga Balai Besar Inseminasi Buatan dan Pusvetma.

"Ini menjadi satu paket betapa sektor peternakan mendapatkan sinergitas dari banyak elemen. Yang penting menurut saya adalah maksimalisasi Balai Besar IB dan Pusvetma untuk memperkuat kualitas layanan," tambahnya.

Sumber daya manusia dan ternak di Jawa Timur cukup besar, populasi sapi potong dan perah yang terbilang signifikan dibanding provinsi lain.

Infrastruktur pendukung seperti layanan IB yang masif dan terstruktur memberi keunggulan kompetitif. Jika berhasil mewujudkan skala produksi yang optimal, Jatim bisa mencapai produksi daging yang surplus secara

regional dan membantu provinsi lain.

Selain daging, Gubernur Khofifah juga menyinggung capaian dan target swasembada pangan lainnya.

Ia menyampaikan bahwa pada Desember 2025 mendatang Kementerian Pertanian akan mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras. Setelah itu, pemerintah menargetkan swasembada gula pada 2026.

"Sekarang Jawa Timur sudah mensuplai 58 persen produksi gula konsumsi nasional. Dengan potensi petani

untuk swasembada gula tahun depan, swasembada daging kini menjadi target yang sangat mungkin dicapai.

Khofifah optimis bahwa Jawa Timur akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program pangan nasional Presiden Prabowo. Ini menunjukkan peran strategis provinsi tersebut.

Bupati Jember Muhammad Fawait siap mendukung penuh kebijakan tersebut, karena mayoritas warganya adalah peternak.

"Jember siap mensukseskan Indo-



tebu yang luar biasa, target swasembada gula tahun depan sangat mungkin tercapai," katanya.

Jawa Timur telah memosisikan diri sebagai provinsi yang siap menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, Provinsi Jawa Timur telah memasuki fase kedaulatan pangan. Ini mencakup berbagai komoditas penting untuk kebutuhan masyarakat.

Setelah berhasil mencapai swasembada beras dan memiliki peluang besar

nesia Emas, terutama di bidang pertanian dan peternakan," tegasnya.

Fawait menilai, sikap Gubernur Khofifah patut didukung untuk melindungi peternak lokal dari dampak negatif impor daging tersebut.

Dari penelusuran media ini, data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional mencatat, jumlah sementara ternak sapi potong pada 2024 mencapai 3.110.123 ekor di Jawa Timur. Sedangkan populasi sapi ternak di Jember mencapai 194.821 ekor. ●

TINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN 3 RUMAH SAKIT JADI KELAS A

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan akan meningkatkan status rumah sakit rujukan menjadi kelas A, kategori tertinggi dalam standar pelayanan kesehatan nasional. Apalagi, hingga kini, Bengkulu tercatat sebagai satu-satunya provinsi di Sumatera yang belum memiliki rumah sakit tipe A.

Upaya tersebut dipusatkan pada pembangunan dan peningkatan status rumah sakit rujukan menjadi kelas A, kategori tertinggi dalam standar pelayanan kesehatan nasional. Bengkulu, hingga kini, tercatat sebagai satu-satunya provinsi di Sumatera yang belum memiliki rumah sakit tipe A.

Langkah strategis ini kembali dikuatkan Helmi setelah dirinya melakukan pertemuan intensif bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan,

tus RSUD M. Yunus dari tipe B menjadi tipe A.

"Sebagai provinsi, Bengkulu sudah seharusnya memiliki minimal satu rumah sakit kelas A. Ini kebutuhan mendasar demi pelayanan kesehatan yang setara dengan provinsi lain," tegas Gubernur Helmi Hasan.

Helmi menekankan, penentuan kebutuhan rumah sakit tipe A tidak bisa sekadar mengacu pada jumlah penduduk, melainkan asas pemerataan antarprovinsi. Terlebih, provinsi seperti Sumatera Barat dan Lampung telah

membuka lapangan kerja tenaga medis dan nonmedis dan menghadirkan layanan unggulan yang selama ini tidak ada di Bengkulu.

"Ini bukan soal bangunan semata, tetapi tentang kesetaraan dan martabat masyarakat Bengkulu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik," jelas Helmi.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso, yang turut hadir dalam pertemuan dengan Menkes, menjelaskan bahwa Kemenkes memiliki program peningkatan tipe rumah sakit



pada 21 November 2025.

Dalam pertemuan empat jam tersebut, Gubernur Helmi menyampaikan kebutuhan mendesak akan fasilitas kesehatan rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu. Ia bahkan telah mengirim surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk meminta dukungan penuh pembangunan tiga rumah sakit kelas A, terdiri dari Rumah Sakit Kemenkes (RS Vertikal) di Bengkulu, Rumah Sakit Adhyaksa dan peningkatan sta-

mendapat dua RS kelas A dari pemerintah pusat.

Gubernur Helmi menargetkan pembangunan dan peningkatan kelas rumah sakit tersebut dapat dimulai maksimal tahun 2026.

Dampak yang diharapkan dapat mengurangi rujukan ribuan pasien Bengkulu ke luar provinsi, meningkatkan kesiapan Bengkulu menangani kasus berat, mendorong transformasi kesehatan di wilayah barat Sumatera,

daerah.

"Kemenkes menyampaikan dukungan penuh agar RS di Bengkulu bisa naik tipe. Termasuk RSUD M. Yunus yang menjadi kandidat terkuat untuk menjadi rumah sakit tipe A," jelas Tejo.

Kemenkes juga berkomitmen memberikan bantuan berupa Alat Kesehatan (Alkes) prioritas sesuai kebutuhan, pendampingan penuh mulai dari perencanaan, arsitektur, hingga SDM, pengawasan langsung melalui Dewan

Pengawas (Dewas) agar proses pembangunan dan peningkatan layanan berjalan transparan dan terukur.

Sebagai rumah sakit rujukan terbesar di Bengkulu, RSUD M. Yunus menjadi proyek utama. Pemerintah provinsi merencanakan pembangunan gedung utama baru empat lantai sebagai bagian dari persiapan akreditasi tipe A. Total kebutuhan anggaran mencapai Rp300 miliar, dengan pola pembangunan multiyears.

Untuk tahun berjalan (2025), PUPR telah mengusulkan Rp30 miliar untuk pematangan lahan, pembangunan lantai dasar gedung utama.

"Gedung utama empat lantai ini menjadi prioritas 2026 untuk mendukung RS M. Yunus naik kelas ke tipe A," ungkap Tejo.

Plt Direktur RSUD M. Yunus dr. Herry Permana menambahkan, permintaan RS agar Kemenkes menempatkan Dewan Pengawas, sehingga pengawasan dan perbaikan dapat berjalan lebih cepat.

"Kami juga mengajukan pembangunan RS vertikal. Namun sesuai arahan Menkes, lebih baik fokus memperkuat RSUD M. Yunus terlebih dahulu," jelas dr. Herry.

Dalam rekaman video yang diunggah di kanal "Helmi Hasan Official", Menkes Budi Gunadi Sadikin mengemukakan dukungan kepada Bengkulu.

"Kalau cocok, kita jalani," kata Menkes.

Budi bahkan memastikan kunjungan langsung ke Bengkulu dalam waktu dekat untuk melihat kesiapan lahan dan fasilitas. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Menkes dan Gubernur juga beberapa kali melontarkan candaan, termasuk saat Menkes meminta ditraktir makan saat berkunjung nanti.

Kolaborasi IDI dan Pemprov Bengkulu untuk Pelayanan Medis yang Berkualitas dan Merata

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bengkulu, Dr. dr. Yalta Hasanudin Nuh, Sp.An, FIP melakukan pertemuan dengan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan yang jadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu

dengan IDI dalam rangka peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.

Dr. Yalta memaparkan perkembangan organisasi IDI di Bengkulu. Ia menyebutkan, jumlah anggota IDI Wilayah Bengkulu saat ini tercatat 1.949 orang, dengan 516 dokter di antaranya berdomisili dan berpraktik di Kota Bengkulu.

tama dalam upaya mengatasi tantangan pelayanan kesehatan di berbagai daerah.

Menurutnya, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah konkret, salah satunya dengan mendistribusikan 130 unit ambulans ke berbagai kabupaten dan desa sepanjang tahun ini.

"Kami memastikan kebutuhan dasar kesehatan seperti obat-obatan hingga



Jumlah ini mengalami peningkatan dari data sebelumnya, yang sekaligus menunjukkan komitmen para tenaga medis untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang lebih luas.

"IDI Bengkulu siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dalam berbagai program kesehatan. Tujuan utama kami adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan medis yang berkualitas dan merata," ungkap Yalta.

Gubernur Helmi Hasan merespons positif komitmen tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemprov Bengkulu sangat terbuka bekerja sama dengan IDI, teru-

sarana pendukung lainnya sudah diverifikasi ulang oleh Inspektorat maupun BPKP. Dengan begitu, distribusi benar-benar tepat sasaran dan bisa digunakan masyarakat yang membutuhkan," jelas Helmi.

Tidak hanya soal ambulans dan obat-obatan, Gubernur juga menyoroti pengembangan fasilitas kesehatan di Bengkulu. Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan fungsi dan pelayanan di RSUD M. Yunus.

Rumah sakit rujukan terbesar di provinsi ini akan mendapat perhatian khusus, baik dari sisi infrastruktur maupun manajemen pelayanan. ●

KULINER LEGENDARIS SEMARANG PALING HITS SEPANJANG MASA

Semarang selalu menjadi magnet bagi para pecinta makanan karena kekayaan kuliner legendaris terus bertahan dari masa ke masa. Setiap sudut kota menyimpan cita rasa otentik yang menjadikan pengalaman bersantap semakin berkesan.

Popularitas kuliner populer Semarang justru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Banyak tempat makan bersejarah yang bukan hanya menawarkan makanan, tetapi juga menghadirkan nostalgia dan pengalaman emosional bagi

jib masuk daftar kunjungan

1. Lumpia Semarang Gang Lombok

Lumpia Semarang Gang Lombok adalah salah satu ikon kuliner tertua di kota ini, yang sudah beroperasi sejak tahun 1940-an.

Berlokasi di Gang Lombok No. 11, lumpia khas ini memiliki isian ayam, udang, dan telur yang dipadukan dengan bumbu gurih manis khas Semarang.

Tekstur kulitnya renyah, sementara isiannya lembut dan melimpah. Hidangan ini menjadi simbol kuliner Semarang yang tidak pernah kehilangan pesona.

Lumpia diketahui muncul di Semarang pada abad ke-19 untuk pertama kalinya. Kemunculan lumpia ini asalnya dari pendatang dari Fujian yang bernama Tjoa Thay Joe yang menjajakan

dengan rebung.

Isian ini kemudian dilapisi dengan kulit lumpia asal Tionghoa. Kombinasi kulit lumpia yang renyah, rebung yang manis, dan telur udang yang gurih membuat lumpia dengan cepat menjadi panganan favorit di Semarang.

Kala itu, panganan ini dijual di pasar malam Belanda bernama Olympia Park. Seiring waktu, lumpia semakin dikenal luas di Semarang. Usaha Tjoa Thay Joe dan Mbak Wasih akhirnya diteruskan oleh anak-anaknya. Siem Hwa Noi dan Siem Gwan Sing membuka usaha lumpianya di daerah Mataram, Semarang. Sedangkan Siem Swie Kiem membuka usahanya di Gang Lombok Nomor 11.

Di era sekarang, terdapat dua versi dari lumpia, yakni lumpia basah dan goreng. Lumpia basah sendiri ideal dikonsumsi bagi orang-orang yang sedang meng-



para pencintanya.

Cita rasa yang khas membuat kuliner khas Semarang selalu menjadi incaran wisatawan lokal hingga mancanegara. Mulai dari hidangan gurih, manis, hingga segar berkuah, semua tersedia dan memiliki penggemar setianya.

Tak heran jika wisata kuliner Semarang terus menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Berbagai tempat makan legendaris di kota ini tetap ramai karena mempertahankan kualitas rasa serta suasana yang autentik.

Tujuh kuliner paling populer yang wa-

panganan dengan isian rebung dan daging babi.

Di sana, ia bertemu dengan perempuan Jawa bernama Mbak Wasih yang juga menjajakan panganan serupa dengan dagangannya. Hanya saja, panganan yang dijajakan Mbak Wasih ini punya isian udang dan kentang sehingga cita rasanya lebih manis.

Setelah beberapa waktu, keduanya justru jatuh cinta, menikah, serta menggabungkan kedua dagangannya. Pada akhirnya, isian lumpia berubah menjadi udang atau ayam yang dikombinasikan

hindari gorengan. Menyantap lumpia pun akan semakin lengkap bersama lokio, acar, dan saus manis kental pendampingnya.

2. Gudeg Koyor Mbak Tum

Berlokasi di kawasan Wonodri, Gudeg Koyor Mbak Tum telah menjadi favorit sejak 1991. Perpaduan gudeg manis dengan koyor atau otot sapi memberikan sensasi gurih dan kenyal yang unik. Disajikan bersama sambal krecek pedas dan nasi lembut, sajian ini menjadi pilihan sempurna bagi penikmat kuliner

malam Semarang.

3. Tahu Petis Prasojo Simpang Lima

Tahu Petis Prasojo, yang sudah ada sejak 1980, berlokasi strategis di kawasan Pleburan, dekat Simpang Lima. Makanan ini terkenal karena perpaduan tahu goreng garing dengan siraman petis kental yang gurih dan sedikit manis. Biasanya disajikan dengan nasi putih hangat, menjadikannya hidangan yang sederhana namun sangat adiktif.

4. Asem-Asem Koh Liem

Olahan daging berkuah khas Jawa Tengah ini diberi nama asem-asem. Tempat terbaik untuk menikmatinya ada di Semarang yaitu buatan Koh Liem sejak 1978.

Warung Makan Asem-Asem Koh Liem tergolong makanan legendaris di Semarang karena sudah ada sejak 1978. Perintisnya, Piek Swie Liem atau akrab disapa Koh Liem, tutup usia pada 2019 dalam usia 83 tahun.

Meski begitu, asem-asem daging mi-



liknya masih dikenang oleh para foodies. Terbukti rumah makannya masih kerap padat pengunjung. Kamu bisa menyambangnya di depan SMA Loyola, tepatnya di Jalan Karang Anyar Nomor 28.

Nuansa klasik begitu terasa dengan meja melingkari tempat meracik makanan layaknya di warteg. Aneka lauk yang tersedia lantas disusun di dalam lemari kaca.

Kuahnya yang berwarna coklat keruh terasa asam, manis, dan gurih! Bumbu untuk meraciknya banyak, termasuk bawang merah, bawang putih, kecap manis, hingga gula aren.

Potongan dagingnya dijamin empuk juicy karena menggunakan bagian sandung lamur yang direbus perlahan dan lama. Ada juga lapisan tipis lemak yang membuat rasa gurihnya makin nagih.

Asem-asem daging makin enak dimakan dengan nasi hangat. Kalau mau tambah lauk ramesan atau rumahan, rumah makan Koh Liem juga menyediakannya

5. Gulai Kambing Bustaman Pak Sabar

Pak Sabar mulai berjualan gulai kambing sejak tahun 1969 di sekitar Kota Lama. Awalnya dia berjualan dengan cara dipikul dan berkeliling kawasan Kota Lama. Kini, Pak Sabar mulai menetap di sepetak warung sederhana di



kawasan Gereja Blenduk.

Warung gulai Pak Sabar ini gampang banget dicari. Kamu hanya perlu berjalan kaki sekitar 50 meter ke arah belakang Gereja Blenduk. Warung Pak Sabar ini tepat berada di ujung pertigaan jalan. Orang menyebutnya jalan tusuk sate.

Awalnya, aku agak heran dengan sajian gulai bustaman ini. Di kota asalku, Pati, gulai dimasak menggunakan santan sehingga dihasilkan kuah kuning, pekat dan

kental. Sedangkan kuah gulai bustaman diolah tanpa santan, tapi ditambahkan minyak serundeng kelapa sehingga memunculkan warna kecokelatan.

Nah, pastikan kamu datang sebelum jam 3 sore, takutnya kehabisan. Pak Sabar membuka warungnya dari jam 8 sampai jam 3 sore. Paling ramai sekitar jam makan siang.

Di sini, kamu bakal melihat potongan daging kambing berukuran besar tertata rapi dalam wadah dekat kuah tempat kuah. Saat disajikan, Pak Sabar baru memotong daging tersebut menjadi bagian yang lebih kecil.

Di warung gulai bustaman Pak Sabar ini ada dua pilihan isian, yaitu berisi daging atau campur (biasanya berisi jeroan dll). Kamu bisa memilih level kepedasan sesuka hati. Mau pedas, sedang, atau nggak pedas sama sekali.

Nah, uniknya, sebelum disajikan, Pak Sabar nguleg cabai mentah sesuai permintaan di piring. Setelah itu, barulah ditambahkan potongan daging kambing dan siram kuah gulai berwarna kuning kecokelatan.

6. Toko OEN

Toko OEN adalah cafe klasik yang berdiri sejak 1936 di Jalan Pemuda No. 52. Tempat ini menawarkan suasana vintage yang kental dengan nuansa kolonial. Menu yang disajikan beragam, mulai dari es krim legendaris, roti, hingga hidangan western klasik. Rasanya yang otentik mempertahankan pesona sejak puluhan tahun lalu.

7. Nasi Gandul Pak Memet

Nasi Gandul Pak Memet menyajikan hidangan nasi berkuah yang gurih dengan pilihan daging sapi atau kambing. Disajikan di atas daun pisang, aromanya semakin harum dan khas. Tekstur kuah gandum yang lembut dan kaya bumbu membuatnya menjadi kuliner wajib dicoba ketika berkunjung ke Semarang.

Dengan ragam pilihan kuliner legendaris Semarang yang kaya rasa dan cerita, kota ini menawarkan perjalanan gastronomi yang tidak terlupakan.

Setiap hidangan memiliki karakter unik yang membuat wisata kuliner di Semarang selalu dinanti. Jika berkunjung ke kota Lumpia, pastikan tujuh kuliner ini masuk dalam daftar kunjunganmu. ●



Candi Muaro Jambi

JEJAK PERADABAN BESAR YANG TERSEMBUNYI DI TANAH JAMBI

Bagi para pecinta sejarah yang berkunjung ke Kota Jambi, ada satu destinasi yang tak boleh dilewatkan yakni Kompleks Candi Muaro Jambi.

Meski namanya belum setenar Borobudur atau Prambanan, kompleks candi yang berada sekitar 26 kilometer dari pusat kota ini menyimpan pesona yang tak kalah megah sunyi, luas, dan penuh misteri peradaban lampau.

Sesampainya di sana, pemandangan candi berbahan batu bata merah langsung menyambut, berbeda dengan candi-candi di Pulau Jawa yang um-

lan kerajaan Sriwijaya atau kerajaan Melayu, kini menjadi saksi bisu dari sejarah gemilang Indonesia.

Dengan luas 3.981 hektar, Candi Muaro Jambi terletak di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Indonesia. Kompleks candi ini, diperkirakan berasal dari abad ke-7 hingga ke-12 M, menjadi situs candi terbesar dan terawat dengan baik di Pulau Sumatra.

Sejak tahun 2009, kompleks ini telah dicalonkan ke UNESCO untuk menjadi Situs Warisan Dunia.

Pertama kali dilaporkan pada tahun 1824 oleh seorang letnan Inggris bernama S.C. Crooke, kompleks percandian Muaro Jambi baru mulai mendapatkan perhatian serius pada tahun 1975.

Pakar epigrafi Boechari menyimpulkan bahwa peninggalan ini berasal dari abad ke-7 hingga ke-12 Masehi.

kuno, kompleks ini menjadi bukti kehidupan dan pertemuan berbagai budaya pada masa lalu.

Candi Muaro Jambi adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Melayu. Kompleks candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-7 hingga ke-12 Masehi dan merupakan kompleks percandian Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara, dengan sebagian besar penelitian menduga kuat sebagai pusat pendidikan agama Buddha pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya.

Candi Muaro Jambi diduga kuat sebagai lokasi awal Kerajaan Sriwijaya, dan diperkirakan pernah menjadi pusat pendidikan dan peradaban yang penting.

Candi ini juga merupakan peninggalan Kerajaan Melayu dan beberapa candi yang masih ada serta sisa arkeolo-



umnya menggunakan batu kali.

Setiap bata menyimpan pahatan dan tekstur yang menandakan keluwesan tangan-tangan pengrajin pada masanya.

Pengungkapan temuan arkeologis di KCBN Muaro Jambi menunjukkan bahwa kawasan ini bukan hanya sekadar candi bersejarah. Sebaliknya, ini adalah pusat pendidikan Buddhisme tertua dan terluas di Asia Tenggara pada masa lampau.

Candi Muaro Jambi, kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara yang diduga peningga-

Dalam kompleks percandian ini, sembilan bangunan telah dipugar dan menampilkan corak Buddhisme. Antara lain adalah Candi Kotomahligai, Kedaton, Gedong Satu, Gedong Dua, Gumpung, Tinggi, Telago Rajo, Kembar Batu, dan Candi Astano.

Selain sebagai warisan budaya, kompleks percandian Muaro Jambi memiliki struktur dan tinggalan sejarah lainnya.

Dengan gundukan tanah (menapo) yang belum dikupas, parit atau kanal kuno, kolam penampungan air, serta gundukan tanah dengan struktur bata

gi lainnya berasal dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, yang dibangun oleh kerajaan ini.

Bukti-bukti arkeologis dan corak yang ditemukan menunjukkan bahwa kompleks ini adalah pusat pendidikan agama Buddha yang penting, yang dikenal sebagai universitas Buddha pada masa itu.

Konon, terdapat sebuah cerita masyarakat tentang asal usul Candi Muaro Jambi yang hampir sama dengan Candi Prambanan. Diceritakan dalam buku Eksplorasi Warisan Budaya

Provinsi Jambi oleh Faisal Masri Maulana, dkk alkisah hidup seorang pemuda sakti yang memiliki ilmu mistis bernama Tun Talanai.

Suatu hari ia berjalan menyusuri Muaro Jambi untuk mencari wanita yang cantik dan baik budi pekertinya, kemudian sampai di Desa Muaro Jambi dan berkenalan dengan seorang wanita yang akhirnya bersedia untuk dipersunting.

Namun, sang wanita memberi syarat untuk dibuatkan bangunan candi yang tingginya menjulang ke langit, dalam waktu satu hari dengan batasan hari sudah fajar. Tun kemudian menyanggupi



dan mengerjakan bersama makhluk-makhluk gaib, bahkan candi sudah hampir selesai selepas tengah malam.

Sang wanita sebetulnya enggan untuk dinikahi, sehingga mencari cara yakni memancing ayam berkokok sebagai penanda hari sudah fajar.

Ia meminta ibu-ibu desa untuk menumbuk padi di alang untuk membanjirkan ayam tidur, lalu ayam-ayam akan berkokok. Karena kecewa, Tun kemudian menendang bangunan candi sehingga hancur dan berserakan kemana-mana.

Daya Tarik Candi Muaro Jambi

Candi ini memiliki kepentingan budaya dan agama yang populer untuk ziarah dan wisata religi. Pada buku Corak Budaya Provinsi Jambi karya M Syap Ropin, dkk disebut candi ini dianggap sebagai tempat suci oleh banyak penduduk setempat. Kombinasi makna sejarah, keajaiban arsitektur, dan aura religius membuatnya jadi unik dan menawan.

Kawasan ini adalah rumah bagi reruntuhan candi-candi megah dari era Hindu-Buddha, termasuk Candi Gumpung, Candi Gedong, Candi Kedaton dan banyak lagi lainnya. Berikut beberapa situs yang tercatat, dirangkum dari buku Menerka Kebudayaan Jambi oleh Muhammad Hadid Syafiq, dkk:

1. Candi Gumpung

Candi Gumpung merupakan salah satu bangunan utama yang berada di dalam kawasan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi. Candi ini dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu bata, dan di bagian depannya terdapat dua arca yang menambah nuansa historis.

Sebagai candi induk di kawasan ini, Candi Gumpung mengalami proses pemugaran selama enam tahun. Dalam proses tersebut, ditemukan sejumlah artefak berharga.

Salah satunya adalah lempeng emas bertuliskan inskripsi menggunakan aksara Jawa Kuno, yang menunjukkan nilai sejarah dan keagamaan yang tinggi.

2. Candi Tinggi

Candi Tinggi dikenal sebagai salah satu bangunan tertinggi di kompleks Candi Muaro Jambi. Pembangunannya berlangsung dalam dua tahap, di mana struktur yang lebih tua masih dapat ditemukan dalam kondisi relatif utuh di bagian dalam bangunan.

Sementara itu, struktur yang lebih baru dibangun di atasnya, menutupi bangunan lama dan mencerminkan lapisan sejarah yang tersimpan di balik arsitekturnya.

3. Candi Gedong I dan II

Berada di sisi barat Candi Gumpung, Candi Gedong I dan II sering dijuluki 'Candi Gudang Garam' karena konon dulunya digunakan sebagai tempat penyimpanan garam. Kawasan ini ter-

diri dari dua bangunan candi yang telah mengalami proses pemugaran.

Selama pemugaran, ditemukan berbagai benda bersejarah seperti perhiasan kuno, mangkuk keramik, arca, dan lainnya. Salah satu temuan penting adalah arca Dwarapala, penjaga pintu gerbang.

Tapi sayangnya arca penjaga hanya ditemukan satu, padahal seharusnya arca ini berpasangan.

4. Candi Kedaton

Terletak di tepi jalan utama menuju Candi Gumpung, Candi Kedaton menjadi salah satu titik penting dalam kawasan ini. Di bagian depan kompleks, terdapat sebuah jembatan yang mengarah langsung ke bangunan candi.

Di dalam kawasan ini terdapat sekitar sepuluh reruntuhan bangunan, termasuk candi utama, mandapa, gerbang, serta bangunan perwara yang lebih kecil.

Dikelilingi oleh tembok batu bata setinggi kurang lebih dua meter, kawasan ini juga dipenuhi oleh pohon-pohon besar yang menciptakan suasana alami dan teduh.

Salah satu temuan penting di sini adalah sepasang makara bertuliskan aksara Jawa Kuno, yang isinya mengindikasikan bahwa tempat ini dahulu digunakan sebagai lokasi meditasi oleh seorang tokoh spiritual bernama Mpu Kusuma.

5. Candi Astano

Nama Candi Astano berasal dari keberadaan sejumlah makam di dalam kawasannya, yang menurut cerita masyarakat setempat merupakan makam para raja.

Kawasan ini memiliki dua candi perwara serta koleksi peninggalan sejarah berupa 14 fragmen arca batu dengan beragam bentuk dan ukuran, satu pipisan batu, satu lesung batu, manik-manik dari kaca dan batu, serta pecahan tembikar dan keramik dari berbagai jenis. Keseluruhan temuan ini mencerminkan kekayaan budaya dan spiritual yang terkandung di dalam situs ini.

Harga tiket masuknya pun sangat ramah: mulai dari Rp8.000 per orang. Kompleks candi buka setiap hari pukul 08.00–18.00, memberi kesempatan bagi siapa pun untuk menikmati udara segar, keheningan, serta jejak gemilang masa lalu yang masih tersisa. ●

RS Siloam Sriwijaya STANDAR BARU PELAYANAN KESEHATAN KELAS ATAS DI SUMATERA SELATAN

Kehadiran Rumah Sakit Siloam Sriwijaya di Kota Palembang, Sumatera Selatan, menjadi solusi pelayanan kesehatan dengan tenaga medis, teknologi, hingga fasilitas kelas atas.

RS Siloam Sriwijaya menyediakan beragam layanan kesehatan, terutama layanan kebidanan dan kandungan, spesialis anak, penyakit dalam, dan radiologi. Rumah sakit ini telah dilengkapi dengan teknologi kedokteran yang canggih dan tim medis dan yang berpengalaman.

Tertletak di jantung Kota Palembang, Siloam Hospitals Sriwijaya Palembang terkenal sebagai pusat layanan kesehatan andalan bagi masyarakat Kota Palembang dan kota-kota lain di sekitarnya.

Pelayanan super canggih dimiliki RS Siloam Sriwijaya seperti Klinik Blastula IVF bayi tabung, layanan khusus anak Palembang Integrated Child Center (PICC), Kardiologi (Layanan Jantung) dan Laparoskopi TRIDI PORKE (operasi dengan alat cang-

gih).

Direktur RS Siloam Sriwijaya Palembang NS Benedikta Bawaningtyas, S.Kep, MM mengatakan, pelayanan-pelayanan super canggih lengkap. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Dari fasilitas, tenaga medis yang kita miliki tidak kalah canggih dengan Rumah Sakit luar negeri. Jadi masyarakat tidak perlu jauh, datang saja ke RS Siloam Sriwijaya," katanya saat berkunjung ke kantor infosumsel.id.

NS Benedikta Bawaningtyas menjelaskan empat pelayanan unggulan dari RS Siloam Sriwijaya Palembang, yakni:

1. Klinik Blastula IVF Bayi Tabung RS Siloam

RS Siloam Sriwijaya memiliki Klinik Blastula IVF Bayi Tabung sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2021 sampai sekarang tahun 2025.

"Skala keberhasilan di nasional untuk bayi tabung hanya 35 persen. Kalau Klinik Blastula IVF Bayi Tabung RS Siloam Sriwijaya Palembang sudah melebihi skala keberhasilan Internasional di angka 67 persen melewati 50 persen,"ucapnya.

Untuk biaya program bayi tabung sendiri bervariasi mulai dari Rp 67 juta sampai Rp 150 juta. Calon ayah dan ibu bisa melakukan konsultasi untuk mendapatkan harga yang sesuai berdasarkan hasil

pemeriksaan.

"Biaya program bayi tabung pada kisaran mulai dari Rp 67 juta hingga Rp 150 juta, sebelum memutuskan untuk menjalani program bayi tabung, calon ayah dan ibu dapat melakukan pemeriksaan sehingga biaya yang diperlukan tergantung dari hasil pemeriksaan tersebut,"kata Tata nama sapaan akrab NS Benedikta Bawaningtyas, S.Kep, MM.

RS Siloam Sriwijaya Palembang sendiri sudah tercatat melahirkan bayi tabung ke-500 pada Senin 8 September 2025.

Bayi ke-500 ini merupakan bayi dari pasang Ayu Paramitha (34) dan Anugrah Aji Prawira (35). Mereka berhasil mendapatkan bayi laki-laki yang lahir pada Senin 8 September 2025 dengan berat badan 3,3 kilogram dan panjang 49 cm, melalui metode blastula transfer atau sebuah teknik IVF yang menggunakan embrio pada tahap blastula atau hari ke 5 hingga ke 6 perkembangan.

Keberhasilan ini menandakan makin banyak pasangan yang berani memanfaatkan teknologi medis modern untuk mengatasi masalah kesuburan. Dulu dianggap mewah dan langka, kini bayi tabung semakin diterima masyarakat luas sebagai salah satu solusi aman efektif.

"Alhamdulillah bayi ke 500 menjadi bukti nyata bahwa dengan teknologi yang tepat, tim medis yang berpengalaman dan doa, keajaiban kehidupan bagi pasangan yang ingin punya anak," ujar Head Klinik Blastula IVF, dr. M. Aerul Chakra, Rabu 10 September 2025.

Menurut Cakra, hampir empat tahun terakhir tingkat keberhasilan program bayi tabung di RS Siloam Sriwijaya sudah mencapai 64 persen. Pencapaian ini berkat dukungan teknologi yang terus upgrade dengan prosedur berbasis evidence serta pendekatan holistik kepada pasien.

Salah satu unggulan Blastula IVF Center adalah sudah memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam proses pemilihan embrio terbaik menjadikannya sebagai salah satu pelopor penerapan AI dalam dunia IVF di Indo-



nesia.

"Begitu ada teknologi terbaru, kami langsung aplikasikan. Kami tidak ingin tertinggal dan akan terus meng-upgrade layanan kami untuk hasil yang optimal," ungkapnya.

Cakra menyebut dengan terus meng-upgrade teknologi, hingga 4 tahun berjalannya Klinik Blastula IVF ini sudah banyak pasien yang dilayani bukan hanya dari Sumatera Selatan tapi di luar Sumsel juga.

"Ada pasien yang dari Sulawesi, Kalimantan hingga Papua yang datang untuk melakukan Blastula IVF ini, untuk luar negeri juga ada mulai dari Malaysia, Thailand, Arab Saudi, Kanada, hingga Amerika Serikat," ucapnya.

2. Palembang Integrated Child Center (PICC)

Klinik ini menyediakan layanan kesehatan khusus anak yang terintegrasi dalam satu area dan didukung oleh berbagai dokter spesialis anak termasuk spesialis kedokteran gigi serta layanan fisioterapi, laboratorium, dan farmasi atau obat-obatan untuk anak.

Kebutuhan kesehatan antara pasien dewasa dan anak tentunya berbeda, untuk itulah klinik ini khusus menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh anak, antara lain klinik tumbuh kembang, klinik rehabilitasi medis, terapi wicara dan okupasi, serta klinik psikologi dan akupunktur.

Layanan medis ini juga didukung oleh puluhan dokter spesialis anak dan sub-spesialis, termasuk spesialis urologi dan andrologi yang akan berkolaborasi untuk penanganan sakit pada anak.

Tata menjelaskan, kenapa PICC kita pisahkan karena anak-anak memiliki imun berbeda dengan dewasa. PICC layanan kesehatan lengkap untuk anak-anak.

"Layanannya semuanya ada disitu mulai dari konsultasi dokter spesialis dan sub spesialis semuanya ada disana. Termaksud juga butuh fisioterapi juga khusus pediatri anak sudah ada di PICC sampai untuk pengambilan obat. Kita pisahkan juga dengan pasien dewasa jangan sampai tertular dengan pasien lain," ungkapnya.

"Disana juga ada area bermain biar ketakutan anak lebih minimal. Biasa anak kalau mau ketemu dokter takut," sambungnya

3. Kardiologi (layanan jantung)

Tata menyebutkan penyakit jantung sangat berbahaya apabila tidak dideteksi secara dini. Bukan hanya hitungan jam dan detik pasien bisa meninggal dunia hanya dalam hitungan detik.

"Makanya kita juga ada pelayanan kardiologi super lengkap. Sebab penyakit jantung harus segera di atasi jangan sampai terlambat. Bahkan kita juga banyak mendapatkan pasien dibawah umur 30 tahun, penyakit jantung tidak hanya dialami orang tua saja," tuturnya

Disebutkannya gejala penyakit jantung itu bisa dirasakan nyeri dada dan rasa berat dibelakang punggung.

"Kalau merasakan itu langsung saja periksa ke IGD RS Siloam Sriwijaya

menggunakan kamera khusus, mirip seperti menonton film 3 dimensi.

Teknik ini menggunakan sayatan kecil (lubang kunci) untuk memasukkan alat-alat bedah seperti kamera dan instrumen lainnya, sehingga meminimalkan trauma pada pasien, mempercepat pemulihan, dan mengurangi rasa sakit.

"Di RS Siloam Sriwijaya Palembang kita ada TRIDI PORKE proses operasi minim sayatan. Bahkan proses operasi dilakukan melalui pusar. Jadi tidak ada sama sekali sayatan benar-benar canggih. Jadi tidak perlu ke luar negeri bisa langsung ke RS Siloam Sriwijaya Palembang saja," kata Tata

Tata menyebutkan proses operasi beda dengan Laparoskopi TRIDI PORKE berdampak sangat baik untuk



Palembang. Layanan jantung itu sangat penting sekali karena tidak ada yang tahu kapan penyakit jantung menyerang, mengingat gaya hidup dan pola hidup jadi factor penyebab," ungkapnya.

Dia menjamin pelayanan Kardiologi RS Siloam Sriwijaya Palembang tidak perlu diragukan. Tata mengklaim dari 41 RS Siloam di Indonesia RS Siloam Sriwijaya Palembang bahkan yang terbaik

" Dari 41 RS Siloam kita menjadi multidisiplin mulai dari RS, staf sampai dokter jaga paramedis sampai psikoterapi. Kalau sudah sembuh kita juga ada psikoterapi, biar tidak ada efek lain setelah pasien sembuh seperti kelumpuhan," jelasnya

4. Laparoskopi TRIDI PORKE

TRIDI PORKE adalah sebutan salah untuk teknik bedah laparoskopi 3 dimensi, yang memungkinkan visualisasi organ dalam perut dengan detail tinggi

pasien. Sebab dengan alat super canggih itu pasien bisa pulih dengan cepat.

"Kalau operasi menggunakan Laparoskopi TRIDI PORKE tidak ada sayatan. Jadi proses pemulihannya cepat pasien bisa cepat sembuh," jelasnya.

Gubernur Sumsel, H Herman Deru menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada keramahan dan kenyamanan pasien. Ia menilai bahwa aspek humanis merupakan kunci penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan.

Pemerintah akan terus mendukung RS Siloam Sriwijaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Sumsel. Herman Deru berharap bahwa RS Siloam dapat menjadi contoh bagi rumah sakit lain dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. ●



RAMAI-RAMAI MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN

Indonesia mengupayakan para pekerja migran dan keluarganya di dalam negeri lebih sejahtera. Salah satunya dengan cara meningkatkan literasi keuangan di saat gelombang kejahatan keuangan dalam jaringan terus merajalela.

Kejahatan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam jaringan internet menjangkau pula para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Rendahnya literasi keuangan dan maraknya penipuan digital menjadi ancaman nyata

lakukan.

Untuk melindungi para pekerja migran, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia turun tangan meningkatkan literasi keuangan para pencari nafkah di luar negeri ini. Inisiatif tiga lembaga ini berbentuk buku saku literasi keuangan bagi pekerja migran Indonesia.

Inisiatif ini bertujuan meningkatkan literasi finansial dan melindungi PMI dari penipuan serta pengelolaan uang kurang bijak. Banyak PMI, meskipun berperan sebagai pahlawan devisa, rupanya belum memiliki pemahaman memadai dalam mengelola pendapatan mereka secara efektif dan berkesinambungan. Terlebih lagi jika para pekerja di luar negeri itu menjadi kor-

hindar dari berbagai bentuk penipuan. Selain itu, buku ini juga menjadi panduan praktis bagi PMI supaya mampu mengelola pendapatannya secara bijak, menekan perilaku konsumtif, dan mulai mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk hal-hal yang produktif seperti tabungan, usaha kecil, atau investasi aman.

"Kita lakukan launching buku saku literasi sebagai panduan, sebagai acuan bagi para pekerja migran Indonesia agar lebih bijak menggunakan keuangan," ujar Menteri P2MI Mukhtarudin dalam acara yang berlangsung pada Senin, 10 November 2025 di Gedung Puri Ardhya Garini, Jakarta. Ia menambahkan, melalui buku ini PMI diberikan edukasi serta berbagai pilihan investasi yang mudah dijangkau, seperti pembelian emas di Pegadaian hingga akses investasi ke Bursa Efek Indonesia.

Tujuannya, kata Pak Menteri, agar pekerja migran dan keluarganya tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi jangka panjang. Ia menegaskan pula, peluncuran buku saku ini merupakan bentuk nyata tanggung jawab negara terhadap PMI. "Ini bentuk kepedulian pemerintah," ujarnya.

Menteri P2MI menjelaskan, peluncuran buku ini didasari oleh banyaknya kasus penipuan yang menjerat PMI di luar negeri. Identitas dan akses rekening mereka kerap digunakan untuk berbagai tindak kejahatan seperti menipu, judi online, hingga pinjaman fiktif oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, banyak pekerja migran harus berhadapan dengan hukum di negara tempat mereka bekerja.

Sedangkan kolaborasi KP2MI dengan OJK dan BI, dianggap menjadi bukti sinergi dalam memperkuat literasi finansial bagi masyarakat pekerja migran. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widayarsi Dewi, menyebutkan kerja sama lintas lembaga ini sebagai wujud nyata kepedulian terhadap



bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Banyak dari mereka kehilangan uang hasil kerja keras atau bahkan terseret masalah hukum akibat penyalahgunaan data pribadi.

Dari catatan yang terekam oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagian besar kasus bermula dari kepercayaan yang disalahgunakan. Banyak pekerja migran tanpa sadar meminjamkan identitasnya hingga akhirnya terseret utang bahkan penipuan yang tidak mereka

ban kejahatan keuangan, termasuk keluarganya yang berada di kampung halaman. Misalnya menjadi korban penipuan investasi ilegal.

Kian maraknya kasus penipuan, penyalahgunaan data pribadi, serta pengelolaan pendapatan PMI yang masih bersifat konsumtif, yakni mencapai sekitar 70 persen dari total penghasilan, pun menjadi pendorong terbitnya buku saku ini. Buku saku tersebut berfungsi sebagai acuan agar PMI ter-

peningkatan kesejahteraan PMI.

"Ini juga untuk pegangan Mas Mbak semua di sana, dibaca," ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa, "Financial literacy itu adalah essential life skill yang harus dimiliki oleh semua orang, termasuk Mas-Mbak semuanya di sini," kata Friderica di depan para pekerja migran yang siap berangkat kerja ke luar negeri.

Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Anton Daryono BI, menjelaskan bahwa buku ini disusun dengan bahasa yang ringkas dan mudah diterapkan oleh PMI di mana pun mereka berada. Ia berharap buku saku tersebut dapat menjadi teman sehari-hari dalam pengelolaan keuangan dan bisa membentuk kebiasaan finansial yang sehat.

Kepada para pekerja migran dan keluarganya, ia mengingatkan agar senantiasa melindungi data pribadi mereka, terutama di media sosial. "Simpan dan lindungi data pribadi, jadi tolong agar bijak dalam bermedia sosial," ujarnya.

Peluncuran buku saku ini melengkapi arah besar transformasi KP2MI terhadap perlindungan pekerja migran yang tidak hanya mencakup aspek hukum dan penempatan kerja, tetapi juga kemandirian finansial serta kesejahteraan ekonomi keluarga PMI. Sinergi antara KP2MI, OJK, dan BI ini menandai komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem Pekerja Migran Indonesia yang cerdas finansial, berdaya saing global, dan terlindungi dari hulu hingga hilir.

Friderica menjelaskan bahwa edukasi yang diberikan juga mencakup perencanaan keuangan sederhana. "Intinya kita ngajarin mereka, pertama ngelola keuangan. Tadi Pak Menteri bilang jangan konsumtif ya. Berapa besar kita gunakan untuk pengeluaran kirim ke keluarga, keluarga juga diajarin jangan konsumtif," terangnya.

Ia menambahkan, literasi keuangan ini juga mengenalkan berbagai pilihan instrumen legal yang bisa diakses PMI, mulai dari pembelian emas di Pegadaian, investasi saham melalui Bursa Efek Indonesia, hingga kredit keluarga dari perbankan nasional. Edukasi ini diharapkan mampu mengubah cara pandang pekerja migran terhadap uang, dari sekadar alat konsumsi menjadi sarana membangun masa depan

keluarga.

Harap maklum, sumbangan devisa para pekerja migran memang layak diperhitungkan. Menteri Mukhtarudin, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), sejak 2024 hingga November 2025, jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia telah mencapai 534 ribu orang, dengan

ahun 2024 mencatat remitansi mencapai Rp 600 triliun atau sekitar 30 persen dari total PDB nasional negara tersebut.

"Kalau dibandingkan dengan Philipines jauh Bu, Philippines sudah Rp 600 triliun tahun 2024. Karena mereka tadi terstruktur, by system. Dari SD sudah mulai dipersiapkan edukasi tentang pekerja migran. Mulai SD sudah terkurikulum.



total remitansi sebesar Rp 253,9 triliun. Sementara, untuk tahun 2025, sudah tercatat 233 ribu penempatan PMI baru dengan remitansi sekitar Rp 136 triliun.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), remitansi PMI berkontribusi sekitar 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjadikannya salah satu sumber devisa nonmigas yang paling stabil. Meski demikian, kata Mukhtarudin, angka tersebut masih jauh di bawah Filipina, yang pada ta-

Nah kita baru mau mulai," ungkapnya

Ia menegaskan, potensi ekonomi pekerja migran Indonesia sangat besar. Dengan tata kelola yang lebih baik, sistem pelatihan yang terarah, dan dukungan penuh pemerintah, kontribusi PMI terhadap perekonomian nasional bisa meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Itu juga mengapa literasi keuangan menjadi penting untuk pekerja migran dan keluarganya. ●



KEJAGUNG BONGKAR BOROK INVESTASI TELKOM KE GOTO

Kejaksaan Agung akhirnya mengakui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sudah membuka penyelidikan dugaan korupsi pada keputusan investasi PT Telkom Indonesia (TLKM) di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Akan tetapi, korps adhyaksa tersebut masih menutup rapat perkembangan penyelidikan tersebut.

"Terkait investasi Telkom ke GoTo masih penyelidikan. Jadi masih tertutup," kata Kepala Pusat Penanganan dan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, Senin, 10 November 2025.

Kabar pengusutan dugaan korupsi tersebut terkuak usai kejaksaan mengusut dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi pada 2020-2022. Pada saat itu, penyidik sempat tiba-tiba menggeledah kantor GoTo dan memeriksa sejumlah mantan petinggi startup tersebut. Namun belum pernah menjelaskan secara detail apa kaitan GoTo dengan kasus yang merugikan negara Rp1,9 triliun.

Berdasarkan dokumen Nota Dinas berkop Kejaksaan Agung bertanggal Maret 2023, jaksa menduga ada perbuatan melawan hukum dalam investasi tersebut.

"Berdasarkan analisis data dan infor-

masi yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan terkait, diduga terdapat perbuatan melawan hukum dalam kegiatan investasi Telkom melalui PT Telkomsel dalam pembelian saham GoTo," bunyi kesimpulan telaah jaksa itu.

Dalam telaah Kejaksaan, jaksa menyoroti sejumlah hal yang memperkuat dugaan pelanggaran. Salah satunya, Gojek belum pernah mencetak laba sejak berdiri pada 2010.

"Diduga investasi dilakukan tanpa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)," tertulis dalam dokumen tersebut.

Jaksa mencatat adanya indikasi konflik kepentingan yang melibatkan pejabat penyelenggara negara maupun direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, jaksa juga menyoroti perubahan aturan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelang IPO GoTo. Dalam Keputusan Direksi Nomor Kep-00101/BEI/12-2021, BEI melonggarkan syarat laba bersih bagi perusahaan yang ingin tercatat di

papan utama.

“Diduga dalam proses IPO GoTo terdapat intervensi kekuasaan yang besar dengan adanya revisi aturan BEI tentang pencatatan saham bagi perusahaan teknologi,” tulis jaksa.

Berdasarkan telaah tersebut, tim jaksa merekomendasikan penerbitan surat perintah penyelidikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampid-sus) untuk menelusuri dugaan korupsi dalam investasi Telkomsel ke GoTo.

Keputusan investasi Telkomsel di Gojek pada 2020 memang sempat mendapatkan sorotan di masyarakat karena besarnya investasi tersebut. Sebagian mempertanyakan apakah aksi korporasi tersebut sudah memperhitungkan mitigasi yang matang dan mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan di balik keputusan itu. Bahkan, pada Agustus 2022, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat sempat melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) panitia kerja untuk menganalisis aksi korporasi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman, menjelaskan kronologi keputusan investasi itu. Aksi korporasi kedua entitas bermula pada 16 November 2020, di mana Telkomsel melakukan transaksi investasi pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam bentuk convertible bond (CB) tanpa bunga sebesar USD150 juta (atau sekitar Rp2,1 triliun dengan asumsi kurs saat itu) yang akan jatuh tempo pada 16 November 2023. Dalam perjanjiannya, Telkomsel memiliki opsi untuk membeli tambahan saham PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebesar USD300 juta (sekitar Rp4,3 triliun).

Pada 17 Mei 2021, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melakukan penggabungan (merger) dengan Tokopedia yang menyebabkan convertible bond milik Telkomsel dikonversi menjadi saham PT Gojek Tokopedia Tbk (GoTo). Convertible bond akan dikonversi menjadi saham sesuai dengan perjanjian pemesanan saham.

Pada 18 Mei 2021, convertible bond sebesar USD150 juta (Rp2,1 triliun) tersebut dikonversi menjadi saham GoTo. Telkomsel juga melaksanakan opsi beli yang dimiliki untuk membeli tambahan saham GoTo sebesar USD300 juta (Rp4,3 triliun), yang dikonversi juga men-

jadi saham sebagai kelanjutan convertible bond pada 2020. Sehingga, total kepemilikan saham GoTo oleh Telkomsel sebesar 89.125 lembar saham (sebelum stock split) dengan nilai sebesar USD450 juta (Rp6,4 triliun).

Lebih lanjut, menyitir laporan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk, induk usaha Telkomsel, terdapat kerugian yang

Investasi TLKM di GOTO dilakukan melalui Telkomsel. Berdasarkan laporan keuangan kuartal I-2025, Telkomsel menilai wajar investasi di GOTO masing-masing Rp83 per saham dan Rp70 per saham masing-masing di periode 31 Maret 2025 dan 2024.

Sehingga, jumlah keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai



belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel pada GoTo sebesar Rp881 miliar per 31 Maret 2022. Padahal, pada saat itu, Telkomsel menggunakan penilaian bahwa nilai wajar investasi di GoTo dengan menggunakan nilai penawaran saham pada saat initial public offering (IPO) sebesar Rp338 per saham.

Bahkan hingga 2025, Investasi PT Telkom Indonesia di GOTO belum sepenuhnya menguntungkan. Ini menjadi alasan perusahaan akan terus mengevaluasi investasinya tersebut.

wajar investasi Telkomsel pada GOTO untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp308 miliar. Sementara, jumlah kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar untuk periode 2024 sebesar Rp403 miliar.

Masih Ditelusuri

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Anang Supriatna, menegaskan, perkara investasi Telkom ke GoTo tersebut belum masuk tahap penyidikan. Pada tahap ini penyidik belum dapat

memastikan unsur pelanggaran.

"Pendalaman di penyelidikan belum bisa dikatakan ada indikasi. Itu baru dugaan, dan sifatnya berbeda dengan penyidikan," ujarnya di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin, 17 November 2025.

Menurut Anang, Jaksa sedang memverifikasi temuan awal dan menguji kembali laporan yang masuk. Apakah benar atau tidaknya peristiwa tindak pidana dalam proses investasi anak perusahaan Telkom tersebut.

"Dari hasil kajian dan laporan, diperiksa lagi, benar tidak ada peristiwa tindak pidananya?" kata dia.

Anang menyebut proses ini men-

nyelidikan memang bertujuan memastikan apakah dugaan awal cukup kuat untuk naik tingkat.

"Penyelidikan itu masih perlu pendalaman, apakah perkara ini bisa naik, peristiwa pidananya seperti apa, ada atau tidaknya tindak pidana," kata Anang.

Hingga kini, Kejaksaan Agung belum menyampaikan target waktu atau perkembangan baru dari penelusuran investasi Telkomsel ke GoTo tersebut.

Siapa Diuntungkan?

Mengapa Telkom berinvestasi pada perusahaan yang tak pernah untung? Kejaksaan Agung yang menyelidik inv-

konsultan hukum IPO GoTo.

Tak boleh dikesampingkan pula Pandu Sjahrir yang saat itu menjadi Komisaris Bursa Efek Indonesia. Pandu pernah mengempit saham Gojek dan menjadi komisarisnya. Ketika Gojek dan Tokopedia bermerger, dia menjabat Komisaris Utama GoTo Financial, anak usaha GoTo.

Dokumen Kejaksaan juga menunjukkan bahwa Toba Bara, perusahaan yang terafiliasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ketika itu, Luhut Binsar Pandjaitan, paman Pandu, merupakan salah satu pemilik saham PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang menaungi Gojek.

Konflik kepentingan itu menyebabkan keputusan investasi Telkom patut diduga tidak didasari prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Karena itu, mencuat tuduhan Telkom "dipaksa" masuk ke GoTo untuk menyelamatkan investor lama.

Karpet merah juga dibentangkan kepada GoTo saat naik ke lantai bursa.

Jika memakai aturan lama, GoTo tak akan tercatat pada papan utama karena perusahaan ini belum pernah untung, setidaknya setahun terakhir.

Bursa Efek Indonesia mengubah aturan tersebut. Meski masih rugi, GoTo boleh menawarkan sahamnya di bursa. Kejaksaan menyatakan perubahan tersebut terjadi karena ada "pengaruh kekuasaan yang besar", yang merujuk pada nama-nama bos besar itu.

Poles-poles nilai perusahaan juga dilakukan dengan menambahkan goodwill, aset tak berwujud yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Hasilnya, total aset GoTo melonjak dari sekitar Rp30 triliun menjadi kurang-lebih Rp 148 triliun. Angka yang fantastis itu mengecoh investor awam. Kenyataannya, fundamen perusahaan keropos. Hingga triwulan III tahun ini pun GoTo masih rugi Rp775 miliar.

Mereka yang menjerumuskan Telkom lewat penempatan dana Telkomsel di Gojek ataupun GoTo harus bertanggung jawab. Sudah sepantasnya para pemegang saham lama yang



cakup pengecekan aspek tata kelola, potensi benturan kepentingan, hingga kesesuaian prosedur. Namun ia enggan merinci temuan maupun arah pengusutan.

Ketika ditanya soal dokumen nota dinas internal Kejaksaan Agung yang terbit pada 2023, Anang menegaskan bahwa penyelidikan membutuhkan proses kehati-hatian. Sebab, tahap pe-

estasi ini sejak 2023 menengarai adanya konflik kepentingan lantaran afiliasi sejumlah pihak dalam transaksi tersebut.

Yang paling jelas adalah hubungan pengusaha Garibaldi Thohir, yang ketika itu menjabat Komisaris Independen Gojek dan belakangan Komisaris Utama GoTo, dengan adiknya, Menteri BUMN, Erick Thohir. Lalu, ada Bono Daru Adji, Komisaris Telkom saat itu yang menjadi

hengkang lebih dulu membeli kembali saham GoTo di Telkomsel dengan harga awal. Jika tidak, duit Telkomsel akan terus tersandera di GoTo dan timbulnya kerugian negara tinggal menunggu waktu.

Segala kerumitan ini disebabkan pula oleh ciutnya nyali Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga pengawas ini tak mencegah GoTo melantai di bursa meskipun banyak kejanggalan. Konflik kepentingan yang terang benderang juga tak membuat OJK bergerak. Akibatnya, Telkom berada di tubir kerugian dan investor publik pun tak terlindungi.

Konflik Kepentingan dan Afiliasi

Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung periode 2009-2010, Jasman Panjaitan, menekankan, setiap perusahaan terbuka harus berhati-hati dalam berinvestasi.

“Kuncinya di sini adalah hati-hati.

Jangan sembarangan yang mengakibatkan kerugian negara,” ujar Jasman dikutip dari siaran Kompas TV, Selasa, 18 November 2025.

Jasman menjelaskan, kerugian negara yang disebabkan oleh ketidakhati-hatian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, di mana terdapat unsur mens rea (niat jahat) yang diwujudkan dalam bentuk actus reus (investasi yang tidak hati-hati).
M e n u -

rutnya, seluruh jajaran direksi berpotensi untuk diperiksa terkait dugaan ketidakhati-hatian ini.

Jasman juga menambahkan, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk memperluas pemeriksaan, termasuk melibatkan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan diduga mengintervensi atau memengaruhi keputusan investasi Telkomsel, bahkan hingga menyentuh pihak

berupa hubungan keluarga, atau adanya posisi jabatan yang sama di kedua entitas.

Yanwar mengungkapkan, kerugian yang belum direalisasi atas investasi portofolio Telkomsel di GoTo sudah dicatatkan sebagai penurunan nilai (impairment).

“Total sekarang yang sudah dicatatkan rugi itu sekitar Rp5,2 triliun,” ungkap



yang disebutkan sebagai intelektual dader (pelaku intelektual).

Dari sudut pandang pasar modal, pengamat pasar modal, Yanwar Rizki, menyoroti aspek perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Menurutnya, pelanggaran dapat terjadi jika terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan konflik kepentingan.

“Ada unsur berikutnya lagi adalah ada yang diuntungkan atau ada yang dirugikan,” kata Yanwar.

Kerugian ini ditanggung oleh publik, sementara kerugian bagi negara menjadi ranah tindak pidana korupsi.

Indikasi adanya benturan konflik kepentingan diperkuat dengan adanya hubungan afiliasi antara para pejabat di boardroom Telkom/Telkomsel dengan pihak di GoTo. Afiliasi ini dapat

Yanwar.

Kerugian penurunan nilai investasi ini secara langsung berdampak pada laporan keuangan Telkom, yakni mengurangi laba usaha, yang kemudian berimbas pada berkurangnya potensi dividen yang disetorkan kepada pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, serta mengurangi potensi modal negara.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa investasi awal Telkomsel di GoTo berbentuk Obligasi Konversi Tanpa Bunga (zero-coupon convertible bond). Instrumen ini memberikan hak kepada Telkomsel untuk mengkonversikannya menjadi saham saat terjadi merger Gojek dan Tokopedia.

Aksi korporasi ini dinilai strategis karena membantu mendongkrak revaluasi harga saham GoTo dari Rp1 menjadi Rp270, menjadikannya transaksi material yang dilakukan menjelang proses IPO GoTo.

Baik Jasman maupun Yanwar sepakat bahwa fakta investasi dilakukan di perusahaan yang sebelum IPO sudah diketahui mengalami kerugian dapat menjadi poin penting dan dasar kecurigaan bagi Kejaksaan Agung dalam menjalankan penyelidikan. ●





DISKON BESAR TIKET TRANSPORTASI SAMBUT LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU

Pemerintah resmi memberlakukan Program Diskon Tiket Transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Promo diskon ini berlaku mulai 21 November 2025 guna mendorong mobilitas masyarakat selama liburan akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Insentif ini diberikan kepada masyarakat melalui penyediaan layanan transportasi yang lebih terjangkau.

"Mobilitas masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dioptimalkan selama masa libur Nataru 2025/2026 ini," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis, 20 November 2025.

Airlangga menjelaskan, program ini telah dipersiapkan sejak menjelang kuartal IV 2025. Seluruh persiapan teknis dibahas dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) dan disepakati pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakomis) Satgas P2SP yang digelar 20 November 2025 di kantor Kemenko Perekonomian.

Sebagai dasar pelaksanaan, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri/kepala

badan, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara. SKB tersebut menetapkan penugasan bagi BUMN transportasi untuk memberikan diskon tarif selama periode libur Nataru.

Untuk angkutan udara, diskon telah berlaku sejak akhir Oktober 2025 melalui PMK Nomor 71 Tahun 2025 yang memberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas jasa angkutan udara. Sementara diskon untuk kereta api, kapal laut, dan penyeberangan mulai berlaku serentak pada 21 November 2025 pukul 00.01 WIB. Diskon dapat digunakan untuk perjalanan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, kecuali kapal laut yang mulai mendapat diskon sejak 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Pada moda kereta api, PT KAI menyediakan diskon 30 persen untuk perjalanan kereta ekonomi komersil yang mencakup 156 kereta reguler dan 26 kereta tambahan. Kuota yang disiapkan mencapai 1.509.080 penumpang dan tiket dapat dibeli melalui seluruh kanal

penjualan resmi KAI.

Untuk angkutan laut, PT PelnI memberikan diskon 20 persen dari tarif dasar atau setara 16-18 persen dari harga tiket total. Diskon ditujukan bagi penumpang kapal kelas ekonomi. Diskon ini men-
 yasar lebih dari 405.881 ribu penump-
 ang dan tiket tersedia di seluruh kanal
 penjualan PelnI.

Pada sektor penyeberangan, PT ASDP Indonesia Ferry memberikan dis-
 kon berupa pembebasan 100 persen tar-
 if jasa kepelabuhanan. Diskon ini setara
 dengan pengurangan rata-rata 19 pers-
 en dari tarif terpadu dan berlaku pada
 delapan lintasan di 16 pelabuhan. Kuota
 yang disiapkan mencakup 227.560 pe-
 numpang dan 491.776 kendaraan atau
 setara dengan 2,34 juta penumpang. Tiket dapat dibeli melalui aplikasi Ferizy.

Untuk angkutan udara, maskapai menyediakan potongan harga berkisar 13-14 persen dari harga tiket. Diskon ini diperkirakan dinikmati sekitar 3,59 juta penumpang. Pemerintah juga memper-
 panjang jam operasi beberapa bandara
 untuk memperlancar mobilitas selama
 liburan.

Event Budaya

Adapun dalam rangka mendorong peningkatan mobilitas, Kementerian Pa-
 riwisata menyiapkan serangkaian kegia-
 tan di berbagai destinasi utama, seperti
 Jakarta, Yogyakarta, dan Bali.

Setidaknya terdapat 42 agenda dalam kalender pariwisata, mulai dari Festi-
 val Pesona Minangkabau di Sumatera
 Barat pada 4-6 Desember, JogjaROCK-
 arta Festival di Yogyakarta pada 6-7
 Desember, Festiloka Panggung Nusan-
 tara pada 26-31 Desember di Anjungan
 Sarinah Jakarta, hingga acara GWK Bali
 Countdown 2026 di Bali.

Sementara dari Kementerian Pendi-
 kan Dasar dan Menengah (Kemendik-
 dasmen) juga telah mengoordinasikan
 penetapan libur sekolah akhir tahun
 untuk menyelaraskan sektor pendidi-
 kan ikut mendorong perekonomian na-
 sional.

Berdasarkan pemetaan kalender pen-
 didikan, mayoritas provinsi telah men-
 etapkan libur semester ganjil antara 22
 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026.
 Kemendikdasmen juga akan menge-
 luarkan Surat Edaran untuk memam-

faatkan waktu libur dan menyampaikan
 pesan-pesan edukatif.

“Untuk mengoptimalkan Program Dis-
 kon Transportasi Nataru 2025/2026 ini
 perlu kepastian informasi Libur Sekolah
 Akhir Tahun 2025, sehingga para orang
 tua dapat merencanakan lebih awal
 liburan bersama anak-anak dan kelu-
 arga,” kata Airlangga.

Memastikan Mobilitas Masyarakat

Menteri Perhubungan, Dudy Purwa-

dengan meningkatkan kesiapan ar-
 mada, pengawasan keselamatan, dan
 koordinasi intensif di seluruh simpul
 transportasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Pur-
 baya Yudhi Sadewa mengatakan, dis-
 kon tarif merupakan implementasi dari
 anggaran stimulus senilai Rp180 miliar
 yang disediakan pemerintah.

“Kami memberikan diskon untuk
 transportasi Natal dan Tahun Baru to-
 talnya Rp 180 miliar. Untuk tiket kereta,



gandhi, menilai, sektor transportasi turut
 berperan menjaga stabilitas ekonomi
 dan kualitas pelayanan publik selama
 masa libur akhir 2025. Kemenhub
 berkomitmen menyediakan layanan
 transportasi terjangkau, berkeselamatan,
 aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Pihaknya bersama seluruh operator
 moda transportasi akan memastikan
 pergerakan masyarakat berjalan efektif

diskon angkutan laut, dan angkutan
 penyeberangan. Ada juga diskon tiket
 pesawat,” katanya.

Dengan ditekenya SKB empat men-
 teri/kepala badan, diskon tiket moda
 transportasi KA, angkutan penyeberan-
 gan, dan angkutan laut telah berlaku.
 Tiap moda memiliki ketentuannya mas-
 ing-masing untuk menikmati diskon ini.

PT KAI mengusulkan 182 kereta

• INFO EKONOMI

ekonomi yang mengakomodasi diskon tarif. Potongan harga ini berlaku untuk lintasan di Jawa dan Sumatera Utara.

Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, mengatakan, setidaknya ada 156 KA reguler yang beroperasi selama 20 hari, serta 26 KA tambahan selama 20 hari. Apabila dijumlahkan, terdapat 3.640 KA dengan potensi penerima manfaat sekitar 1,5 juta penumpang.

"Diskon diberikan untuk keberangkatan tanggal 22 Desember 2025-10 Januari 2026. Diberlakukan diskon sebesar

Ferry (Persero) akan memberikan diskon tarif hingga 19 persen dari total tarif bagi 227.000 penumpang dan 491.000 kendaraan. Upaya ini merupakan salah satu cara ASDP sebagai angkutan penyeberangan untuk menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

"Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati perjalanan akhir tahun dengan lebih terjangkau. Melalui stimulus tarif ini, ASDP berkontribusi memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membantu mendorong ak-



30 persen untuk kereta ekonomi komersial," kata Anne.

Beberapa kereta yang diusulkan adalah Malabar, Mutiara Selatan, Senja Utama Solo, Mataram, Lodaya, dan Sancaka yang beroperasi di lintasan Jawa. Untuk lintasan Sumatera Utara, KAI mengusulkan diskon tarif dikenakan pada KA Sribilah Utama yang melayani Medan-Rantau Prapat.

Sementara itu, PT ASDP Indonesia

ktivitas ekonomi dan wisata di sejumlah daerah," ujar Direktur Utama ASDP, Heru Widodo.

Dari angkutan penerbangan, PT Citilink Indonesia merupakan salah satu maskapai yang menerapkan diskon tarif tiket pesawat. Citilink telah memberikan diskon untuk pemesanan tiket pada 22 Oktober 2025 sampai 10 Januari 2026, dengan keberangkatan 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026. Transaksi

dapat dilakukan di seluruh kanal penjualan, termasuk situs web, aplikasi, dan mitra agen perjalanan.

Pergerakan Pesawat Meningkat

Pergerakan pesawat diprediksi meningkat pada masa libur Nataru kali ini. Pengawasan pun ditingkatkan terhadap berbagai risiko keselamatan penerbangan, seperti faktor cuaca ekstrem, abu vulkanik, balon udara, layang-layang liar, serta satwa liar di sekitar bandara.

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau AirNav Indonesia memproyeksikan puncak arus mudik jatuh pada 19-20 Desember 2025, sedangkan arus balik pada 3-4 Januari 2026.

Pada periode Nataru kali ini, pergerakan pesawat pun diperkirakan naik 3,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Arus pergerakan pesawat diproyeksikan mencapai 76.972 penerbangan selama 18 hari layanan khusus. Arus mudik dan arus balik sama-sama diperkirakan memakan waktu dua hari.

"Selama masa itu, intensitas penerbangan harian di seluruh bandara diperkirakan mencapai 4.300 hingga mendekati 5.000 pergerakan pesawat," ujar Direktur Utama AirNav Indonesia, Avirianto Suratno, dalam konferensi pers persiapan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bandung, Rabu, 12 November 2025.

Guna menghadapi masa libur mendatang, AirNav Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya mengoptimalkan peran Pusat Manajemen Jaringan Indonesia (INMC) untuk mengintegrasikan pengawasan dan koordinasi layanan di seluruh Indonesia selama 24 jam penuh.

Direktur Operasi AirNav Indonesia, Setio Anggoro, mengatakan, INMC merupakan pusat orkestrasi alur lalu lintas udara nasional yang dikelola AirNav Indonesia. Sejumlah langkah operasional juga dilakukan melalui penyesuaian kapasitas ruang udara, pengurutan keberangkatan dan kedatangan, koordinasi slot dan jam operasional bandara, serta penggunaan jalur udara alternatif.

"Melalui monitoring secara real-time, kami dapat menyesuaikan rute, kapasitas, dan urutan keberangkatan secara

cepat ketika terjadi lonjakan atau perubahan kondisi lapangan,” ujar Setio.

Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standardisasi AirNav Indonesia, Nurcahyo Utomo, mengemukakan, prioritas utama tetap pada standar keselamatan yang harus terjaga.

Alhasil, pengawasan ditingkatkan terhadap faktor cuaca ekstrem, abu vulkanik, balon udara dan layang-layang liar, serta satwa liar di sekitar bandara. Keamanan siber juga diperkuat melalui Pusat Operasi Keamanan (SOC) dan Tim Tanggap Keamanan Komputer (CISRT) yang siaga 24 jam.

Diskon Belum Diminati

Berdasarkan data survei Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi), saat musim puncak (peak season) mudik dan balik, kenaikan jumlah penumpang hanya mendekati 10 persen dibandingkan dengan rata-rata hari biasa pada tiga bulan terakhir masa normal (low season).

Meski demikian, jumlah penumpang yang beralih menggunakan pesawat karena adanya diskon hanya naik sebatas 2,9 persen dibandingkan dengan rata-rata hari biasa.

“(Hal) yang banyak terjadi justru pergeseran penumpang yang biasa naik maskapai berbiaya rendah (LCC) lalu pindah ke maskapai dengan layanan penuh (FSC). Ini karena selisih tarif batas atas antara FSC dan LCC hanya 15 persen,” tutur Ketua Umum Apjapi, Alvin Lie.

Fenomena itu menunjukkan insentif penurunan harga tiket tidak mengundang banyak penumpang baru. Selain itu, konsumen penerbangan lebih memaksimalkan kenyamanan dengan pengeluaran yang sama. Selama masa diskon, mereka yang biasanya menggunakan LCC dapat naik tingkat ke FSC.

Namun, secara umum, kenaikan jumlah penumpang tetap terbatas. Pengalaman masa berlibur tahun lalu, dengan adanya diskon, kenaikan jumlah penumpang hanya mendekati 15 persen dibandingkan dengan hari biasa.

“Sejauh ini, pemesanan tiket belum

menunjukkan kenaikan yang berarti. Saya khawatir, daya beli masyarakat masih belum pulih. Apalagi, biaya perjalanan tidak hanya harga tiket. Tarif hotel yang melonjak saat peak season menjadi tantangan tersendiri,” ujar Alvin.

Alvin mengatakan, tidak hanya persoalan daya beli, para pemangku kepentingan industri penerbangan ataupun penumpang juga perlu memperhatikan kondisi cuaca ekstrem. Aspek ini dapat berdampak pada keterlambatan bahkan pembatalan penerbangan.

bandara.

Hal serupa diutarakan pengamat penerbangan, Gatot Raharjo. Cuaca merupakan aspek terbesar yang harus diwaspadai dari sisi operasional. Saat periode Desember-Januari, curah hujan cenderung sangat tinggi, terkadang disertai angin kencang.

Ketika pesawat tidak dapat terbang karena faktor cuaca, petugas bandara perlu bersiap siaga menenangkan penumpang saat terjadi keterlambatan penerbangan. Maskapai juga dilarang memaksa pilot untuk tetap terbang kala



Alhasil, pengelola bandara perlu menyiapkan fasilitas untuk mengakomodasi kepadatan atau penumpukan penumpang. Penumpang juga perlu diedukasi. Sebagai contoh, ketika keterlambatan terjadi karena cuaca buruk, banjir, atau kepadatan lalu lintas bandara, mereka tidak berhak atas kompensasi keterlambatan. Hal ini penting disosialisasikan agar tidak terjadi kericuhan di

cuaca tidak kondusif.

“Aturan keselamatan tetap harus dilaksanakan walaupun konsekuensinya delay dan dapat merugikan maskapai,” kata Gatot.

Ia mengingatkan, maskapai perlu bekerja sama dengan pihak bandara untuk menyediakan tempat yang lebih representatif untuk penumpang demi mencegah kerumunan. Penumpang perlu dikondisikan agar tetap merasa nyaman saat menunggu penerbangan yang tertunda. ●

DAYA BELI BELUM PULIH, TARGET FLPP 2025 TERTEKAN

Pemulihan daya beli masyarakat yang masih tersendat menjadi tantangan terbesar bagi percepatan penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan bahwa melemahnya kemampuan belanja masyarakat berdampak signifikan terhadap pencapaian target penyaluran tahun ini.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan hingga 21 November 2025, total rumah subsidi yang tersalurkan melalui FLPP mencapai 223.279 unit, atau baru 63,38 persen dari target 350.000 unit.

"Faktor yang paling dominan adalah belum pulih sepenuhnya daya beli masyarakat," ujarnya.

Heru menjelaskan, kondisi tersebut tidak terlepas dari perlambatan laju ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 melemah dari 5,12 persen menjadi 5,04 persen, yang kemudian menekan konsumsi rumah tangga. Biasanya tumbuh di atas 5 persen, konsumsi periode tersebut hanya mencapai 4,89 persen.

"Data tersebut memperlihatkan bah-

wa daya beli masyarakat masih tertahan. Dengan kata lain, data ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih belum pulih. Perlu adanya upaya untuk mendorong konsumsi dan memperbaiki daya beli," tambah Heru.

Survei Konsumen Bank Indonesia turut menggambarkan tren serupa. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) merosot dari 123,5 pada 2024 menjadi 115 pada September 2025. Meski naik menjadi 121,2 pada Oktober 2025, tingkat kepercayaan konsumen dinilai masih belum solid.

Heru mengungkapkan bahwa paket stimulus pemerintah yang mencakup program 8+4+5 juga belum berhasil mendorong daya beli sesuai harapan.

Program tersebut meliputi delapan langkah akselerasi pada 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program penciptaan lapangan kerja.

"Dengan segala kondisi yang ada, BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih melakukan roadshow di



daerah-daerah yang memiliki potensi permintaan rumah subsidi yang tinggi," ujar Heru.

Langkah tersebut ditempuh untuk mengejar target FLPP 2025 yang ditetapkan mencapai 350.000 unit, sembari memperkuat koordinasi dengan pengembang dan bank penyalur.

Di tengah perlambatan, BP Tapera tetap optimistis penyaluran KPR FLPP akan menunjukkan tren positif menjelang akhir tahun. Sejak 2022, jumlah penyaluran terus mencatat rekor baru.

Per 21 November 2025, total penyaluran mencapai 223.279 unit dengan nilai Rp 27,72 triliun. BP Tapera bahkan memprediksi capaian akhir November akan melampaui rekor 2023 yang sebesar 229.000 unit.

Sebagai perbandingan, FLPP pada 2022 mencatat 226.000 unit (Rp 25,15 triliun), sementara 2023 mencapai 229.000 unit, dan 2024 berada di angka 200.300 unit (Rp 24,6 triliun).

"Tahun ini merupakan pencapaian luar biasa dalam penyaluran rumah subsidi. Jika dibandingkan realisasi pada 2023 dan 2024 dengan realisasi pada 2024-2025, ada peningkatan 10,99 persen," tegas Heru.

Dia juga melaporkan bahwa dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, total penyaluran FLPP mencapai 237.849 unit, ditambah 1.306 unit KPR Tapera, sehingga total keseluruhan penyaluran menjadi 239.165 unit.

Jabar Pimpin Penyaluran FLPP Nasional Capai 46.702 Unit per Oktober 2025

Program pembiayaan perumahan di Jawa Barat mencatat kinerja tertinggi secara nasional. Hingga 30 Oktober 2025, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di provinsi ini mencapai 46.702 unit, disusul capaian Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II yang merealisasikan Rp 137,27 miliar atau 80,37% dari total anggaran Rp 170,79 miliar tahun ini.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menjadi kontributor terbesar dalam penyaluran FLPP, yakni 23.241 unit atau hampir separuh dari total pen-

yaluran.

Capaian tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah dengan progres program perumahan rakyat paling tinggi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menyebut Jawa Barat sebagai "miniatur program PKP" karena seluruh inisiatif utama kementerian dijalankan di provinsi ini.

la mengapresiasi capaian BP3KP Jawa II yang mencatat serapan anggaran tertinggi di Kementerian PKP.

"Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran. Saya berharap kinerja ini terus dijaga agar manfaat program perumahan dapat dirasakan masyarakat secara luas," ujar Ara.

BP3KP Jawa II menargetkan realisasi anggaran mencapai 99,63% pada akhir



"Jawa Barat menjadi miniatur program PKP karena seluruh program hadir di sini, mulai dari BSPS, Bantuan PSU Perumahan bagi MBR, peningkatan kualitas permukiman kumuh dan sanitasi, rumah susun, hingga stok panel Risha untuk bencana," kata Ara dalam keterangannya, Jumat 31 Oktober 2025.

tahun dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan untuk mendukung pemerataan akses perumahan di Jawa Barat.

Sebelumnya, Menteri PKP menargetkan serapan anggaran kementeriaannya pada tahun 2025 dapat mencapai 95 - 96% hingga akhir tahun.

• INFO EKONOMI

Dia menyatakan, pemerintah juga telah menyepakati untuk mempertahankan suku bunga rumah subsidi di level 5 persen.

"Kita sepakat bunga rumah subsidi tidak naik dari 5 persen. Kita sepakat bahwa target itu harus bisa terserap tinggi. Saya usahakan betul akhir tahun ini 95 - 96 persen bisa tercapai," jelas Ara.

Menkeu Purbaya: Dana FLPP Akan Dialihkan Jika Penyerapan Rendah

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menarik kembali anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ta-

Maruarar Sirait (Ara). Ia menegaskan tidak akan membiarkan dana subsidi perumahan mengendap tanpa manfaat optimal bagi masyarakat maupun perekonomian.

"Saya yakin Menteri Perumahan akan mempercepat realisasi, karena mereka tahu kalau uangnya tidak terpakai, akan saya tarik dan distribusikan ke program lain yang lebih siap," imbuh dia.

Sebelumnya, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho melaporkan capaian serapan kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi tembus di 183.058 unit per 28 September 2025.

han Rakyat (BP Tapera) mendorong perbankan agar memberikan relaksasi bagi calon penerima Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang terkendala akibat catatan tunggakan kecil di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum dapat mengakses KPR subsidi karena tercatat memiliki tunggakan ringan, seperti pinjaman online (pinjol) maupun layanan paylater.

"Dia masuk klaster MBR dan belum



hun depan apabila realisasi penyaluran pada 2025 tidak optimal. Dana tersebut rencananya dialihkan ke sektor lain yang lebih siap dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kalau tidak terserap 100 persen, ya uangnya kita ambil lagi. Kita alihkan ke program lain yang lebih siap. Supaya perputaran uang bisa lebih cepat memberikan dampak ekonomi," kata Purbaya kepada wartawan sesuai menghadiri acara "Akad Massal Perumahan" di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin 29 September 2025.

Purbaya menyampaikan kebijakan ini sudah dikomunikasikan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Hal itu disampaikannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara akad massal 26.000 rumah subsidi di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor.

"Bapak Presiden yang kami hormati, di tahun 2025 dapat kami laporkan hingga 28 September penyaluran KPR Subsidi FLPP telah mencapai 183.058 unit rumah atau 52,3 persen dari target 350.000 (unit) dengan total realisasi pembiayaan sebesar Rp 22,72 triliun," jelas Heru.

BP Tapera Dorong Relaksasi KPR FLPP bagi Debitur dengan Catatan SLIK Ringan

Badan Pengelola Tabungan Peruma-

punya rumah, tetapi masih terkendala dengan tunggakan utang, baik karena pinjol maupun karena belanja online. Ini terus kita upayakan bersama perbankan," kata Heru usai konferensi pers capaian KPR FLPP di kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa 4 November 2025.

Heru menjelaskan, calon debitur yang memiliki catatan di SLIK OJK tetap bisa memperoleh fasilitas pembiayaan apabila telah melunasi kewajibannya. Dalam pengajuan KPR FLPP, pasangan suami istri diwajibkan melampirkan kartu keluarga (KK) sehingga status kredit keduanya akan turut diperiksa.

"Bisa jadi suaminya clear, tapi ternyata istrinya pernah melakukan transaksi

belanja online yang belum dilunasi. Itu menjadi tantangan juga," ujarnya.

Ia berharap perbankan dapat lebih fleksibel dalam menilai calon debitur, terutama bagi MBR yang telah menyelesaikan tunggakan kecilnya, agar tetap dapat memperoleh akses pembiayaan rumah melalui KPR subsidi.

Sebelumnya, Heru memaparkan, penyaluran KPR FLPP tembus 213.630 unit atau senilai Rp 26,51 triliun per 3 November 2025.

"Realisasi tersebut setara 61,03 persen dari target 350.000 unit rumah yang ditetapkan pemerintah tahun ini," kata Heru.

Adapun, pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi antara 39 bank penyalur dan 7.638 pengembang dari 22 asosiasi perumahan di 398 kabupaten/kota pada 33 provinsi.

"Kontribusi terbesar berasal dari Bank BTN dengan 104.326 unit rumah atau 48,83 persen dari total realisasi, disusul BTN syariah (44.434 unit/20,79 persen), BRI (22.709 unit/10,63 persen), BNI (10.052 unit/4,70 persen), dan Bank Mandiri (9.340 unit/4,37 persen)," papar Heru.

111.258 Calon Debitur KPR FLPP Masih Tertahan di Bank

BP Tapera mencatat sebanyak 111.258 calon debitur Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) masih tertahan di bank penyalur sejak 2022 hingga Agustus 2025.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, lamanya proses tersebut jauh di atas rata-rata normal pengajuan hingga akad yang hanya sekitar 59 hari.

"2 bulan lalu, kita sudah forward ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bahwa ada 111.258 data calon debitur yang belum diproses oleh bank dari 2022 sampai Agustus 2025. Ini belum diproses oleh bank di atas 6 bulan," kata dia.

Heru menambahkan, OJK kini melakukan pendalaman terhadap bank penyalur melalui mekanisme bank-on-bank. Data yang dimiliki BP Tapera bersifat detail, mencakup nama, alamat, hingga bank penyalur masing-masing calon debitur.

Ia menambahkan, hambatan tersebut salah satunya dipicu keterbatasan kuota pada periode 2022-2024.

"Kalau kuotanya sudah habis sampai dengan September, ya tidak bisa diproses," imbuh Heru.

BP Tapera menilai persoalan bankability debitur, utamanya akibat pinjaman

online (pinjol), masih menjadi tantangan utama dalam realisasi KPR FLPP.

Untuk itu, kata Heru, pihaknya terus berkoordinasi ke bank-bank penyalur dan OJK, sekaligus melakukan penguatan komunikasi dengan calon debitur untuk memastikan minat pengajuan KPR FLPP agar terserap optimal. ●





PALU PREROGATIF PRABOWO SAAT EKSEKUTIF MENGOREKSI YUDIKATIF

Dalam riak tahun pertamanya memimpin, Presiden Prabowo Subianto telah mengayunkan palu kekuasaan konstitusionalnya, bukan melalui undang-undang atau kebijakan fiskal, melainkan melalui instrumen yang paling mendasar dan istimewa: hak prerogatif.

Lebih dari sekadar keringanan hukuman biasa, serangkaian keputusan pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang ia keluarkan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun terakhir telah membuka kembali diskursus sengit tentang batas-batas keadilan, peran eksekutif dalam sistem hukum, dan tuntutan introspeksi bagi lembaga peradilan.

Sejak kursi kepresidenan ia duduki, Prabowo telah menggunakan hak istimewa ini pada sejumlah kasus hukum yang dinilai "janggal" atau mencederai rasa keadilan dalam prosesnya. Keputusan ini, yang secara politik sangat sensitif, tidak luput dari pertimbangan strategis, meskipun secara prosedural tetap memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA).

Amnesti dan Abolisi

Pada pertengahan 2025, tepatnya di

bulan Juli, Presiden Prabowo mengambil langkah yang mengejutkan dengan mengeluarkan surat keputusan yang menyentuh dua tokoh kunci dari spektrum politik yang berbeda. Keputusan ini, yang diumumkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menandai penggunaan otoritas eksekutif untuk mengintervensi vonis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan.

Presiden memberikan abolisi kepada Tom Lembong, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Tom Lembong terjerat kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada periode 2015-2016. Pengadilan telah menjatuhkan vonis bersalah dengan hukuman pidana 4,5 tahun penjara. Abolisi yang diberikan melalui Surat Presiden nomor R43/Pres/07.2025 ini secara efektif menghapus seluruh akibat hukum dari ppidanaan tersebut.

Pada waktu yang bersamaan, melalui surat Presiden bernomor R42/

Pres/07.2025, Prabowo juga memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, bersama dengan 1.116 orang lainnya. Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam perkara suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku.

Pengumuman amnesti dan abolisi ini segera memicu reaksi publik. Sufmi Dasco mengonfirmasi bahwa DPR telah menyetujui permintaan Presiden tersebut setelah melalui rapat konsultasi.

"DPR memberikan persetujuan atas permintaan tersebut. Salah satunya adalah permintaan abolisi terhadap Saudara Tom Lembong, dan amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto," ujar Dasco, menjelaskan proses ketatanegaraan yang mendahului keputusan tersebut.

Bagi pengamat, keputusan ini bukan hanya tentang pemulihan hak individu, tetapi juga manuver politik yang cerdas dalam menyeimbangkan kekuatan dan menegaskan peran eksekutif sebagai benteng terakhir keadilan.

Rehabilitasi Eks Direksi ASDP

Jika abolisi dan amnesti pada bulan Juli sudah cukup menghebohkan, keputusan rehabilitasi yang dikeluarkan pada akhir November 2025 kembali mengguncang dunia peradilan. Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi kepada tiga mantan petinggi PT ASDP: mantan Direktur Utama Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Harry Muhammad Adhi Caksono.

Kasus ketiga mantan petinggi PT ASDP ini berpusat pada perkara korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jemberan Nusantara (JN) oleh PT ASDP. Ira Puspadewi divonis bersalah dengan hukuman 4,5 tahun penjara, sementara Adhi Caksono dan Yusuf Hadi masing-masing divonis 4 tahun penjara.

Rehabilitasi ini kembali diumumkan bersama oleh Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan.

Dasco menuturkan, keputusan tersebut diambil setelah DPR menerima berbagai pengaduan dan aspirasi, yang

kemudian ditindaklanjuti dengan kajian oleh Komisi Hukum DPR sebelum diajukan permohonan kepada pemerintah.

Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan, keputusan Presiden didasarkan pada koordinasi dan kajian mendalam yang melibatkan Kementerian Hukum dan para pakar hukum.

"Dibicarakan dalam rapat terbatas, dan Bapak Presiden memberikan kepu-

masyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, melihat adanya persamaan pola antara vonis Ira Puspadewi dan Tom Lembong.

Menurut Yusril, kebijakan atau beleid yang diambil, sepanjang bebas dari niat buruk dan permufakatan jahat, seharusnya tidak dapat dinilai oleh pengadilan. Ini adalah yurisprudensi tetap dalam sistem peradilan pidana.

la khawatir, jika setiap kebijakan ber-



tusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan, kasusnya sudah berjalan cukup lama menimpa Dirut ASDP beserta beberapa orang jajaran di ASDP," terang Prasetyo.

Introspeksi Lembaga Peradilan

Kasus ASDP ini, bersama dengan kasus Tom Lembong, memperlihatkan suatu kecenderungan yang diakui oleh otoritas hukum tertinggi: pemidanaan atas kebijakan bisnis.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Lembaga Pe-

risiko dipidanakan sebagai korupsi, maka pejabat akan mengalami "risiko psikologis" dan takut mengambil keputusan, yang pada akhirnya dapat membuat negara berjalan di tempat.

"Kalau semua kebijakan ditipikorkan, para pejabat akhirnya tidak berani mengambil keputusan. Negara ini akan jalan di tempat," tegasnya.

Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso, memberikan pandangan yang lebih tajam. Baginya, rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo harus menjadi momentum bagi dunia peradi-

• INFO ISTANA

lan untuk introspeksi, khususnya dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Topo berpendapat, putusan pengadilan dalam kasus-kasus ini patut dipertanyakan karena menusuk rasa keadilan. Ia menyoroti ketiadaan mens rea (niat jahat) sebagai elemen fundamental hukum pidana. Meskipun majelis hakim menyebut adanya kelalaian berat, Topo menilai ini adalah kesalahan mendasar.

"Kelalaian berat itu tidak bisa digunakan dalam kasus korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3. Dia harus mens reanya berupa sengaja," ujarnya.

Dalam konteks putusan ASDP, terungkap bahwa Ira Puspawati dan jajarannya tidak terbukti memperkaya diri sendiri. Perbuatan mereka disebut sebagai kelalaian berat tanpa kehati-hatian dalam prosedur dan tata kelola korporasi yang berujung pada memperkaya orang lain atau korporasi (PT JN).

Hal serupa terjadi pada Tom Lembong, yang tidak menikmati hasil korupsi, tetapi kebijakannya dinilai merugikan negara dan memperkaya pengusaha swasta.

Ketika lembaga peradilan tidak mampu memberikan keadilan, dan masyarakat pencari keadilan merasa kurang percaya, maka Kepala Negara, melalui hak prerogatifnya, mengambil peran korektif.

Topo membandingkan situasi ini dengan sistem common law di Inggris sebelum abad ke-18 yang mengenal court of equity (peradilan kerajaan) untuk memberikan keadilan ketika court of common law (peradilan biasa) hanya mementingkan kepastian hukum.

"Kalau sampai Presiden sebagai kepala negara harus turun tangan, kenapa bukan dunia peradilan yang memberikan? Kenapa bukan pengadilan banding, kasasi, atau peninjauan kembali? Harusnya dunia peradilan," tegasnya, menyerukan introspeksi kolektif.

Rehabilitasi Dua Guru

Tidak semua penggunaan hak prerogatif Presiden menyangkut tokoh politik atau korporasi besar. Pada 13 November 2025, Presiden Prabowo juga menunjukkan kepekaannya terhadap kasus yang lebih menyentuh akar rum-

put. Ia memberikan rehabilitasi kepada dua guru, Abdul Muis dan Rasnal, dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pemberian rehabilitasi ini dilakukan setelah Presiden menerima berbagai aspirasi masyarakat guna memulihkan nama baik kedua tenaga pendidik tersebut.

Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat mengumumkan keputusan ini di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah murni penggunaan hak

prerogatif Presiden untuk memulihkan nama baik individu yang dianggap tidak mendapatkan keadilan.

prerogatif Presiden untuk memulihkan nama baik individu yang dianggap tidak mendapatkan keadilan. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menegaskan, pemberian rehabilitasi pada tiga terdakwa kasus ASDP membuat putusan pidana mereka tidak lagi dapat dijalankan dan seluruh hak mereka dipulihkan.

ICW mencatat, pola intervensi politik ini telah terjadi tiga kali dalam kurun waktu singkat (abolisi Tom Lembong,



prerogatif Presiden untuk memulihkan nama baik individu yang dianggap tidak mendapatkan keadilan.

Intervensi atau Koreksi Yudisial

Tindakan Presiden Prabowo, terutama yang menyangkut kasus korupsi, segera menuai kritik keras dari kelompok masyarakat sipil. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai keputusan ini seba-

amnesti Hasto Kristiyanto, dan rehabilitasi ASDP), bahkan terjadi dalam kasus ASDP hanya lima hari setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibacakan. Padahal, terdakwa dan penuntut umum masih memiliki waktu tujuh hari untuk mengajukan banding.

"Intervensi ini jelas mengaburkan hak-hak upaya hukum dan mencederai prinsip independensi peradilan," tegas

Wana.

ICW khawatir jika aktor-aktor hukum lebih memilih menunggu “ampunan politik” dari eksekutif daripada menempuh jalur banding, maka fungsi korektif yudikatif (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) akan menjadi tidak berarti.

Lebih jauh, ICW memperingatkan bahwa praktik ini berpotensi memindahkan arena pembelaan dari ruang sidang ke ruang lobi kekuasaan. Ini menciptakan preseden buruk.

kan hukum melalui hak prerogatif dalam kasus korupsi, dan DPR diminta segera membahas undang-undang pembatasan penggunaan hak prerogatif Presiden, sesuai amanat Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Tanpa batasan yang jelas, kewenangan ini dinilai rentan digunakan secara sewenang-wenang.

Kepentingan Lebih Besar

Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) berusaha menenangkan kekhawatiran publik. Juru Bicara MA, Yanto, meyakini,

akan mengganggu proses hukum yang telah berjalan.

“Proses hukum berjalan, hak istimewa berjalan. Enggak ada masalah. Hal biasa terjadi dalam ketatanegaraan kita,” tambahnya, menekankan bahwa Presiden tidak sembarangan dalam memberikan hak tersebut dan pasti melihat kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Lembaga Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga menguatkan aspek prosedural.

Ia menegaskan, rehabilitasi untuk Ira Puspawati telah sepenuhnya sesuai dengan kaidah hukum dan Pasal 14 UUD 1945 karena Presiden telah terlebih dahulu meminta dan mencantumkan pertimbangan tertulis dari Mahkamah Agung dalam konsiderans Keputusan Presiden. Melalui Keppres tersebut, para terpidana tidak perlu menjalani pidana, dan seluruh kedudukan hukum, harkat, dan martabat mereka sebagai warga negara dipulihkan.

Namun, di balik penegasan prosedur ini, tetap ada pertanyaan mendasar yang menguji konsistensi sistem hukum Indonesia: mengapa Kepala Negara harus turun tangan untuk mengoreksi putusan peradilan?

Penggunaan hak prerogatif secara masif dalam kasus-kasus sensitif seperti korupsi, meski diklaim sebagai upaya menegakkan keadilan substantif, secara tidak langsung menuding adanya kegagalan institusional dalam sistem peradilan biasa.

Hak prerogatif Presiden, yang secara konstitusional diperbolehkan, kini bertindak sebagai court of last resort bagi para pencari keadilan yang merasa bahwa hakim-hakim di tingkat bawah telah mengabaikan prinsip-prinsip hukum fundamental, seperti ketiadaan mens rea dalam pemidanaan kebijakan bisnis.

Waktu akan menjawab apakah serangkaian keputusan ini akan menjadi preseden positif yang mendorong perbaikan mendasar pada pemaknaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor oleh para hakim, atau justru menjadi preseden negatif yang memicu pergeseran arena pembelaan dari ruang sidang yang independen ke ruang lobi kekuasaan yang penuh pertimbangan politik. ●



“Pihak terdakwa cukup membangun narasi belas kasih kepada Presiden dan memasarkan kisah sedih setiap kali putusan tidak menguntungkan. Publik akhirnya digiring untuk menekan eksekutif, alih-alih mengevaluasi bukti dan argumentasi hukum,” kata Wana.

Sebagai respons, ICW mengeluarkan dua desakan utama: Presiden Prabowo harus menghentikan intervensi penega-

rehabilitasi untuk para terpidana kasus ASDP merupakan hak istimewa yang diberikan kepada Presiden oleh UUD 1945.

“Itu hak istimewa yang diberikan ke Presiden. Tentunya dengan pertimbangan yang lebih besar, untuk kepentingan nasional,” kata Yanto.

Ia meyakini, keputusan Presiden menggunakan hak prerogatifnya tidak



POLRI DILARANG JADI PEJABAT SIPIL

Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Dalam putusan yang dibacakan pada 13 November 2025 itu, MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Sihite

pasal tersebut mengatur, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Rumusan ayat ini sama persis atau ditegaskan kembali di dalam Pasal 28 Ayat (3) UU Kepolisian.

Tidak ada keraguan, menurut MK, rumusan tersebut merupakan rumusan norma yang *expressis verbis* yang tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain.

Dalam putusan yang sama, MK menyatakan batal frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" di

mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian".

Oleh karena itu, MK menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) UU Kepolisian telah menimbulkan kerancuan dan memperluas norma utama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, frasa itu bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Putusan tersebut tidak bulat. Hakim Konstitusi Daniel P Yusmic dan Guntur Hamzah menyatakan pendapat berbe-



yang mempersoalkan Pasal 28 Ayat (3) UU No 2/2002 tentang Kepolisian dalam perkara 114/PUU-XXIII/2025.

Sebelum mengurai lebih jauh tentang pasal yang diuji, MK merujuk kembali pada Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 khususnya Pasal 10 yang mengatur tentang keikutsertaan Polri dalam penyelenggaraan negara. Ayat (3) pada

Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) UU Polri. Sebab, frasa tersebut sama sekali tidak memperjelas norma Pasal 28 Ayat (3) UU yang sama, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan pada norma yang dimaksud.

MK juga menilai, frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" juga mengaburkan substansi frasa "setelah

da (dissenting opinion). Sementara itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani mengajukan alasan berbeda (concurring opinion).

Hingga saat ini, pemohon uji materi menengarai setidaknya ada 10 anggota Polri aktif yang menduduki jabatan pada struktur organisasi di luar Polri.

Mereka adalah Komjen Rudi Heriyanto Adi Nugroho selaku Sekretaris Jen-

deral Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komjen Panca Putra Simanjuntak di Lemhanas, Komjen Nico Afinta selaku Sekjen Kementerian Hukum, Komjen Marthinus Hukom selaku Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Albertus Rachmad Wibowo selaku Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Ada pula Komjen I Ketut Suardana selaku Inspektur Jenderal Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Komjen Putu Jaya Danu Putra selaku Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Komjen Eddy Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Muhammad Iqbal selaku Sekjen Dewan Perwakilan Daerah, dan Komjen Setyo Budiyo selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Harus dipatuhi

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, menilai, putusan MK harus dijalankan karena bersifat final dan mengikat.

"Menurut hemat saya, Polri harus menghormati dan melaksanakan putusan MK. Semua harus tunduk dan patuh pada putusan MK," ujarnya menegaskan.

Artinya, ketika ada pejabat yang ingin pindah ke institusi lain, yang bersangkutan harus mengundurkan diri. "Jangan malah statusnya masih polisi, tetapi dia bekerja aktif di institusi tersebut. Kan begitu, ini yang terjadi," katanya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, sependapat dengan Rudianto. Menurut dia, putusan MK itu sudah sejalan dengan semangat UU 2/2002 tentang Polri.

"Meskipun juga sangat disayangkan keputusan (MK) itu. Sebab, apa pun ceritanya, anggota polisi yang ditempatkan di jabatan sipil itu, kan, mereka sudah dididik oleh negara. Mereka punya pengetahuan keterampilan, punya pengalaman," ucapnya.

Ia menjelaskan, UU Polri telah memberikan penegasan bahwa polisi sebenarnya institusi nonkombatan atau institusi sipil. Dengan demikian, sebenarnya, jika ada anggota kepolisian ditempatkan di lembaga-lembaga sipil, itu merupakan sesuatu yang tidak bertentangan.

"Suatu yang sejalan dengan jenis kel-

amin, dalam tanda kutip polisi gitu, dia nonkombatan," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat, Yusril Ihza Mahendra, menyebut, setelah putusan MK dibacakan, pemerintah harus menindaklanjuti putusan itu dengan mengubah aturan perundang-undangan yang ada.

Selanjutnya, juga diperlukan masa transisi terhadap polisi-polisi aktif yang sudah telanjur memegang jabatan di Kementerian, badan, dan lembaga.

"Nanti, akan kami bahas soal itu. Tapi,

semangat reformasi Polri. Sebab, selama ini, memang tidak ada aturan spesifik di UU 2/2002 tentang Kepolisian terkait larangan menduduki jabatan sipil. Pemerintah akan membuat peraturan terbaru untuk menindaklanjuti amanat putusan tersebut.

Yusril mengatakan, dalam UU Polri hanya mengatur tentang pemisahan TNI-Polri. Adapun untuk TNI, larangan menduduki jabatan sipil itu sudah diatur spesifik hanya diperbolehkan untuk 14 kementerian dan lembaga. Di luar kementerian dan lembaga yang diatur



tentu semua jajaran kepolisian akan tahu dan menyadari bahwa ada putusan MK dan putusan MK itu seperti kita ketahui berlaku serta-merta sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum," kata Yusril.

Selain itu, Yusril mengungkapkan, putusan MK itu juga akan menjadi bahan masukan bagi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Menurut dia, hal itu selaras dengan

tersebut, prajurit TNI aktif harus mengundurkan diri sebelum menduduki jabatan sipil.

"Tetapi, memang kepolisian ini pada praktiknya masuk ke jabatan-jabatan sipil tanpa mengundurkan diri karena memang aturannya tidak ada untuk itu," ujar Yusril.

Profesionalisme Polisi

Putusan MK yang melarang posisi

• INFO NASIONAL

menduduki jabatan sipil menjadi momentum guna mempertegas penguatan penugasan polisi di luar organisasi kepolisian. Langkah ini diharapkan ikut memperbaiki profesionalisme polisi.

Komisioner Kopolnas, Choirul Anam, menyatakan, putusan MK itu bisa dijadikan bagian strategis guna mentransformasi organisasi kepolisian agar lebih profesional. Tak dimungkirinya, selama ini ada sejumlah polisi yang mengisi struktur jabatan sipil yang tidak terkait keahlian polisi. Inilah yang kemudian menimbulkan persoalan di tengah kalangan aparatur sipil negara (ASN).

"Sebenarnya putusan MK ini mempertegas kebutuhan untuk listing biar tidak tumpang tindih. Ini mempertegas mana-mana saja yang boleh diisi polisi dan tidak. Tentunya tugas-tugas

rangan polisi menduduki jabatan sipil sudah tepat.

Baginya, putusan itu sekaligus menegaskan kembali norma dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang mengharuskan polisi mengundurkan diri sebelum menduduki jabatan sipil. Sering kali, aspek itu diabaikan hanya berbasis penugasan dari Kapolri.

"Putusan ini sekaligus pembenaran sosiologis sekaligus yuridis atas kebijakan Presiden mereformasi kepolisian," kata Fickar.

Fickar menyoroti potensi praktik korupsi dari pemberlakuan penugasan polisi pada jabatan sipil. Tanpa pensiun terlebih dahulu, seorang polisi penyandang jabatan sipil akan memperoleh gaji ganda. Selain gajinya sebagai polisi, sosok itu juga menerima gaji atas jabatan

harus dipilah jabatan mana yang terkena implikasi putusan tersebut," tutur Jimly.

Untuk melaksanakan putusan MK, Kapolri tidak perlu menunggu rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Namun, menjalankan putusan MK itu tidak akan mudah. Sebab, ada yang baru diangkat di jabatan sipil. Apakah mereka akan diminta memilih untuk mengundurkan diri dari anggota kepolisian dan melanjutkan jabatan sipil atau kembali ke institusi Polri.

"Yang jelas, ke depan, tidak boleh lagi ada pengangkatan baru. Sebab, dasar hukum untuk pengangkatan (anggota polisi di jabatan sipil) baru, sudah tidak ada," tambah Jimly.

Untuk anggota Polri yang saat ini sudah memegang jabatan sipil, perlu dipelajari opsi-opsi yang bisa diambil.

Menurut Jimly, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Pertama, prinsip hukum universal adalah periode transisi atau aturan peralihan supaya tidak terjadi keguncangan norma. Prinsipnya, di masa transisi ini, tidak boleh ada yang dirugikan.

Kendati demikian, ini menyangkut aparat hukum dan hukum administrasi. Di sisi ini, Kapolri juga perlu mempertimbangkan aspirasi publik dan citra Polri. Salah satunya, misalnya, segera menindaklanjuti putusan MK dengan memensiunkan sekian ratus perwira Polri yang memegang jabatan sipil, sehingga bisa menunjukkan kesungguhan respons Polri.

Namun, polisi yang memegang jabatan di institusi-institusi yang berkaitan erat dengan kepolisian, seperti BNN, BNPT, atau BIN, bisa saja tetap menjabat sampai habis masa jabatannya.

Karena itu, kendati ada prinsip periode transisi yang jangan sampai merugikan pihak yang terkait UU Kepolisian, Kapolri juga harus mempertimbangkan masukan masyarakat.

"Arahan Bapak Presiden juga sama. Esprit de corps sangat penting di kepolisian, bahkan esprit de corps sebagai bangsa juga sangat penting. Tapi kita tidak boleh kaku. Mentang-mentang esprit de corps sangat kuat, kita tidak mau dengar aspirasi yang ada di masyarakat," tutur Jimly.

Dia menambahkan, hal tersebut



itu berkaitan dengan profesionalitas mereka sebagai penegak hukum," kata Anam, Sabtu (15/11/2025).

Menurut Anam, jabatan-jabatan yang diisi seorang yang berlatar belakang polisi nantinya juga harus sesuai keahliannya. Sejauh ini, sejumlah lembaga yang memerlukan keahlian kepolisian antara lain Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kinerja lembaga-lembaga itu berkaitan erat dengan tugas penegakan hukum yang biasa dilakukan aparat kepolisian.

Sementara itu, dosen hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai putusan MK terkait la-

sipilnya.

"Artinya, negara membayar dua kali. Ini jelas merugikan keuangan negara dan dalam keadaan normal ini bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi," kata Fickar.

Final dan Mengikat

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menilai, Kapolri bisa langsung mengkaji substansi putusan MK secara rinci dan melaksanakannya. Sebab, putusan MK final dan mengikat.

"Karena aturannya sudah berubah, Polri harus mengkaji bagaimana melaksanakannya. Implementasinya akan seperti apa harus dipelajari secara detail,

pegangan bagi komisi yang dipimpinnya. Dia juga menilai sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat komisi ataupun saat berbicara kepada media massa pun sama, yakni Polri terbuka pada masukan untuk perbaikan citra dan kinerja kepolisian.

Respons Polri

Polri sendiri menegaskan menghormati dan akan menindaklanjuti putusan MK terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Untuk itu, Polri membentuk tim kelompok kerja khusus guna melakukan kajian cepat agar putusan tersebut tidak menimbulkan multitafsir pada Senin (17/11/2025).

Kajian dilakukan untuk memahami putusan MK agar tak multitafsir. Selain itu, kajian dibutuhkan karena implementasi putusan ini berkaitan dengan banyak kementerian/lembaga lain. Sebab, mekanisme penempatan perwira di luar struktur Polri selama ini melibatkan instansi lain, tidak hanya internal Polri.

Tim Pokja ini juga ditugaskan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, Kapolri telah mengumpulkan para pejabat utama untuk membahas putusan MK tersebut pada Senin pagi.

Tim Pokja ini akan dipimpin oleh Asisten Kapolri bidang SDM dan Kepala Divisi Hukum Polri dan diinstruksikan agar bekerja secepat-cepatnya.

Sandi menjelaskan, langkah kajian dan koordinasi diperlukan karena implementasi putusan ini berkaitan dengan banyak kementerian/lembaga lain. Selain itu, mekanisme penempatan perwira Polri di luar struktur selama ini juga melibatkan instansi lain, tidak hanya internal Polri.

la mencontohkan, penempatan perwira tinggi Polri, seperti Inspektur Jenderal hingga Komisaris Jenderal pada jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama di instansi sipil didasarkan pada Keputusan Presiden. Adapun untuk perwira di bawahnya, didasarkan pada keputusan menteri atau pimpinan lembaga terkait.

"Oleh karena itu, Bapak Kapolri mengharapkan tim Pokja membuat kajian percepatan tadi bisa menjadi landasan kita

dengan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," tuturnya.

Lembaga yang akan diajak berkonsultasi, antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian

di luar struktur, hanya 300-an orang yang menduduki jabatan manajerial.

"Kalau tadi dari pemaparan (internal), jumlahnya jauh berbeda dengan yang disampaikan dalam media. Kalau tidak salah, 300-an yang duduk di jabatan manajerial," jelasnya.

Sisanya, merupakan personel yang mengisi fungsi pendukung non manaje-



Keuangan, hingga Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri selaku pemutus.

"Salah satu (tugas Pokja) adalah membahas hal-hal yang terkait dengan keputusan ini dengan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan kementerian lembaga terkait tadi," tambah Sandi.

Sandi juga mengoreksi data jumlah anggota Polri aktif yang bertugas di luar struktur. Menurut dia, jumlah yang selama ini beredar di media tidak seluruhnya menduduki jabatan sipil manajerial.

Berdasarkan data internal Polri, dari total sekitar 4.351 personel yang berada

riyal, seperti staf, ajudan, dan pengawal di berbagai kementerian atau lembaga.

Mengenai nasib personel yang saat ini telanjur menduduki jabatan sipil, Sandi menyatakan bahwa Kapolri akan menunggu laporan dan hasil kajian tim Pokja. Laporan itu akan menjadi dasar untuk menentukan langkah Polri selanjutnya.

"Yang pasti, bahwa Kepolisian sangat mengapresiasi dan menghormati putusan dari MK dan akan menindaklanjuti keputusan MK tersebut sesuai dengan amanat undang-undang," tutupnya. •



RKUHAP RESMI DISAHKAN JALAN KE MK TERBUKA LEBAR

DPR bersama pemerintah akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP menjadi undang-undang. Undang-undang ini akan berlaku mulai awal Januari 2026 untuk mendampingi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP baru.

Dalam Rapat Paripurna yang dihadiri 242 anggota, 18 November 2025, Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu sebagai tanda persetujuan pengesahan RKUHAP menjadi undang-undang. Sebelum itu, Puan dua kali menanyakan kepada para anggota soal persetujuan pengesahan. Namun, tak ada satu pun wakil rakyat yang melayangkan interupsi dan menyatakan keberatan meski penolakan terhadap sejumlah pasal di RKUHAP disuarakan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil.

Dalam paparannya, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan, RKUHAP yang saat ini disahkan sangat dibutuhkan dalam mendampingi KUHP baru yang mulai berlaku pada awal Januari 2026. Pembentukan RKUHAP tidak terburu-buru karena pembahasannya

membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

Habiburokhman menjelaskan, rangkaian pembentukan RKUHAP dimulai dari 6 November 2024. Saat itu, DPR menugaskan Badan Keahlian Dewan untuk menyusun naskah akademik dan draf RKUHAP.

Setelah itu, dalam Rapat Paripurna DPR pada 18 Februari 2025, RKUHAP disahkan menjadi RUU usulan dari DPR. Namun, baru pada awal Juli 2025, Komisi III DPR dan pemerintah bersama-sama membahasnya.

"KUHP itu sebagai hukum materil harus dilengkapi dengan hukum operasionalnya, yaitu KUHP, dan akan bersama-sama berlaku (mulai) 2 Januari 2026. Dalam penyusunan KUHP ini, kami semaksimal mungkin berikhtiar untuk memenuhi apa yang disebut meaningful participation atau partisipasi

bermakna,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Partisipasi bermakna dimaksud, Komisi III DPR telah menggelar rapat dengar pendapat dari setidaknya 130 pihak dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, advokat, hingga elemen penegak hukum. Selain itu, mereka juga menyerap banyak aspirasi masyarakat saat kunjungan kerja di daerah-daerah.

Usai Rapat Paripurna, Puan Maharani juga menegaskan, RKUHAP bakal berlaku pada awal Januari 2026. Dia menyatakan, DPR sudah menyerap masukan dari sejumlah pihak dan pembaruan yang dilakukan diharapkan bisa memperbaiki penegakan hukum.

“Kalau tidak diselesaikan (revisi KU-HAP), tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah selama 44 tahun undang-undang ini berlaku. Banyak sekali yang diperbarui, melibatkan banyak pihak, dan mengikuti zaman atau hukum yang berlaku sekarang,” ujarnya.

KUHAP baru akan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Setelah disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah dan DPR, Menteri Hukum Supratman mengatakan, selanjutnya tinggal tahap pengesahan oleh Presiden Prabowo Subianto dan tahapan pengundangan untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara RI. Namun, dia memastikan KUHAP sebagai hukum formil akan mendampingi KUHP sebagai hukum materiil mulai awal Januari 2026.

“Iya, otomatis (bersamaan dengan KUHP). Nanti di mana pengundangan-nya, kemudian ketentuan peralihan, nanti saya akan coba lihat, ya. Yang jelas, berlakunya KUHP kita di tahun 2026. Sekarang KUHAP juga sudah siap. Jadi, dua hal ini, hukum materiil dan formil, dua-duanya sudah siap,” paparnya.

KUHP baru telah lebih dulu disahkan. KUHP baru dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Meski sudah disahkan sejak 2023, dalam ketentuan peralihan dinyatakan bahwa KUHP baru masih akan diberlakukan pada 2026. Jeda waktu tiga tahun dimaksudkan untuk penyusunan aturan turunan sekaligus sosialisasi



kepada aparat penegak hukum dan masyarakat.

Supratman dalam menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden mengklaim, KUHAP yang baru diperlukan agar hukum acara pidana di Indonesia menjadi lebih adaptif, modern, dan berkeadilan.

“RUU KUHAP memuat sejumlah pembaruan mendasar yang disusun untuk menyesuaikan sistem hukum acara pidana dalam perkembangan zaman. Presiden menyatakan setuju Rancangan KUHAP untuk disahkan menjadi undang-undang,” paparnya.

Habiburokhman juga mengklaim materi dalam RKUHAP memperkuat dan memberdayakan warga negara saat berhadapan dengan hukum.

“KUHAP itu pada intinya adalah undang-undang yang mengatur interaksi antara negara yang diwakili aparat penegak hukum dengan warga negara yang bermasalah dengan hukum. Di

KUHAP yang lama, negara itu terlalu powerful, aparat penegak hukum terlalu powerful. Kalau di KUHAP yang baru, ya, warga negara diperkuat, diberdayakan,” ujarnya.

Gugat ke MK

Sejumlah elemen masyarakat mempertimbangkan untuk membawa regulasi baru tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), di antaranya organisasi advokat DPN Peradi dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat sipil adalah kewenangan penangkapan di tahap penyelidikan.

“RKUHAP ini sudah pasti jadi undang-undang. Maka, jalan yang paling dekat agar ada perbaikan sebagaimana Peradi sampaikan adalah judicial review ke MK. Kalau perubahannya melalui legislasi, selain politis, juga panjang,” kata Ketua Umum DPN Peradi, Luhut MP Pangaribuan, Selasa, 18 November 2025.

• INFO NASIONAL

Luhut mengaku sedih dengan disetujuinya RCUHAP yang dinilainya masih mengandung sejumlah permasalahan.

"Padahal, di Komisi III DPR banyak ahli hukum sampai profesor dan doktor serta praktisi. Tapi, tampaknya tidak cukup untuk mem bahas nya," ujarnya.

Sebelumnya, Peradi mempersoalkan pengaturan mengenai kedudukan dan peran advokat di dalam RCUHAP yang belum mengakomodasi masukan-masukan yang disampaikan. Peradi juga menilai secara umum konsep RCUHAP belum beranjak dari KUHAP lama yang masih terpusat pada penyidik. Hal itu tampak pada tidak diterimanya usulan pengujian atas upaya paksa yang dilakukan penyidik secara yudisial dan tetap mempertahankan diskresi penyidik. Upaya praperadilan tetap menjadi upaya post factum.

Selain DPN Peradi, ICJR juga mempertimbangkan untuk menguji sejumlah

uru-buru, tidak transparan, dan mengabaikan partisipasi bermakna.

Selain itu, RCUHAP juga tidak mendukung tuntutan reformasi kepolisian. Menurut koalisi, praktik penyiksaan, salah tangkap, rekayasa kasus, kriminalisasi, penggunaan kekuatan berlebihan atau penyalahgunaan kewenangan polisi terjadi akibat kegagalan mekanisme pengawasan di dalam KUHAP tahun 1981.

"Mekanisme pengawasan upaya paksa semestinya diperkuat, tetapi anehnya RCUHAP justru memperkuat kewenangan kepolisian dan menambah ruang diskresi yang membuat ruang abuse of power," demikian siaran pers Koalisi.

RCUHAP yang seharusnya membatasi

ganti rugi.

Begitu pula dengan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. RCUHAP mengatur klausul tentang kemungkinan tersangka atau terdakwa menolak didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum di depan penyidik dan/atau jaksa.

Padahal, menurut koalisi, praktik yang jamak terjadi adalah adanya intimidasi dari penegak hukum agar tak menggunakan bantuan hukum dengan iming-iming hukumannya diperin-



gan. Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, mengatakan, jika memang ada warga negara atau masyarakat sipil yang tidak puas terhadap setiap undang-undang, dipersilakan mengajukan gugatan ke MK. Hal itu disebutnya sebagai hak demokrasi.

Menurut Rano, itu merupakan hak demokrasi warga negara yang patut dihargai. Nantinya, MK akan menguji sejauh mana aspek formal dan materi dari RCUHAP telah dipatuhi oleh DPR dan pemerintah.

"Eggak masalah, setiap undang-undang loh setiap undang-undang, kan, memang begitu itu, kan, haknya warga negara dan organisasi lain," ucapnya.

Pengamatan Hakim

Hakim sekaligus Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Binsar Goeltom, mengkritisi Pasal 235 Ayat (1) Huruf g RCUHAP yang memasukkan pengamatan hakim sebagai tambahan alat bukti.

Menurut dia, pengamatan hakim itu muncul dari bagian alat bukti "petunjuk". Akan tetapi, alat bukti "petunjuk" justru dihapus sebagai alat bukti di RCUHAP. Padahal, alat bukti "petunjuk" itu lah alat bukti sehingga penting untuk dimasukkan kembali ke dalam RCUHAP.

"Petunjuk itu justru bagian dari pengamatan hakim. Jika pengamatan hakim dijadikan alat bukti (tambahan), berarti seolah-olah pengamatan hakim sama seperti alat bukti putusan hakim yang



pasal di RCUHAP. "Banyak banget yang bisa di-JR, (digugat lewat uji materi ke MK)," kata Deputy Direktur ICJR, Maidina Rahmawati.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur dan Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, menyatakan, koalisi belum menyepakati tentang pengujian ke MK. Koalisi akan membahas hal tersebut terlebih dahulu bersama anggota yang lain.

Bagi koalisi, proses pembahasan RCUHAP dinilai dilakukan secara ter-

kewenangan kepolisian agar transparan dan akuntabel justru memperkuat institusi ini dengan pemberian diskresi. Pengawasan terhadap kepolisian justru kian melemah.

RCUHAP juga memberikan kewenangan kepada penyidik (atas perintah penyidik) menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, dan menahan (Pasal 5 Ayat 2). Semua orang bisa kena tangkap dengan dalih mengamankan penyelidikan.

Selain itu, masih terdapat sejumlah ketentuan yang dianggap bermasalah oleh koalisi. Misalnya, dihilangkannya hak korban salah tangkap menuntut

dijadikan bukti dalam perkara lain. Itu tidak boleh," kata Binsar.

Binsar juga tak setuju dengan ketentuan Pasal 131 Ayat (1) RKUHAP terkait penyitaan, di mana benda-benda yang lekas rusak dapat dimusnahkan atau dilelang oleh penyidik atau penuntut umum. Hal tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan bertentangan dengan Pasal 135 RKUHAP yang menyatakan jika putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka benda sitaan akan dikembalikan kepada yang berhak.

"Jika barang sitaan sudah dilelang/dimusnahkan, sementara terdakwa tidak terbukti bersalah, apakah akan diadakan kembali gugatan perdata atau prapradilan," katanya.

Tak Banyak Pengaruh

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, berpandangan, RKUHAP yang baru saja disahkan tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi. Namun, KPK masih akan mengkaji hal itu lebih dalam lagi.

"Ya, menurut saya, sih, enggak terlalu banyak pengaruhnya, ya. Masalah penyadapan, kami juga punya aturan. Segala sesuatu yang dilakukan dalam proses penyadapan kita pertanggungjawabkan ke Dewan Pengawas," ujar Setyo.

Menurut Setyo, KUHAP baru justru memedomani hak asasi dari para pihak yang diperiksa dalam kasus korupsi. Contohnya, seseorang sudah bisa didampingi oleh penasihat hukum sejak masih dimintai keterangan sebagai saksi. Sebelumnya, seseorang baru bisa didampingi kuasa hukum saat dalam status tersangka.

Walakin, Setyo juga menyebut, sebagai pelaksana UU, KPK melalui Biro Hukum tentu tetap akan mengkaji dan menelaah aturan yang harus dipedomani dan dilaksanakan itu. KPK berharap kewenangannya tidak berubah dengan adanya revisi KUHAP yang pertama sejak era Belanda tersebut.

Menurut dia, hukum acara pidana baru itu hanya menyangkut masalah teknis dan praktik, sehingga tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap kinerja lembaga antirasuah.

"Kami matikan (penyadapan), kalau memang sudah tidak ada prosesnya. Segala sesuatunya ada aturan yang melekat dalam proses-proses yang dilakukan oleh penyidik," kata Setyo.

Merujuk pada draf terbaru RKUHAP, penyadapan adalah salah satu bentuk upaya paksa oleh aparat penegak hukum. Pasal 136 Ayat (1) RKUHAP diatur soal penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.

Padahal, penyadapan sangat penting bagi tugas utama (core business) KPK, yaitu untuk menemukan peristiwa tindak pidana ataupun menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup.

"Nah, itu nanti biar dikaji oleh Biro Hukum, ada atau tidak dalam RKUHAP yang bisa menghambat. Tapi, harapan saya, sih, mudah-mudahan tidak ada lagi," ucap Setyo.



Lalu, dalam Pasal 136 Ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penyadapan akan diatur dengan undang-undang khusus mengenai penyadapan.

Sebelumnya, KPK bisa melakukan penyadapan sejak tahap penyelidikan. Penyadapan oleh KPK dilaporkan kepada Dewas dan selalu diaudit.

Dalam keterangannya pada Juli 2025, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa jika penyadapan hanya diperbolehkan pada saat penyidikan, artinya KPK tidak bisa melakukan penyadapan pada tahap penyelidikan.

Dalam pembahasan RKUHAP antara DPR dan pemerintah, KPK juga pernah mengirimkan hasil kajian terhadap RKUHAP kepada DPR, terutama terkait pasal-pasal yang dikhawatirkan akan mengganggu kerja-kerja KPK.

Namun, menurut Setyo, keberatan dari KPK tersebut sudah diakomodasi. Pasal-pasal dalam KUHAP baru yang bersinggungan dengan urusan KPK diharapkan tidak memengaruhi tugas pokok dan fungsi KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). ●

RAKYAT BISA COPOT ANGGOTA DPR

Mahasiswa mengambil langkah berani dengan menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi agar hak konstitusional rakyat untuk mencopot atau memberhentikan anggota DPR dapat diakui. Gugatan ini menargetkan perubahan pasal yang selama ini membatasi kewenangan PAW hanya pada keputusan internal partai.

Mekanisme pemberhentian antarwaktu (PAW) anggota DPR selama ini dianggap cukup eksklusif dan tanpa memiliki ukuran yang jelas. Sebagai konstituen, rakyat seolah tidak dilibatkan.

Usulan pelibatan rakyat dalam pemberhentian mengemuka dari permohonan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD, atau UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah mahasiswa.

Para mahasiswa yang mendaftarkan permohonan itu adalah Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoiril Fatna.

Permohonan uji materi yang mereka ajukan itu terdaftar dalam Perkara Nomor 199/PUU-XXIII/2025. Obyek permohonannya adalah Pasal 239 Ayat (2) Huruf d dari UU MD3 yang menyoal pemberhentian antarwaktu anggota DPR.

"Permohonan a quo yang dimohonkan oleh para pemohon tidak berangkat dari kebencian terhadap DPR dan partai politik, tetapi sebagai bentuk kepedulian untuk berbenah. Para pemohon tidak menginginkan ada lagi korban jiwa akibat kebuntuan kontrol terhadap DPR," kata Ikhsan dalam sidang yang berlangsung di MK, Jakarta, Senin, 17 November 2025.

Dalam permohonan uji materi itu, para pemohon menyoroti soal praktik pemberhentian antarwaktu yang cenderung mengeksklusifkan partai politik. Sering kali, pemberhentian itu tidak disertai alasan yang jelas dan tidak mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat atau sebaliknya saat terdapat anggota DPR yang semestinya diberhentikan atas permintaan rakyat, justru dipertahankan partai politik.

Ketiadaan mekanisme pemberhen-

tian oleh konstituen lantas dipermasalahkan para pemohon. Sebagai pemilih dalam ajang pemilu, mereka seakan hanya menjalani pemilihan prosedur formal.

Pasalnya, keterpilihan anggota DPR ditentukan dari perolehan suara terbanyak dalam mekanisme pemilu. Sebaliknya, pemberhentian anggota DPR justru tidak melibatkan rakyat.

Sebagai sesama pemilih, para pemohon pun tidak bisa memastikan para wakil rakyat benar-benar memperjuang-

hentian.

Ihwal implementasi kewenangan "recall" yang dimiliki partai politik tak luput dari sorotan Ikhsan dan pemohon lainnya. Salah satunya terjadi dalam pemberhentian sementara sejumlah anggota DPR baru-baru ini. Mereka yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, dan Adies Kadir dari Partai Golkar.

Pemberian sanksi penonaktifan sementara dipertanyakan. Hukuman itu dinilai tidak sesuai ketentuan UU MD3



kan kesejahteraan mereka setelah terpilih. Janji-janji kampanye juga seakan belum tentu dijalankan mengingat rakyat tak lagi memiliki daya tawar selepas pemilu rampung.

Aspek ini seolah menunjukkan pasal yang tengah diuji mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat yang sebenarnya dijamin Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.

Untuk itu, dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menafsirkan kembali Pasal 239 Ayat (2) Huruf d UU MD3. Pada ayat itu, semula usulan pemberhentian hanya diusulkan partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, permohonan itu menambahkan frasa "dan/atau konstituen di daerah pemilihannya" sebagai bagian dari pengusul pember-

hentian yang semestinya memberhentikan sekaligus menggantikan sosok-sosok itu.

Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menghargai langkah uji materi yang ditempuh sejumlah mahasiswa itu. Pihaknya pun menyatakan bisa memahami kondisi yang mendorong mereka mengajukan uji materi itu. Namun, ia mengingatkan kembali soal sistem demokrasi yang berlaku dan berbasis pada keterwakilan oleh partai politik.

"Sistem perwakilan ini harus menjadi pertimbangan. Bukan berarti partai tidak siap dievaluasi masyarakat. Namun, mekanisme demokrasi perwakilan ini kalau nanti berubah sistemnya, ya sistem perwakilan harus diubah juga," kata Eddy, Jumat, 21 November 2025.

Menurut Eddy, mekanisme penyampaian ketidakpuasan atas kinerja wakil rakyat sebenarnya sudah tersedia. Jalurnya bisa ditempuh melalui partai politik. Kritik-kritik yang dilontarkan ke partai politik akan dijadikan bahan evaluasi atas kinerja kader oleh para pimpinan dari partai politik.

"Tentu partai akan menindaklanjuti (masukan) itu. Karena, partai tidak mau nanti suara-suaranya di dapil itu hilang. Namun, apakah kemudian berujung PAW, itu nanti bergantung sejauh mana desakan dan masukan masyarakat dijustifikasi partai," sebut Eddy.

Namun, Eddy menyadari perihalnya citra DPR dan partai politik di mata publik belakangan ini. Berbagai hasil survei menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap dua lembaga itu. Oleh karena itu, evaluasi sudah sejak jauh-jauh hari dilakukan sebelum uji materi itu diajukan.

"Jadi, makanya kami sekarang juga slogannya 'PAN Bantu Rakyat'. Ini upaya kami untuk bisa hadir di tengah-tengah rakyat dengan berbagai permasalahan yang mereka hadapi untuk bisa kami urai dan selesaikan," jelas Eddy.

Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengklaim, seiring keberadaan UU MD3, sebenarnya partai politik tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Regulasi itu justru mengatur masalah pemberhentian agar memiliki mekanisme yang jelas. Apalagi jika pemberhentian itu berlangsung di tengah-tengah masa jabatannya.

"Itu kita harus melakukan kajian dan pendalaman yang lebih dalam, lebih elaboratif. Misalnya, apa alasan anggota DPR untuk diganti? Itu nanti bisa bagaimana supaya penggantian itu dilakukan secara objektif," kata Doli.

Berhubung uji materi sudah berproses, Doli tetap menyerahkan hasilnya nanti sebagaimana keputusan dari MK. Walaupun begitu, ia masih mempertanyakan apabila kelak penggantian anggota DPR langsung dilakukan masyarakat.

Hal ini membutuhkan pengaturan ketat soal siapa saja masyarakat yang memenuhi syarat mengajukan penggantian. Sebab, boleh jadi permintaan penggantian malah masyarakat yang bukan bagian dari konstituen sang wakil

rakyat.

Mekanisme evaluasi, jelas Doli, sebenarnya juga bisa melalui proses pemilihan umum yang digelar lima tahun sekali. Dalam setiap gelarnya, rakyat bisa menilai apakah wakil-wakil rakyat yang kembali turun kontestasi itu benar-benar memperjuangkan mereka selama kepemimpinannya. Jika kinerjanya tidak maksimal, warga bisa menghukum sang wakil rakyat dengan tidak memil-

kader-kader partai. Ya itu memang harus ada mekanisme yang lebih berkualitas," kata Doli.

Masyarakat Kecewa

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menyatakan, uji materi semacam itu menjadi cerminan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap institusi politik, seperti DPR dan partai



ihnya lagi.

Namun, Doli tetap memaknai upaya uji materi itu sebagai bentuk kepedulian elemen masyarakat memperkuat kelembagaan politik, termasuk DPR. Ini sekaligus menjadi dorongan bagi DPR agar semakin bekerja sungguh-sungguh sebagai wakil rakyat yang benar-benar menjadi representasi masyarakat.

"Sebagai partai politik, kami juga harus melakukan proses kaderisasi yang matang, kemudian juga pendistribusian

politik.

Sebagai representasi rakyat, aktor-aktor politik itu malah semakin berjarak dengan konstituennya. Sering kali, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan juga tidak sepenuhnya mewakili rakyat.

Hanya saja, sistem demokrasi mengharuskan keterwakilan partai politik sebagai representasi suara rakyat. Untuk itu, usulan pemberhentian langsung oleh rakyat tidak bisa serta-merta dijalankan begitu saja. ●



Ikon Baru di Tepi Musi

PLAZA BKB DISULAP JADI RUANG PUBLIK KELAS DUNIA

Pemerintah Kota Palembang tengah menggarap revitalisasi besar-besaran Plaza Benteng Kuto Besak (BKB) sebagai langkah untuk menjadikannya ikon wisata baru.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa saat podcast di Infosumsel TV menjelaskan bahwa konsep terbaru BKB akan menjadi cerminan wajah kota.

sentasi Sultan Mahmud Badaruddin II," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyinggung tentang salah satu sisi kawasan yang dahulunya terdapat sungai kecil tempat Sultan Mahmud Badaruddin II menikmati pemandangan Sungai Musi.

Lokasi itu akan dilakukan pemugaran untuk menghidupkan kembali nilai sejarah dan estetikanya.

Dalam prosesnya, Pemkot Palembang saat ini sedang menjajaki kerja sama dengan Kodam II Sriwijaya, mengingat halaman luar BKB dikelola oleh pemerintah kota, sedangkan area dalamnya masih di bawah kendali Kodam II Sriwijaya.

dengan desain estetik demi menarik wisatawan. Fasilitas keamanan seperti CCTV juga akan dipasang di sejumlah titik untuk memastikan kenyamanan pengunjung.

"Di BKB nanti akan kita lengkapi CCTV sebagai pemantau. Biar masyarakat dan wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung," ujarnya.

Pemasangan sistem pengawasan berbasis teknologi ini menjadi bagian dari konsep baru BKB sebagai ruang publik yang ramah, inklusif, dan berkelanjutan.

Menariknya, kawasan BKB juga akan dikembangkan lebih maju ke arah tepi-an Sungai Musi. Langkah ini dilakukan



Pembangunan ini sudah mulai dilakukan, dengan konsep kembali nuansa kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam dan sosok Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai figur sentral.

"BKB ini adalah aset kota yang sangat berharga. Kita akan hadirkan miniatur Kesultanan Palembang Darussalam di tengah kawasan BKB bersama repre-

"Kami ingin seluruh area BKB bisa diakses masyarakat umum dan pengunjung luar kota. Untuk itu diperlukan dialog bersama Kodam II Sriwijaya agar pengelolaan dapat dilakukan secara kolaboratif," jelasnya.

Tidak hanya mempercantik sisi budaya dan sejarah, Pemkot juga akan menyiapkan ratusan tenan UMKM

untuk memastikan panorama Jembatan Ampera tetap terlihat jelas, tanpa terhalang bangunan, sehingga pengunjung dapat menikmati view kota yang lebih memukau.

"Penataan BKB akan diarahkan lebih terbuka ke tepi sungai agar pemandangan Ampera tetap menjadi daya tarik utama. Ini akan menjadikan BKB lebih

menarik dan instagramable bagi wisatawan,” tambah Ratu Dewa.

Ia menyebutkan bahwa konsep besar revitalisasi ini masih menyimpan banyak kejutan lain yang akan membuat BKB menjadi destinasi yang tak hanya indah, namun juga bersejarah dan edukatif.

Dewa berjanji kalau persoalan pemerasan tidak akan terjadi lagi di BKB, setelah direvitalisasi.

“Kalo masih ada pemerasan di BKB kita minta kepala dinasnya bayar 10 kali lipat,” tegas Dewa.

Selain untuk lokasi wisata, BKB Palembang juga bisa digunakan untuk lokasi pertemuan akbar yang bersifat

kota di Palembang, kawasan BKB ke depan akan menjadi lokasi berbagai agenda dan kegiatan yang dihadirkan pemerintah kota.

Termasuk event seni, budaya serta kuliner sebagai program andalan pemerintah daerah.

“Seluruh kegiatan besar nantinya juga bakal digelar di BKB,” kata Irman.

Untuk diketahui, revitalisasi BKB Palembang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel).

Gubernur Sumsel sempat menyampaikannya bahwa revitalisasi tersebut adalah hadiah HUT Palembang ke 1342

Pembangunan tugu air mancur ini digadang-gadang akan menjadi salah satu landmark terbaru Kota Palembang yang mampu mempercantik wajah pusat kota serta menarik minat wisatawan.

Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam juga telah memimpin rapat final perencanaan dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek tepat waktu.

“Tugu ini bukan sekadar hiasan, tetapi identitas Palembang. Nantinya akan terintegrasi CCTV dan pengamanan dari Satpol PP. Proyek ini harus optimal. Bundaran Masjid Agung sebagai titik nol kota harus menjadi ikon yang



massal.

“Seperti untuk upacara. Di bagian tengah saya minta juga ada semacam air mancur tapi tidak terlalu tinggi. Dan itu akan terlihat menarik dengan warna warni supaya saat malam lebih terlihat lagi. Juga ada space untuk berfoto,” katanya.

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang M Irwan menjelaskan, tak hanya mempercantik identitas Kota Palembang, revitalisasi BKB juga fokus menjaga cagar budaya sekitar. Apalagi Palembang adalah salah satu kota tertua yang berada di Indonesia.

“Dalam beberapa waktu terakhir BKB juga sudah dibersihkan dari para pedagang kaki lima. Harapannya untuk menarik perhatian wisatawan,” jelas dia.

Tidak hanya sebagai ikon dan pusat



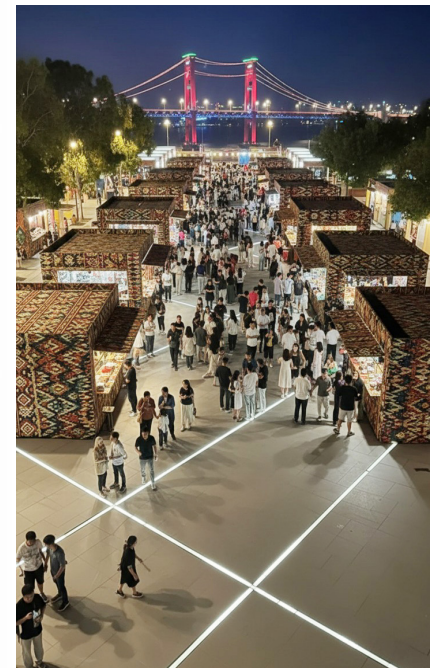
tahun, pada Juni lalu.

“Sebagai hadiah untuk Kota Palembang saya akan memberikan revitalisasi BKB,” kata Herman Deru beberapa bulan lalu.

Tugu Air Mancur Baru Palembang, Ikon Futuristik di Titik Nol Kota

Disisi lain, Pemerintah Kota Palembang menyiapkan ikon kota terbaru berupa tugu air mancur modern yang akan dibangun di bundaran Masjid Agung itu ditargetkan rampung pada 20 Desember 2025.

Visual desain tugu baru, yang tampak modern dan futuristik, juga mulai dipublikasikan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai wujud akhir ikon baru kota tersebut.



membanggakan,” tegasnya.

Dari sisi desain, Abdi, Tim Leader Perencana dari CV Andira mengungkapkan bahwa konsep tugu kali ini hadir lebih modern dan kaya unsur budaya.

“Selain air mancur menari dan permainan cahaya, kami menambahkan running text Asmaul Husna. Ke depan juga bisa ditampilkan konten-konten religius lainnya,” jelasnya.

Desain itu juga melibatkan para budayawan dengan mengangkat nuansa Palembang Darussalam serta motif khas cempaka telok.

Dengan konsep modern yang berpadu sentuhan budaya lokal, tugu air mancur ini diharapkan menjadi magnet wisata baru sekaligus mempercantik wajah Kota Palembang. ●

KETIKA ANGGARAN TERPANGKAS, KREATIVITAS DIUJI

Tahun 2026 menjadi tahun penuh tantangan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi pukulan besar, terutama bagi kota-kota besar yang masih bergantung pada dana pusat.

Di Palembang, pemotongan itu mencapai angka Rp 480 miliar. Bukan jumlah kecil bagi kota yang sedang mempercepat pembangunan infrastrukturnya.

Dalam sebuah wawancara pada podcast Infosumsel.ID, Wali Kota Palembang Ratu Dewa sudah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi salah satu tekanan fiskal terbesar yang dialami Palembang dalam satu dekade terakhir.

"Dengan pemotongan Rp 480 miliar, belanja harus disesuaikan. Tapi pelayanan dasar tetap prioritas tidak boleh dipangkas," ujarnya.

Tiga Sektor yang Tidak Tersentuh Efisiensi

Meski fiskal terjepit, Ratu Dewa memilih untuk tidak menyentuh tiga sektor vital yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Bagi dirinya, ketiganya bukan sekadar program tahunan, melainkan bagian dari janji kampanye, serta kebutuhan mendasar masyarakat.

1. Pendidikan

Masalah pendidikan di Palembang cukup pelik, dengan data menunjukkan 30 persen SD dan 35 persen SMP masih mengalami kerusakan berat.

"Sekolah-sekolah ini tidak boleh dibiarkan. Anak Palembang berhak mendapat lingkungan belajar yang layak,"

kata Ratu Dewa.

2. Kesehatan

Ratu Dewa menyebut tidak ada efisiensi untuk layanan wajib. Regulasi nasional menempatkan kesehatan sebagai layanan wajib. Fasilitas, alat kesehatan, hingga tenaga medis tetap harus mendapatkan dukungan penuh.

"Kesehatan itu hak dasar warga. Tidak ada diskusi soal pemotongan anggaran," tegasnya.

3. Infrastruktur

Bagi warga, jalan rusak adalah keluhan paling nyata. Ratu Dewa memahaminya. "Warga tidak peduli itu jalan

kota atau provinsi. Yang penting jalan mulus," tuturnya sambil tersenyum.

Komitmen memperbaiki seluruh jalan kota menjadi simbol bahwa pelayanan dasar tetap berjalan, bahkan di tengah kesulitan fiskal.

Membongkar Struktur untuk Efisiensi: OPD Digabung, Aset Diaktifkan

Salah satu langkah paling berani Ratu Dewa adalah keputusan menggabungkan beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Gagasan ini bukan sekadar penghematan ruang, melainkan strategi menyeluruh untuk mengaktifkan kembali aset-aset kota yang selama ini "tidur".

Ratu Dewa menjelaskan bahwa biaya operasional gedung pemerintah sangat besar. Mall layanan publik saja membutuhkan biaya pemeliharaan dan listrik yang tidak kecil.

"Maka saya berpikir, bukankah lebih efisien bila mereka ditempatkan dalam satu gedung?" katanya.

Nanti ada 3 penggabungan OPD, misalnya DMPTSP digabung Dinas Pariwisata, Dispora yang digabung jadi satu.

Dinas Perhubungan digabung Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pol PP.

Penggabungan perkantoran OPD ini tidak menggunakan dana APBD melainkan sistem



sharing. Sebelumnya akan ada tim kajian yang diketuai Sekda Palembang dengan OPD Pengampu sehingga kajian ini akan komprehensif.

“Jadi penggabungan ini tidak asal-asalan, ada kemanfaatannya bagi OPD dan bagi warga Kota Palembang,”

Penghematan dari penggabungan gedung OPD tidak main-main. Mulai dari listrik, makan-minum pegawai, hingga ATK, total penghematan diperkirakan Rp 40–50 miliar per bulan, angka yang sangat signifikan.

Yang menarik, penggabungan gedung ini tidak menggunakan APBD, melainkan sistem sharing dan optimalisasi aset.

Perburuan PAD: Target Rp 1,93 Triliun

Agar roda pemerintahan tetap berputar, Pemkot Palembang juga meningkatkan langkah intensif untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target yang dicanangkan untuk 2026 mencapai Rp 1,93 triliun, angka ambisius di tengah perlambatan ekonomi.

Sumber Penerimaan Utama, dari Penataan reklame dan penertiban titik ilegal, pajak perhotelan dan hiburan. Pajak perusahaan negara (BUMN) dan penguatan digitalisasi pajak daerah.

Sekaligus juga akan menekan belanja. Semua belanja yang tidak bermanfaat dan tidak berguna contohnya menekan perjalanan dinas.

OPD tidak bisa lagi bebas lakukan perjalanan dinas. Kalau itu cukup dengan zoom, komunikasi secara online, “itu akan kita lakukan,” sambungnya.

“Pemangkasan makan minum. ATK dan lain sebagainya. Jadi yang bersifat seremonial kami kurangi semua,” jelasnya.

“Kuncinya sekarang kami ingin memberikan pelayanan dasar bagi warga Palembang. Tapi bagi OPD, sepeser apapun uang itu harus dipertanggungjawabkan,” tegas dia.

Pemotongan TKD memaksa Kota Palembang mengencangkan ikat pinggang. Namun strategi Ratu Dewa menunjukkan bahwa efisiensi bukan berarti mundur.

Kota ini justru menggunakan momentum krisis untuk melakukan penataan struktural, meningkatkan PAD, dan memperbaiki layanan dasar.

Jika strategi ini berhasil, Palembang dapat menjadi model kota besar yang mampu bertahan dalam tekanan fiskal nasional, sekaligus contoh bagaimana pemimpin lokal bisa mengubah krisis menjadi peluang pembenahan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Ahmad Nashir, menjelaskan bahwa dana transfer dari pusat yang pada tahun 2025 mencapai Rp2,4 triliun, diperkirakan turun menjadi sekitar Rp1,998 triliun pada 2026.

daerah secara menyeluruh.

“Langkah yang bisa kita lakukan adalah optimalisasi pendapatan, pencegahan kebocoran anggaran, serta peningkatan pengawasan keuangan daerah. Itu yang kami utamakan,” tegasnya.

Kendati terjadi penurunan dana, Pemkot Palembang menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak akan mengganggu program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Beberapa di antara-



Dengan demikian, terdapat selisih penurunan sekitar Rp480 miliar dari tahun sebelumnya.

Menurut Nashir, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga stabilitas fiskal di tengah keterbatasan sumber anggaran. Oleh karena itu, Pemkot Palembang akan menerapkan langkah efisiensi dan optimalisasi pendapatan

nya mencakup program berobat gratis (UHC), sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

“Pelayanan dasar kepada masyarakat tetap kami jalankan, namun dengan pendekatan yang lebih efektif dan efisien. Jika dibutuhkan, pembiayaan pembangunan dapat dilakukan melalui skema pendanaan lain,” kata Nashir •



Ketut Sumedana

SIAP PERKUAT SINERGI BANGUN DAERAH

Kejaksanaan Tinggi Sumsel bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kondusifitas dan kelancaran berbagai program pembangunan. Kolaborasi lintas lembaga inilah yang disebutnya sebagai modal penting dalam menciptakan iklim pemerintahan yang solid.

Untuk itu Kajati Sumsel Ketut Sumedana menyatakan siap bersinergi dan mendukung setiap program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel. Ia menilai komunikasi yang baik menjadi kunci agar pembangunan berjalan optimal.

"Kami di Kejati siap berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Sumsel. Apapun yang berkaitan dengan kepentingan daerah akan kami dukung," tegas Ketut.

Ia juga menambahkan bahwa Kejati Sumsel tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam memberikan pendampingan hukum terhadap proyek-proyek pembangunan strategis daerah.

Agar sinergi ini berkelanjutan Ketut Sumedana, berjanji untuk melanjutkan kerja sama yang telah terbangun. Ia menilai Sumatera Selatan memiliki potensi besar yang perlu dijaga melalui sinergi kuat antara lembaga hukum dan pemerintahan.

"Kerja sama yang telah berjalan baik ini akan kami lanjutkan bahkan kami tingkatkan. Tujuannya jelas: demi kemajuan Sumsel dan kesejahteraan rakyatnya,"

ujarnya.

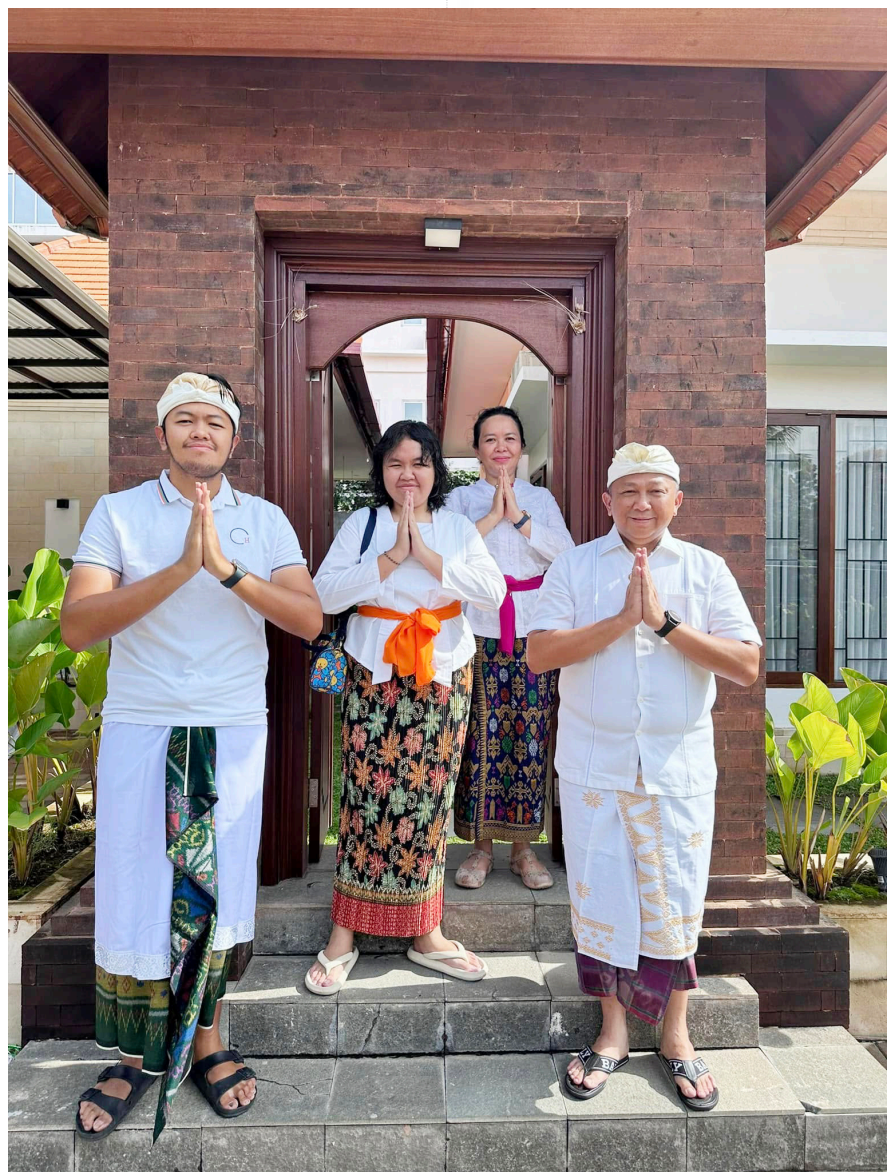
Hadirnya Ketut Sumedana di Sumsel mendapat sambutan hangat dari Gubernur Sumatera Selatan. Bahkan kedua pihak sepakat memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk memastikan pembangunan di Sumsel berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Kita tidak bisa membangun sendiri. Semua pihak harus terlibat, terutama jajaran Forkopimda Sumsel. Salah satu

fokus utama kita sekarang adalah pembangunan pelabuhan samudera Tanjung Api-api," ujar Herman Deru.

Menurutnya, pembangunan pelabuhan samudera tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi pintu gerbang ekonomi baru bagi Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk Kejati Sumsel, sangat diperlukan.

"Ini PSN, maka tentu butuh dukungan



hukum dan pengawasan yang baik agar semua berjalan sesuai rencana. Kami sangat berharap Kejati Sumsel menjadi mitra pengawal pembangunan,” tambahnya.

Selain membahas pembangunan, Herman Deru juga menyoroti kondisi sosial di Sumsel yang tetap kondusif meski dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang suku, adat, dan budaya. Menurutnya, hal ini menunjukkan keberhasilan seluruh elemen daerah dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial.

“Sumsel tetap zero konflik. Ini berkat kerja sama semua pihak, termasuk peran aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas daerah,” ujarnya.

Pernah Bertugas di KPK

Sebelum ke Sumatera Selatan, Ketut Sumedana sempat menjabat sebagai Kajati Provinsi Bali. Nama Ketut Sumedana sendiri terbilang cukup populer karena ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung.

Ketut Sumedana adalah pria kelahiran Buleleng, 25 Agustus 1974. Ia menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Mataram jurusan Hukum Tata Negara.

Dia juga sudah menikah dengan Luh Kadek Sustiningrum, Ketut Sumedana serta dikaruniai dua anak bernama Gede Adhie Yudhistira dan Made Swi Laksmi.

Jejak karier Ketut Sumedana bisa dibilang sangat lengkap dalam dunia kejaksaan. Ia mengawali karier kejaksaan sebagai Staf TU di Kejaksaan Negeri Praya, Lombok. Kemudian naik pangkat menjadi Kasi Sospol Kejaksaan Tinggi NTB. Kemudian menjadi Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi NTB.

Kemudian mendapat mandat jadi Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, Bali. Tak hanya dalam dunia kejaksaan, ia juga mencoba mengepakkan sayapnya untuk bergabung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 5 tahun. Selama di KPK, ia bertugas menjadi penyidik, penyidik, dan penuntut.

Bertugas selama 5 tahun di KPK membuat Ketut Sumedana menimba banyak ilmu dan pengalaman.

“Kalau kita cuma di sini (Kejaksaan) saja, hebat, kayaknya kayak katak dalam tempurung. Hebat nggak pernah dilihat

sama orang lain, sehingga mencoba challenge baru di tempat lain,” ujarnya. seperti dikutip dari Puspenkum Kejagung RI.

Bahkan ia juga pernah menjadi Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penuntutan di KPK. Hingga akhirnya ia menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Keberhasilannya membawa institusi Kejaksaan yang semakin dikenal masyarakat itu membuatnya kini dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali.



Lakukan Gebrakan Pertama

Setelah resmi menjabat sebagai Kajati Sumsel, pria yang hobi jogging di kawasan Kambang Iwak Park (KIP) ini langsung memberikan gebrakannya.

Pada awal November lalu Kejaksaan Tinggi Sumsel melakukan penetapan pada 6 tersangka terhadap dua perkara dugaan kredit fiktif pada bank plat merah dan bank daerah.

Perkara dari Bank Daerah dengan kerugian lebih dari Rp 12 miliar dan telah

masuk ke penyidikan umum.

Untuk bank plat merah di pusat, Kejati Sumsel telah meningkatkan status dari penyidikan umum ke penyidikan khusus dengan menetapkan 6 tersangka baik dari internal bank dan pihak swasta, dengan estimasi kerugian lebih dari Rp 1,6 triliun lebih.

Pengungkapan kasus ini dipimpin langsung Ketut Sumedana sekaligus menjelaskan kalau para tersangka telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta hasil gelar perkara disimpulkan telah cukup

bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara dimaksud.

Sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka dan untuk kelima tersangka dilakukan tindakan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan dari tanggal 10 November 2025 sampai dengan 29 November 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang untuk Tersangka MS, DO, ED dan RA. ●

GURU

Rusdiyono

Hari Guru Nasional adalah hari yang penuh paradoks. Di satu sisi, kita merayakan jasa tanpa batas dari para “pahlawan tanpa tanda jasa.” Di sisi lain, perayaan ini menjadi pengingat yang menyakitkan akan bobroknya sistem yang gagal melindungi, memberdayakan, dan menyejahterakan mereka.

Sorotan terkini terhadap kasus pemulihan nama baik atau rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada dua guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan: Abdul Muis dan Rasnal, adalah sebuah momen yang tidak hanya mengharukan, tetapi juga wajib menjadi titik tolak perubahan kebijakan struktural.

Kisah Luwu Utara adalah epitomisasi ironi pendidikan kita. Kedua guru tersebut, yang telah mengabdikan puluhan tahun, dipecat dan berurusan dengan hukum bukan karena korupsi atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, melainkan karena niat baik yang tulus: menggalang sumbangan sukarela dari orang tua siswa untuk membayar gaji guru honorer di sekolah mereka yang bertahun-tahun tak terbayarkan secara layak.

Mereka berupaya menambal lubang yang ditinggalkan oleh ketidakberesan anggaran dan birokrasi negara, namun justru terjebak dalam jerat hukum yang kaku dan minim empati.

Intervensi Presiden Prabowo, yang menggunakan Hak Rehabilitasi untuk memulihkan nama baik dan status kepegawaian mereka, adalah sebuah tindakan keadilan yang sangat penting secara simbolis.

Ini bukan hanya menyelamatkan karir dua orang guru di ujung masa pengabdian, melainkan juga menegaskan bahwa niat baik harus dilindungi.

Tindakan ini mengirimkan pesan kuat ke seluruh birokrasi di bawah, dari tingkat daerah hingga kementerian, bahwa mereka harus lebih berhati-hati dan mengutamakan rasa keadilan dalam menindak guru.

Rehabilitasi ini adalah penutup manis bagi Muis dan Rasnal, tetapi bagi bangsa, ia adalah alarm keras tentang rapuhnya perlindungan profesional bagi para pendidik.

Kasus Luwu Utara sesungguhnya adalah konsekuensi langsung dari kegagalan sistemik yang lebih besar: krisis kesejahteraan guru di Indonesia, khususnya bagi mereka yang berstatus honorer.

Data terbaru menunjukkan jurang yang menganga ini. Survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) pada 2024 mengungkapkan fakta yang memilukan.

Sekitar 74 persen guru honorer di Indonesia memiliki peng-

hasilan di bawah Rp2 juta per bulan, bahkan ada kelompok yang digaji di bawah Rp500 ribu.

Nominal ini jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terendah di Indonesia. Memaksa mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang serba pas-pasan, bahkan terlilit utang.

Guru honorer, yang sering menjadi garda terdepan pendidikan di daerah 3T, dipaksa mengabdikan dengan standar hidup yang jauh dari layak.

Kondisi inilah yang menciptakan “kekosongan moral” dan operasional. Abdul Muis dan Rasnal tidak akan mencari dana patungan jika guru honorer di sekolah mereka sudah terjamin gajinya.

Mereka terpaksa berinisiatif karena tuntutan moral untuk memastikan rekan-rekan mereka tetap dapat mengajar, yang pada akhirnya membelokkan mereka ke jalur yang berisiko.

Untuk membuat Hari Guru Nasional menjadi momentum perubahan yang sejati, dan agar kasus Luwu Utara tidak terulang, upaya rehabilitasi harus diperluas pada tiga pilar utama.

Pertama, rehabilitasi kesejahteraan struktural. Negara tidak boleh lagi menunda penyelesaian status dan gaji guru honorer.

Rehabilitasi sejati adalah mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jaminan gaji setara UMK di wilayah masing-

masing, atau bahkan lebih tinggi di daerah 3T.

Anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN harus benar-benar dioptimalkan untuk menyejahterakan guru, bukan hanya untuk pembangunan fisik atau program seremonial.

Kedua, rehabilitasi martabat dan perlindungan hukum. Langkah rehabilitasi dari Presiden Prabowo harus diikuti dengan penguatan regulasi di tingkat teknis.

Perlu ada revisi atau penegasan hukum yang jelas dan humanis mengenai batas-batas sumbangan sekolah, peran komite, dan perlindungan bagi guru yang berinisiatif.

Kewenangan birokrasi daerah untuk menjatuhkan sanksi berat harus diregulasi ulang. Guru harus memiliki rasa aman bahwa niat baik mereka tidak akan berujung di meja hijau atau pemecatan, melainkan diapresiasi.

Ketiga, rehabilitasi profesionalitas dan beban administrasi. Karena sejahtera saja tidak cukup. Guru harus direhabilitasi dari tumpukan beban administrasi yang tidak relevan.

Waktu guru harus dihabiskan untuk merencanakan pengajaran yang kreatif dan berinteraksi dengan murid, bukan mengisi laporan yang berulang di berbagai sistem digital. ●



Menkeu Purbaya

SIAP OBRAK-ABRIK BEA CUKAI

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tengah menghadapi krisis kepercayaan publik dan ancaman ancaman terberat dalam sejarah reformasi pasca-Orde Baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkapkan, Ditjen Bea Cukai terancam dibekukan menyusul serangkaian masalah yang telah mencoreng citra lembaga.



• INFO KHUSUS

Menurut Purbaya, peringatan tersebut juga langsung datang dari pimpinan tertinggi negara, Presiden Prabowo Subianto.

Krisis ini dipicu oleh berbagai isu yang mendapat sorotan tajam, mulai dari dugaan hilangnya pengawasan di bandara khusus seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), hingga kasus penyelundupan yang terang-terangan, seperti bocornya impor beras ilegal sebanyak 250 ton melalui Sabang, Aceh. Citra institusi di bawah naungan Kemenkeu itu dinilai sedang dalam fase terburuk, dengan laporan merah yang menumpuk.

Purbaya tidak menutupi kondisi internal yang genting. Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen pada Kamis, 27 November 2025, ia menyatakan Bea Cukai harus segera berbenah atau menghadapi konsekuensi radikal.

"Kami akan bereskan. Jadi Bea Cukai, saya sudah panggil mereka, kami rapat internal ya. Kami diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi harus perbaiki," tegas Menkeu Purbaya kepada awak media.

Ancaman ini memiliki jangka waktu yang sangat konkret. Menkeu Purbaya telah meminta tenggat waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan reformasi menyeluruh di Bea Cukai. Permintaan waktu ini menegaskan adanya keseriusan dan tekanan tinggi dari Istana untuk memulihkan integritas lembaga yang bertanggung jawab atas penerimaan negara ini.

"Saya bilang ke mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Saya biarkan, saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman serius," ungkapnyanya.

Ancaman tersebut sungguh nyata: jika Bea Cukai gagal menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan dan memuaskan masyarakat, institusi tersebut bisa dibekukan. Konsekuensi langsungnya adalah nasib sekitar 16.000 karyawan Ditjen Bea Cukai yang kini berada di ujung tanduk, terancam dirumahkan jika kegagalan reformasi terjadi.

"Karena gini saya bilang, kalau kita

gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan," imbuh Purbaya, mencoba memicu semangat internal para pegawai.

Skenario terburuk yang diungkapkan Purbaya adalah potensi pengalihan fungsi kepabeanan kepada pihak swasta, sebuah kebijakan ekstrem yang

Soeharto mempercayakan sebagian wewenang Bea Cukai kepada SGS hingga tahun 1995, sebelum akhirnya dikembalikan berdasarkan UU Kepabeanan 1995.

"Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS. Seperti zaman dulu lagi," jelas Purbaya, memberikan pema-



pernah diterapkan di masa lalu. Pemerintah, kata Purbaya, membuka potensi masalah kepabeanan dan cukai di Indonesia dialihkan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).

Langkah ini bukanlah wacana baru, melainkan pengulangan sejarah. Presiden ke-2 Soeharto pada tahun 1985 sempat membekukan Ditjen Bea Cukai yang saat itu terpuruk karena praktik pungli dan penyelundupan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985,

haman yang mendalam tentang konsekuensi kegagalan reformasi saat ini.

Purbaya juga mengakui, masalah paling mendesak yang perlu dibenahi adalah praktik under-invoicing, yakni pelaporan nilai barang ekspor atau impor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, serta penyelundupan barang ilegal. Skala masalah ini terungkap dalam sidak yang dilakukan Purbaya, di mana ditemukan barang impor yang dicatat hanya bernilai USD7, padahal harga pasar barang tersebut bisa mencapai Rp40-50

juta.

Praktik manipulasi nilai ini tidak hanya terjadi di satu sektor. Menurut investigasi yang dilakukan pemerintah, under-invoicing juga terdeteksi pada kegiatan ekspor impor, khususnya antara Indonesia dan Tiongkok. Kesenjangan data yang signifikan antara BPS Indonesia dan International Trade Centre (ITC) turut memperkuat dugaan praktik ilegal ini.

“Kita udah investigasikan ada katanya ekspor dari mana, China-nya besar apa, total ekspornya enggak sama dengan total impornya gitu. Dari China ke Indonesia atau dari Indonesia ke Cina. Nggak lama lagi kita akan kerjakan pakai AI. Jadi akan lebih cepat (investigasinya),” ungkap Purbaya, menegaskan komitmen digitalisasi untuk memburu penyelewengan.

adanya kongkalikong antara aparat dan importir penyelundup.

“Dan kerja Bea Cukai hanya mengadakan ‘denda damai’ belaka yang memuaskan semua pihak yang bersangkutan. Menteri Keuangan patut memeriksa praktik-praktik ‘denda damai’ ini, yang kelihatan telah menjadi satu pola kerja yang teratur,” tulis Mochtar di harian Indonesia Raya, 22 Juli 1969, termuat dalam Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya.

Ketika Ali Wardhana mengunjungi kantor Bea dan Cukai di Tanjung Priok pada Mei 1971, dia melihat para petugas tengah bersantai. Ia juga mendapati kabar adanya penyelundupan ratusan ribu baterai merek terkenal.

“Padahal, ia baru memberikan tunjangan khusus sebesar sembilan kali gaji. Kenaikan tersebut bukan sembarang hadiah, melainkan disertai tuntutan kenaikan pelayanan dan peniadaan penyelewengan,” tulis Saeful Anwar dan Anugerah E.Y. (ed.) dalam Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa.

Ali Wardhana akhirnya melakukan mutasi pejabat eselon II antar unit eselon I. Pada 1978, Direktur Cukai digantikan pejabat dari unit eselon beberapa kali. Namun, cara ini ternyata tidak memperbaiki kinerja Bea Cukai.

Penyelewengan dan penyelundupan terus terjadi. Ali Wardhana kemudian diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan pada 1983. Sedangkan Menteri Keuangan dijabat Radius Prawiro.

Lalu pada 29 Agustus 1983, Radius Prawiro melantik Bambang Soeharto, seorang perwira tinggi Departemen Pertahanan dan Keamanan sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai menggantikan Wahono yang terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur.

Dalam pidato pelantikan, Radius Prawiro menekankan akan memerangi penyelundup hingga ke akar-akarnya.

Namun, penyelewengan dan penyelundupan Bea dan Cukai belum lenyap. Keluhan juga datang dari pengusaha, termasuk pengusaha Jepang mengenai aparat Bea Cukai yang ribet, berbelit-belit, dan pada akhirnya melakukan pungutan liar alias pungli.

Setelah berdiskusi dengan para men-



“Ada under-invoicing ekspor yang nilainya lebih rendah, ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang nggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh katanya Bea Cukai main segala macam,” ungkap Menkeu.

Sebagai langkah mitigasi, Kemenkeu sedang mengebut perbaikan sistem. Menkeu memastikan bahwa para pegawai Bea Cukai siap untuk berubah, salah satunya dengan peningkatan sistem digital dan penggunaan teknologi canggih.

Sejarah Pembekuan Bea Cukai

Pembekuan Bea Cukai bukan hal baru. Aksi ini ternyata pernah terjadi di era Orde Baru. Dalam laporan media Keuangan Kemenkeu berjudul “Mengurai Sejarah Lembaga Bea Cukai”, tertulis ketika itu banyak penyelewengan dan korupsi di Bea Cukai, saat Kementerian Keuangan dipimpin Ali Wardhana.

Menurut jurnalis Mochtar Lubis, praktik-praktik penyelundupan dan penyelewengan di Bea Cukai terjadi karena

• INFO KHUSUS

teri dan mendapat penilaian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.

Berpegang pada Instruksi Presiden, diambil keputusan untuk mempercayakan sebagian wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada PT Surveyor Indonesia yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan swasta asal Swiss bernama Societe Generale de Surveillance (SGS). Bea dan Cukai pun dibekukan.

Enam tahun berselang, kebijakan ini



dievaluasi. Pemerintah menilai Inpres Nomor 4 Tahun 1985 telah sukses memperlancar arus barang. Namun, dinamika perdagangan ekspor-impor menuntut penyesuaian baru.

Pada 25 Juli 1991, Soeharto menandatangani Inpres Nomor 3 Tahun 1991. Poin paling krusial dari aturan ini adalah pernyataan tegas bahwa Inpres Nomor 4 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Lampiran Inpres Nomor 3 Tahun 1991, tertulis kewenangan pemeriksaan barang impor kembali berada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hanya saja, kewenangan ini tidak sertamerta seperti era pra-1985.

Pemerintah menerapkan sistem pengawasan berlapis menggunakan jasa surveyor. Berdasarkan pemeriksaan

tersebut surveyor menerbitkan Laporan Pemeriksaan Surveyor-Ekspor (LPS-E) yang digunakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pemeriksaan yang bersifat final.

Barang impor hanya diizinkan masuk ke wilayah pabean Indonesia apabila dilengkapi Laporan Pemeriksaan Surveyor Impor (LPS-I) yang diterbitkan oleh surveyor di negara asal barang (tempat ekspor dilakukan). Dalam hal ini, pemerintah melibatkan PT Surveyor Indonesia untuk bekerja sama dengan SGS.

Laporan surveyor ini ibarat dokumen sakti. Bea Cukai menggunakan LPS-I sebagai dasar pemeriksaan yang bersifat final. Artinya, petugas Bea Cukai



di pelabuhan Indonesia tidak lagi memeriksa fisik barang secara acak, melainkan hanya melakukan pencocokan dokumen alias hanya memberi stempel.

Kewenangan kemudian dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) diberlakukan secara efektif pada 1 April 1997. UU Kepabeanan kembali memberikan wewenang pemeriksaan barang kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kontrak dengan SGS berakhir.

Dukungan DPR

Desakan reformasi Bea Cukai dari Menteri Purbaya disokong penuh oleh berbagai pihak, termasuk dari Komisi XI DPR.

Menurut Anggota Komisi XI DPR, Tom-

my Kurniawan, Bea Cukai harus direformasi secara menyeluruh. Perbaikan itu mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jika tidak citra lembaga ini bakal semakin terjerembab dan publik sama sekali tak menaruh kepercayaan.

Salah satu hal yang perlu diperbaiki segera adalah soal pengawasan barang masuk. Selama ini, pengawasan dinilai masih dilakukan asal-asalan yang membuka celah bagi barang-barang impor ilegal. Sehingga, perbaikan pengawasan menjadi agenda yang sangat penting.

"Masuknya barang ilegal yang begitu mudah jelas menunjukkan adanya celah pengawasan yang harus segera ditutup. Menteri Keuangan harus tegas dan



DJBC wajib melakukan pembenahan internal secara terbuka," ujarnya.

"Saya optimistis DJBC bisa berenang, tidak tenggelam dalam masalah. Dengan perbaikan nyata, DJBC pasti bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan negara," tambahnya.

Agenda reformasi Bea Cukai juga didukung penuh oleh Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. Dia meminta para petinggi di institusi untuk menggebut pembenahan dalam rentang waktu satu tahun sebagaimana batasan waktu yang diberikan Menteri Purbaya.

"Menteri Keuangan memberi kesempatan satu tahun. Gunakan sebaik-baiknya oleh seluruh jajaran Bea dan Cukai di Indonesia untuk introspeksi diri," katanya.

Dirinya juga mengingatkan, arah kebi-

jakan Menteri Keuangan bersumber dari instruksi Presiden. Karena itu, Misbakhun menilai Ditjen Bea dan Cukai harus memahami posisi dan loyalitas dalam melaksanakan tugas negara.

"Kita harus tahu kepada siapa kita taat kepada Presiden dan Menteri Keuangan. Karena Bea dan Cukai berada dalam kewenangan penuh Menteri Keuangan," tegasnya.

Misbakhun juga optimistis banyak pegawai Ditjen Bea dan Cukai merupakan individu yang memiliki integritas dan dapat menjadi motor pembaruan. Di-



Saya bilang ke mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Saya biarkan, saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman serius.

rinya berharap reformasi internal dapat menjawab kekhawatiran publik terkait kinerja lembaga tersebut.

"Banyak pegawai Bea Cukai yang baik. Mereka harus menjadi motor gerakan agar institusi ini kembali dipercaya masyarakat, dipercaya Menteri Keuangan, dan dipercaya Presiden," ujarnya.

Misbakhun juga menegaskan, pembenahan diperlukan untuk mencegah berbagai ancaman atau potensi pelanggaran yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Langkah itu penting untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian di sektor fiskal dan kepabeanaan.

Titik Balik Pembenahan

Ancaman Pemerintah membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dinilai para ekonom akan menjadi titik balik pembenahan lembaga tersebut ke depannya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan di lembaga Bea Cukai juga perlu diiringi dengan langkah tegas. Menurutnya hal ini diperlukan untuk memulihkan integritas dan meningkatkan kinerja Bea Cukai yang selama ini banyak dipersoalkan publik.

Bhima mengusulkan pembentukan satgas reformasi Bea Cukai yang beranggotakan Menteri Keuangan, ahli eksternal, serta perwakilan swasta. Menurut dia, keterlibatan unsur di luar pemerintahan penting untuk memastikan proses pembenahan berjalan objek-

sejarah Indonesia. Ia menyebut langkah serupa pernah dilakukan pada era pemerintahan Presiden Soeharto ketika fungsi bea cukai sempat dialihkan kepada pihak swasta.

Meski demikian, David berharap dengan ancaman pembekuan tersebut, Bea Cukai dapat segera berbenah menjadi lebih baik.

"Dulu pernah terjadi di zaman Presiden Soeharto, peran Bea Cukai di-outsource ke perusahaan swasta SGS. Mudah-mudahan bisa segera melakukan pembenahan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurrahman, menyebut, ancaman pem-



tif dan transparan.

Ia mengatakan selama ini Bea Cukai memiliki kontribusi terhadap melonjaknya barang impor ilegal serta praktik korupsi yang merugikan industri domestik. Karena itu, peringatan keras dari Presiden harus ditindaklanjuti secara cepat.

"Saya kira warning dari Pak Prabowo harus direspons dengan pembersihan internal bea cukai maksimum dua bulan ke depan. Kalau tidak ada perbaikan maka solusi akhirnya memang dibekukan sementara dan diberikan ke pengawas swasta yang punya keahlian," ujar Bhima.

Bhima menekankan, reformasi menyeluruh menjadi kunci mengembalikan kepercayaan pelaku usaha dan publik terhadap fungsi pengawasan bea cukai di sektor perdagangan internasional.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, menilai wacana pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukanlah hal baru dalam

bekuan ini dinilai sebagai titik balik. Dia secara keras mengingatkan pemerintah terkait besarnya potensi kebocoran.

"Lewat pendekatan empiris yang lazim dipakai untuk negara berkembang, potensi kehilangan penerimaan bea dan pajak impor Indonesia diperkirakan Rp40-80 triliun per tahun. Bahkan, angka itu bisa menembus Rp100 triliun bila memasukkan selisih data ekspor-impor Indonesia dengan negara mitra dagang," ungkap Rizal.

Ia menyimpulkan besarnya angka ini menjelaskan mengapa Presiden menunjukkan reaksi keras karena kebocoran tersebut merugikan APBN sekaligus menciptakan distorsi pasar dan ekonomi rente.

Rizal menilai wacana pelimpahan sebagian fungsi Bea Cukai ke lembaga seperti SGS melalui skema pre-shipment inspection dapat menjadi langkah perbaikan jangka pendek. ●

POLEMIK BANDARA IMIP PRABOWO HARUS COPOT MENHUB

Kontroversi mengenai status dan pengawasan di Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan setelah pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bandara itu beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara, seperti Bea Cukai dan Imigrasi, serta berpotensi menjadi celah kerawanan kedaulatan.

Hal itu juga dikuatkan dengan keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengonfirmasi bahwa otoritas pengawasan dari pihaknya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), absen di lokasi tersebut.

Polemik pemberian dan pencabutan izin penerbangan internasional terbatas di Bandara Khusus IMIP oleh Kementerian Perhubungan telah memicu kritik keras dari berbagai pihak. Kontroversi ini tidak hanya menyentuh masalah administrasi, tetapi juga isu sensitif terkait kedaulatan negara dan transparansi kebijakan, yang pada akhirnya Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi terhadap Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, yang menandatangani izin tersebut.

Kritik utama tentunya tertuju pada kebijakan Menhub Dudy Purwagandhi yang mengeluarkan Kepmenhub KM 38 Tahun 2025 pada 8 Agustus 2025. Pemberian izin penerbangan internasional secara terbatas dan sementara kepada Bandara IMIP dinilai dilakukan secara tertutup dan minim sosialisasi

publik.

Selain isu kedaulatan, muncul pula isu transparansi. Pemberian izin kepada Bandara Khusus IMIP, yang merupakan kawasan industri nikel strategis, memunculkan spekulasi tentang adanya kepentingan tertentu yang melatarbelakangi penerbitan izin tersebut.

Sebelumnya, Menhan Sjafrie menyoroti ketidakadaan perangkat negara secara permanen di bandara tersebut.

"Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara, ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi," kata Sjafrie.

Sjafrie juga menekankan pentingnya penegakan aturan yang setara bagi semua pihak, tanpa memandang latar belakang.

"Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya," tegasnya.

Menkeu Purbaya mengakui bahwa sejauh pengetahuannya, tidak ada petugas DJBC di kawasan bandara PT IMIP. Walau demikian, ia menyatakan

masih perlu memastikan kembali soal nihilnya petugas Bea Cukai di sana.

"Setahu saya, anak buah saya enggak ada di sana (kawasan Bandara PT IMIP), tapi akan saya cek lagi," ucapnya usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta Pusat, Kamis, 27 November 2025.

Menurut Purbaya, polemik yang terjadi terkait bandara IMIP disebabkan oleh adanya kesalahan kebijakan dari otoritas pengawas bandara. Ia mengaku tidak memahami mengapa bandara yang dikatakan berizin tersebut tidak dikoordinasikan dengan otoritas terkait, seperti DJBC Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Saya nggak ngerti kenapa nggak ada (Ditjen) Imigrasi dan Bea Cukai. Mungkin ada kesalahan kebijakan di situ," katanya di Kompleks Parlemen.

Meskipun tidak menjelaskan lebih lanjut kesalahan kebijakan yang dimaksud, Purbaya menduga beroperasinya bandara tersebut dimungkinkan karena adanya perlakuan khusus dari otoritas pengawas. Namun, dia menegaskan kesiapan Kemenkeu untuk mengirim-



kan petugas DJBC kapan pun dibutuhkan.

“Nanti kalau kita diperintahkan, kita taruh petugas dari kami, petugas BHOK (Bea Cukai, Hukum dan Organisasi Kepelabuhanan), saya sudah siap. Kalau imigrasi mesti bisa ngomong dengan Pak Silmy Karim (Dirjen Imigrasi) dan Menteri-nya,” tegas Purbaya.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan segera memberikan klarifikasi untuk menepis anggapan adanya anomali atau “republik di dalam republik” di Morowali.

Kemenhub menegaskan, Bandara IMIP telah mengantongi izin yang masih berlaku dan beroperasi sesuai dengan prosedur. Pihak kementerian memastikan tidak ada area yang lepas dari pengawasan sehingga koordinasi dengan aparat serta pemangku kepentingan lain terus dilakukan.

“Terdaftar, itu terdaftar. Tidak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Ada petugas otoritas. Kami telah menempatkan mereka di sana,” ujar Wakil Menhub, Suntana, dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 26 November 2025 malam.

Pemerintah telah menempatkan sejumlah personel untuk bertugas di Bandara IMIP. Beberapa di antaranya adalah petugas Kemenhub, petugas bea dan cukai, kepolisian, dan petugas badan karantina.

Sesuai dengan arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, pemerintah memastikan seluruh simpul transportasi, termasuk Bandara IMIP, berada dalam kendali penuh negara. Kemenhub bersama TNI dan Polri telah menempatkan aparaturnya di lokasi tersebut guna memperkuat fungsi keamanan, pengawasan, dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Penempatan aparat, Suntana melanjutkan, berfungsi memastikan standar keamanan penerbangan terpenuhi semua, terutama pada kawasan industri strategis. Koordinasi terus dilakukan antara Kemenhub dengan Kemenhan, TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait guna memastikan operasionalisasi bandara berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan regulasi.

“Kami ingin menegaskan bahwa ne-

gara hadir sepenuhnya dan tidak ada area yang berada di luar pengawasan,” kata Suntana.

IMIP adalah perusahaan pengelola Kawasan Industri Morowali yang berdiri di kawasan seluas 2.000 hektare. Setidaknya ada lebih dari 14 perusahaan yang mayoritas mengolah feronikel. Sejak berdiri pada 2013, tiga perusahaan tercatat sebagai pemegang saham. Mereka adalah Shanghai De-

ayani 534 pergerakan pesawat. Jumlah penumpang tercatat 51.180 orang.

Otoritas Bandar Udara (Otban) Wilayah V Makassar menjelaskan alasan Bandara IMIP beroperasi tanpa petugas imigrasi dan bea cukai. Otban menegaskan, ketiadaan petugas Custom, Immigration, and Quarantine (CIQ) di bandara tersebut adalah hal yang sah dan sesuai regulasi, karena status bandara itu bukan bandara interna-



cent Investment (Group), PT Sulawesi Mining Investment, dan PT Bintang Delapan Investama.

Dalam laman Kemenhub, bandara ini tercatat sebagai Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang mengantongi kode resmi. Berdasarkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), bandara itu berkode ICAO, sedangkan Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) berkode MWS. Bandara dikelola swasta di bawah tanggung jawab Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, Sulawesi Selatan.

Sepanjang 2024, Bandara IMIP mel-

sional.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Keamanan Penerbangan, Angkutan Udara, dan Kelakudaraan Otban Wilayah V Makassar, M Sholehuddin, merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 yang mengatur bandara mana saja yang wajib menyediakan layanan CIQ untuk penerbangan langsung internasional.

“Bandara Khusus IMIP bukan termasuk kategori bandara internasional atau bandara yang digunakan melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri. Secara otomatis, kehadiran

• INFO KHUSUS

CIQ tidak diwajibkan berada di Bandara IMIP,” jelas Sholehuddin, Jumat, 28 November 2025.

Otban menguatkan penjelasannya dengan data operasional. Selama periode Januari hingga Oktober 2025, tidak ada satu pun penerbangan internasional yang tercatat mendarat atau lepas landas dari Bandara Khusus IMIP. Seluruh aktivitas penerbangan berstatus domestik.

“Terpantau hanya penerbangan domestik. Tidak ditemukan penerbangan langsung dari dan ke luar negeri di

“Penerbangan dari China masuk melalui Bandara Internasional di Manado atau Jakarta. Di sana, mereka menjalani pemeriksaan imigrasi, bea cukai, dan karantina. Setelah dinyatakan jelas, mereka baru melanjutkan perjalanan dengan penerbangan domestik menuju Morowali,” paparnya.

Butuh Perizinan Berlapis

Kontroversi Bandara IMIP yang dianggap ilegal dan disebut sebagai bandara tertutup ditepis para pakar penerbangan. Sebab, bandara tersebut berstatus



Bandara IMIP,” ujarnya.

Sholehuddin menambahkan, sejak awal beroperasi, bandara ini memang tidak pernah dirancang memiliki layanan CIQ karena sesuai fungsinya sebagai bandara khusus yang tidak menangani lalu lintas internasional.

Menjawab isu kedatangan pekerja asing, Sholehuddin menjelaskan alur yang sebenarnya. Kedatangan pekerja dari China, atau negara lain, tetap melalui pemeriksaan CIQ yang lengkap di bandara internasional resmi terlebih dahulu.

bandara khusus. Bandara serupa tersebar di beberapa tempat lain.

Menurut pengamat penerbangan, Alvin Lie, kategori bandara hanya berupa bandara khusus dan bandara umum. Pelayanan bandara dapat dikelompokkan menjadi jasa rute domestik atau domestik dan internasional.

“Bandara IMIP di Morowali berkategori bandara khusus yang melayani hanya penerbangan dioperasikan oleh pemilik bandara dan penerbangan tidak berjadwal. (Pihaknya) mempunyai perjanjian dengan pemilik/pengelola bandara

dan juga pesawat negara,” tutur Alvin.

Ia menegaskan, Bandara IMIP berstatus legal. Tempat itu juga tersertifikasi, telah memperoleh izin, dan diawasi Kemenhub.

“Mustahil bandara tidak punya izin. Tanpa izin, tidak akan terbit flight approval. Airnav (penyedia jasa navigasi penerbangan Indonesia) tidak akan mengizinkan pesawat take off/landing di sana. Asuransi tidak akan mau cover pesawat, awak, dan penumpangnya,” ujar Ketua Asosiasi Jasa Penerbangan Indonesia ini.

Bandara IMIP, kata Alvin, hanya melayani penerbangan domestik, sehingga lumrah jika tidak tersedia petugas imigrasi serta bea dan cukai. Hal ini juga dialami bandara lain, seperti Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu dan Bandara Husein Sastranegara di Bandung.

Sejauh persyaratan bandara khusus terpenuhi dan izin berlaku, keberadaan petugas negara tidak diwajibkan. Kemenhub dapat menginspeksi atau mengaudit setiap saat untuk mengawasi.

Adapun pesawat dari luar negeri harus mendarat di bandara internasional. Setelah menjalani proses imigrasi, bea dan cukai, serta karantina lintas terbang ke bandara domestik. Pengawasan dan pelayanan penerbangan berlapis-lapis sehingga mustahil adanya penerbangan gelap. Jika hal itu terjadi, berarti semua instansi berhasil dibobol.

Hal senada diutarakan pakar penerbangan lain, Gerry Soejatman. Bandara IMIP merupakan bandara khusus yang bisa dioperasikan mandiri, selama tidak melayani penerbangan reguler/umum niaga berjadwal.

Penerbangan ke Bandara IMIP dilayani Transnusa dari Manado serta Super Air Jet dan Indonesia Air Asia yang berasal dari Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan penerbangan carter atau niaga non-jadwal. Selain itu, ada pula penerbangan yang dioperasikan dengan pesawat khusus dari IMIP, melalui perusahaan penerbangan carter lainnya.

“Izin bandara khusus tetap memiliki prosedur operasional standar (SOP) dan fasilitas penanggulangan darurat

sesuai standar, serta ketentuan-ketentuan keselamatan dan keamanan lainnya sesuai dengan peraturan Kemenhub. Penerbangan carter ke sana tetap di-cover asuransi oleh pihak operator,” tutur Gerry.

Untuk terbang ke bandara mana pun di seluruh Indonesia, operator penerbangan harus mengantongi persetujuan terbang (flight approval). Izin ini diterbitkan Kemenhub yang menentukan Airtaxi dapat mengizinkan pesawat terbang menuju bandara tujuan.

“Bandara khusus/nonumum itu bukan hal baru ataupun istimewa, dan ada ketentuan dan peraturan yang membolehkannya. Hal ini tidak unik/spesial hanya di IMIP, Morowali saja,” ujar Gerry.

Selain Bandara IMIP di Morowali, bandara khusus juga ditemukan di sejumlah tempat lain. Beberapa di antaranya Bandara Weda Bay (Halmahera, Maluku Utara), Bandara di Pelalawan (Riau), Bandara Pondok Cabe di Banten, Bandara Wiladatika (Cibubur, Jakarta), dan sejumlah bandara perkebunan di Lampung.

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menegaskan setiap bandara yang beroperasi di Indonesia wajib berada di bawah otoritas dan pengawasan negara.

Herman menjelaskan, berdasarkan aturan yang berlaku, pengelolaan bandara sepenuhnya berada di bawah Kementerian Perhubungan sebagai otoritas. Operasinya pun harus melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub atau badan usaha milik negara, seperti Angkasa Pura.

“Kalau ada bandara yang mandiri, tentu harus berada di bawah pengawasan institusi negara. Kalau gubernurnya merasa ada sesuatu yang tertutup dan Satgas PKH menemukan bandara yang berdiri sendiri tanpa sistem negara, itu harus ditertibkan,” ujar Herman, Sabtu, 29 November 2025.

Herman mengaku, dirinya pernah berkunjung langsung ke kawasan industri Morowali, termasuk IMIP dan

Pertambahan Bintang Delapan. Pada 2017–2018, ia bahkan mengkritisi tingginya jumlah tenaga kerja asing dan minimnya transparansi.

“Semestinya segala sesuatu dalam satu sistem negara itu harus terbuka, baik kepada publik maupun institusi. Kalau itu kawasan strategis, harus dilindungi, tetapi bukan berarti tertutup dari sistem negara,” katanya.

layanan imigrasi dan bea cukai, sebagai bentuk kontrol negara.

“Bandara internasional itu harus ada imigrasi dan bea cukai sebagai otoritas yang mencatat keluar masuk orang dan barang. Kalau ada bandara bebas di luar kawasan bebas, itu jelas pelanggaran hukum,” tegasnya.

Dia menegaskan bahwa pengelolaan bandara di luar struktur negara sama



Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai bahwa jika benar terdapat bandara yang beroperasi tanpa izin resmi, maka langkah penertiban wajib dilakukan tanpa kompromi.

“Kalau tertutup dari sistem negara, saya setuju siapa pun harus ditertibkan. (Bandara) IMIP harus ditertibkan. Pertambahan Bintang Delapan harus ditertibkan. Kalau ada yang menabrak aturan hukum, harus ditertibkan,” tutur dia.

Menurut Herman, bandara memiliki fungsi strategis dalam pengawasan mobilitas orang dan barang. Karena itu, bandara internasional wajib memiliki

saja menciptakan sistem tersendiri yang berpotensi mengancam kedaulatan.

“Itu berarti ada sistem dalam sistem negara. Ada negara di dalam negara. Ini tidak boleh. Dan saya mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini,” tegas Herman.

Dia menekankan, seluruh operasi bandara harus mengikuti tata peraturan perundang-undangan nasional. Jika ada pelanggaran, penindakan hukum tidak boleh ditawar.

“Sepanjang mengikuti tata peraturan, kita hormati. Tapi kalau sudah melanggar aturan Indonesia, melanggar sistem negara, maka harus ditindak tegas,” pungkasnya.●



YAKINLAH EKONOMI TUMBUH 6 PERSEN

Kemandirian untuk tidak bergantung pada negara lain akan menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk tumbuh di tengah ketidakpastian global selama beberapa tahun ke depan.

Di sisi lain, kebijakan moneter akan terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sembari tetap menjaga stabilitas.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kondisi global saat ini dipenuhi oleh ketidakpastian akibat perang dagang ekonomi dan hegemoni politik. Meski demikian, perekonomian Indonesia dinilai masih berdaya tahan dan cukup menjanjikan.

"Saya merasa bahwa satu tahun pemerintahan yang saya pimpin, ternyata di akhir satu tahun kita telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia hasil-hasil nyata, prestasi-prestasi yang cukup bisa kita banggakan," kata Prabowo saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat, 28 November 2025.

Menurut Prabowo, capaian tersebut merupakan hasil dari sinergi dan kerja sama dari para pemangku kebijakan di bidang perekonomian. Hal ini tidak lepas dari komitmen pemerintah menjalankan pemerintahan yang bersih, adil, serta bebas dari penyelewengan dan korupsi.

Presiden menyatakan, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah akan terus diarahkan untuk mendukung kepentingan rakyat. Selain itu, pemerintahan juga harus dijalankan dengan tekad berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).

"Kita tidak mau tergantung dengan negara mana pun di dunia. Kita tidak boleh tergantung dan demi keselamatan masa depan bangsa, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri," ujarnya.

Di sisi lain, Gubernur BI, Perry Warjiyo,

menyampaikan, perekonomian global telah berubah dan masih diselimuti oleh ketidakpastian akibat kebijakan proteksionis Amerika Serikat. Namun, prospek ekonomi India, Eropa, serta Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan di tengah perlambatan AS dan China.

BI memperkirakan, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 akan mencapai 4,7-5,5 persen. Pertumbuhan ini akan meningkat menjadi 4,9-5,7 persen pada 2026 dan lebih tinggi lagi sebesar 5,1-5,9 persen pada 2027.

"Kita bersyukur ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global, stabilitas terjaga, pertumbuhan relatif tinggi. Kuncinya hanya satu, sinergi," ucap Perry.

Ia meyakini, prospek perekonomian Indonesia pada 2026 dan 2027 akan lebih baik di tengah perlambatan ekonomi dunia. Ini antara lain didukung oleh

terjaganya inflasi dalam sasaran 1,5-3,5 persen, keseimbangan kebijakan moneter-fiskal, stabilitas nilai tukar rupiah, serta ketahanan eksternal.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga akan ditopang oleh kinerja penyaluran kredit sektor perbankan. Adapun kredit perbankan diperkirakan mampu tumbuh 8-12 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 9-13 persen pada 2027.

Ke depan, kata Perry, kebijakan moneter BI akan tetap diarahkan kepada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Sementara itu, kebijakan makprudensial dan sistem pembayaran akan terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan.

"Dengan terkendalinya inflasi, kami akan mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate (acuan) lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan," katanya.

BI juga akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar di tengah gejolak global melalui langkah-langkah intervensi di pasar keuangan, termasuk dengan membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

BI juga turut berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah dalam Astacita. Langkah ini berupa insentif likuiditas makprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas per Desember 2025. Total insentif yang disiapkan mencapai Rp423 triliun.

"Stabilitas sangat penting bagi negara mana pun untuk tumbuh tinggi dan berdaya tahan. Stabilitas yang dinamis, harga-harga terkendali, rupiah stabil, ekonomi bergerak cepat, dan rakyat mendapatkan manfaat. Itulah Sumitronomics," tutur Perry.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan, ekonomi Indonesia pada 2026 menunjukkan tren pertumbuhan seiring peningkatan konsumsi, belanja pemerintah, serta investasi. Pemanngkasan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin selama 2025 pun ikut mendorong kredit usaha dan belanja masyarakat.

Alhasil, laju inflasi pada Oktober 2025 mencapai 2,86 persen secara tahunan atau masih berada dalam sasa-

ran 1,5-3,5 persen. Selain konsistensi kebijakan suku bunga, dorongan insentif fiskal dari pemerintah juga dinilai turut menjangkar ekspektasi inflasi.

Menurut Airlangga, berbagai indikator tersebut menandai hampir seluruh risiko pertumbuhan pada 2026 telah dikelola dengan baik dan terserap pada 2025. Dengan demikian, pemerintah optimistis pertumbuhan tahun depan akan lebih baik dari 2025.

"Jadi, Pak Presiden, risiko yang akan muncul seluruhnya sudah price-in, sudah masuk di dalam tingkat suku bun-

di akhir tahun.

la memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 mampu mencapai kisaran 5,6-5,7 persen, sebuah lonjakan yang menandai kembalinya momentum percepatan setelah fase perlambatan di awal tahun.

Jika proyeksi ini tercapai, pertumbuhan ekonomi setahun penuh 2025 diyakini bisa mencapai 5,2 persen.

Keyakinan Purbaya ini muncul karena tekanan ekonomi, yang sempat menahan laju pertumbuhan, dinilai mulai mereda dan kini berbalik menuju fase



ga dan harga-harga, termasuk rupiah pada tahun ini, sehingga untuk 2026, yang kita lihat adalah upside risk dengan baseline 5,4 persen sesuai dengan APBN," katanya.

Momentum Pemulihan

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan optimisme tinggi terhadap kinerja ekonomi Indonesia

pemulihan.

"Kami berharap ekonomi di triwulan IV bisa tumbuh 5,6-5,7 persen. Kalau ini terjadi, maka momentum pertumbuhan ekonomi kita sudah berbalik, dari melambat ke arah percepatan," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, 27 November 2025.

Purbaya tidak ragu mengoreksi

• INFO KHUSUS

penyebab perlambatan yang terjadi sepanjang 2025. Ia secara eksplisit menyebut perlambatan ekonomi yang terjadi pada Januari hingga Agustus 2025 kemungkinan besar bukan semata-mata karena faktor global, melainkan karena "salah urus" di dalam negeri. Purbaya sendiri baru dilantik menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya pada 8 September 2025.

"Jadi, kalau dilihat dari sini sih perlambatan ekonomi kita sepanjang

dan minus 0,33 persen pada kuartal II-2025.

Pola belanja yang lambat ini dianggap sebagai pemicu utama fluktuasi laju pertumbuhan, dari 4,87 persen di kuartal I, naik menjadi 5,12 persen di kuartal II, dan sedikit melambat menjadi 5,04 persen di kuartal III.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan, kelambatan belanja kementerian/lembaga di awal 2025 ini terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang



mungkin delapan bulan pertama tahun ini bukan karena global saja. Mungkin bukan karena global, mungkin karena salah urus di dalam yang sudah kita perbaiki," kata Purbaya.

Ia membedah data pertumbuhan ekonomi dari komponen pengeluaran, menyoroti kontraksi yang terjadi pada konsumsi pemerintah, yang tercatat minus 1,37 persen pada kuartal I-2025

mengamanatkan efisiensi dan pencanaan anggaran.

Pemblokiran anggaran baru dibuka pada April, yang membuat belanja barang baru mulai bergulir setelah itu. Purbaya berjanji pola ini tidak akan terulang.

"Ini kita perbaiki dan ke depan saya pastikan di kuartal I tahun depan (2026) kita akan tumbuh terus (kon-

sumsi pemerintah). Kita akan cegah belanja yang terlambat dari pemerintah, sehingga dorongan ke ekonominya akan tetap kuat," janji sang menteri.

Beberapa indikator menguatkan keyakinan Purbaya akan terjadinya percepatan ekonomi di kuartal keempat.

Pertama, pergerakan di pasar saham menunjukkan sinyal positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menorehkan rekor baru di level 8.602 pada penutupan perdagangan Rabu, 26 November 2025.

Menurut Purbaya, pencapaian ini memberikan pesan positif bagi investor jangka panjang dan jangka pendek, mencerminkan membaiknya sentimen pasar terhadap ekonomi nasional.

Kedua, pemerintah disebut turut berperan dalam mendorong pemulihan melalui kebijakan stimulus fiskal. Pemerintah menempatkan dana atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara pada 12 September 2025, yang kemudian diikuti dengan injeksi tambahan sebesar Rp76 triliun pada 10 November 2025. Kombinasi stimulus tersebut dinilai mempercepat pergerakan sektor riil.

Ketiga, Menkeu menyoroti lonjakan indeks kepercayaan konsumen terhadap kinerja pemerintah yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang naik signifikan dari 101,5 pada September 2025 menjadi 113,3 pada Oktober 2025. Peningkatan ini menunjukkan masyarakat semakin optimistis terhadap stabilitas ekonomi.

Dengan meningkatnya kepercayaan publik, Purbaya berharap tensi sosial turut mereda, sehingga pemerintah dan DPR dapat fokus menjalankan program percepatan pertumbuhan.

"Kuncinya ke depan adalah kita harus terus jaga momentum perbaikan ini. Jangan sampai hilang sehingga kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Kalau kita bisa jaga sih, tahun depan kita bisa tumbuh 6 persen dengan tidak terlalu sulit, saya pikir," tutupnya.

Konsistensi kebijakan dan stabilitas sektor keuangan, menurutnya, akan menjadi faktor penentu tercapainya target ambisius tersebut. ●

info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI



INFO PASANG IKLAN
NUR AISAH
0815-1157-6312

IKLAN BACK COVER
RP 75.000.000
 IKLAN DISPLAY/HAL
RP 50.000.000
 IKLAN ADVERTORIAL/HAL
RP 65.000.000
 CENTER SPREAD
RP 80.000.000

*Kami Hadir
 Memberikan
 info Tersebut*

- ▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**
- ▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**
- ▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**
- ▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



INOVASI UNTUK NEGERI
info indonesia

<https://infoindonesia.id>

●●● EDISI #62 DESEMBER 2025



**MENIKEU PURBAYA
OBRAK ABRIK
BEA CUKAI**